



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

**PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, *responsif*, *efisiensi*, *efektif*, *akuntabel*, partisipasi, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015 dan merupakan satu sistem perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam Pasal 129 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa "RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD Provinsi ditetapkan dan selanjutnya menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

18. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, pada Tahun 2015.
4. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kebijakan Umum APBD disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas

maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2015 disusun dengan maksud sebagai berikut:
 - a. menjadi pedoman bagi setiap SKPD untuk menyusun Renja SKPD Tahun 2015;
 - b. menjadi bahan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2015; dan
 - c. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun 2015.
- (2) RKPD Tahun 2015 disusun bertujuan untuk menciptakan sinkronisasi dan integrasi program/kegiatan pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal.

BAB III RENCANA KERJA

Pasal 3

RKPD Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah terhitung sejak 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Pasal 4

RKPD Tahun 2015 dipergunakan oleh SKPD, untuk :

- a. menyusun rancangan akhir Renja-SKPD; dan
- b. menyusun pra RKA-SKPD.

Pasal 5

- (1) RKPD dapat diubah jika tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.**
- (2) Perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :**
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;**
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya, yang harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau**
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.**

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Mei 2014

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 2 Juni 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Bagian Administrasi Hukum



Rokman Torang, SH, MH
NIP.196711021996031001

DAFTAR ISI

Lembar Judul.....	i
Lembar Pengesahan	
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi

Hal

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	7
1.2	Dasar Hukum	8
1.3	Hubungan Antar Dokumen	10
1.4	Sistematika Dokumen RKPD	11
1.5	Maksud Dan Tujuan	12

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah	13
2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi	13
2.1.2	Aspek Kesejahteraan dan Masyarakat	32
2.1.3	Aspek Pelayanan Umum	49
2.1.4	Aspek Daya Saing Daerah	68
2.2	Iklim Berinvestasi	80
2.3	Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD.....	81
2.3.1	Urusan Wajib	82
2.3.2	Urusan Pilihan	105
2.4	Permasalahan Pembangunan Daerah	107
2.4.1	Permasalahan Daerah Yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	107
2.4.2	Penelaahan terhadap RKP, dan RKPD Provinsi	

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	111
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014 dan Perkiraan Tahun 2015	112
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015.	117
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	119
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	120
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	123
3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	130

BAB IV

PRIORITAS DAN SARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	132
4.1.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	132
4.1.2	Prioritas Pembangunan	135

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

REKAPITULASI ANALISIS PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2015	172
---	-----

BAB VII

PENUTUP	180
----------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Hal
2.1	Luas wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012	13
2.2	Luas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kelas Lereng/ Kemiringan per Kecamatan Tahun 2012	15
2.3	Luas Wilayah Menurut Ketinggian per Kecamatan Tahun 2012	15
2.4	Jenis Formasi Geologi Kabupaten Kutai Kartanegara	18
2.5	Nama Sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara	20
2.6	Nama dan Luas Danau di Kabupaten Kutai Kartanegara	20
2.7	Penggunaan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012	23
2.8	Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara	25
2.9	Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012	31
2.10	Perkembangan Indikator Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009 – 2012	32
2.11	Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2000 – 2012	33
2.12	Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s/d 2013 Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Kutai Kartanegara	35
2.13	Perkiraan Persentase Pembagian Total Pendapatan Perkapita Dan Gini Ratio Dengan Menggunakan Metode Desil	39
2.14	Angka melek huruf dan lama sekolah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara	40
2.15	Angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar Kabupaten Kutai Kartanegara	41
2.16	Tingkat Pendidikan Penduduk	42
2.17	Angka harapan hidup, angka kematian bayi dan balita pernah disusui ibunya di Kabupaten Kutai Kartanegara	43
2.18	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2010 – 2012	45
2.19	Jumlah Rumah Tangga Sasaran PPLS 2011 Menurut Klasifikasi Kemiskinan dan Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara	46
2.20	Tabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	47
2.21	Tabel Angka Krimininalitas	48
2.22	Pencapaian Pembangunan Seni, Budaya dan Olahraga	48
2.23	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara	49
2.24	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara	50
2.25	Sementara Sarana Kesehatan di Kecamatan (Puskesmas)	52
2.26	Produksi Sampah Dan Volume Sampah Yang Dapat Ditangani Di Kabupaten Kutai Kartanegara	52
2.27	Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Di Kabupaten Kutai Kartanegara	54
2.28	Persentase Rumah Layak Huni Di Kabupaten Kutai Kartanegara	54
2.29	Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Di Kabupaten Kutai Kartanegara	56

Tabel	Keterangan	Hal
2.30	Jaringan Jalan Di Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara	57
2.31	Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	58
2.32	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	60
2.33	Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan	61
2.34	Ijin Trayek Kendaraan Angkutan Umum Di Kaupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012	61
2.35	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2010-2012	62
2.36	Jumlah Orang Dan Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Melalui Dermaga Dan Terminal Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 - 2012	63
2.37	Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 - 2012	64
2.38	Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 - 2012	65
2.39	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2007 - 2012KabupatenKutai Kartanegara	65
2.40	Perkembangan Jumlah Koperasi di Kutai Kertanegara	66
2.41	Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2012	67
2.42	Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Menurut Daerah Kota dan Pedesaan, Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008-2012	69
2.43	Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Kutai Kartanegara 2009 s.d 2012	70
2.44	Produktivitas Total Daerah	70
2.45	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	71
2.46	Orang/Barang Yang Terangkut Melalui Dermaga Per Tahun	72
2.47	Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2008 s.d 2012 Kabupaten Kutai Kartanegara	72
2.48	Persentase luas Wilayah Produktif Tahun 2008 s.d 2012 Menurut Kecamatan	73
2.49	Sarana Perbankan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013	75
2.50	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009-2012	76
2.51	Daftar Hotel dan Tingkat Hunian Kamar (%) di Kecamatan Tenggarong Tahun 2012	79
2.52	Angka Kriminalitas	80
2.53	Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Investasi di KabupatenKutai Kartanegara	81
2.54	Perkembangan Capaian Indikator Program Pada Urusan Wajib Pendidikan	82
3.1	Distribusi PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Penggunaan Atas Harga Konstan Tahun 2011-2012	115
3.2	Perkembangan Konsumsi Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2012	115
3.3	Nilai Investasi dan ICOR Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2012 (Triliyun Rupiah)	116
3.4	Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara 2013 (YOY)	116
3.5	Proyeksi Pendapatan Daerah 2015 (dalam juta)	122
3.6	Proyeksi Belanja Daerah 2015. (dalam juta)	130
3.7	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2015 (dalam juta)	131
4.1	HubunganVisi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan	133

Tabel	Keterangan	
4.2	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015	136
4.3	Penjelasan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015	138
5.1	REKAPITULASI ANALISIS PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2015	172

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	
1.1	Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	10
2.1	Peta Batas Administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara	14
2.2	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Kutai Kartanegara	16
2.3	Peta Topografi Kabupaten Kutai Kartanegara	17
2.4	Peta Geologi Kabupaten Kutai Kartanegara	19
2.5	Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Jenis Kelamin	30
2.6	Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Per Kecamatan	30
2.7	Perkembangan Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara 2008 s/d 2012 (YOY)	36
2.8	PDRB Per Kapita Kutai Kartanegara Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku Tahun 2000-2012	37
2.9	PDRB Per Kapita Kutai Kartanegara Atas Dasar Harga (ADH) Konstan Tahun 2000-2012	38
2.10	Persentase Penanaman Sampah	53
2.11	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013	59
2.12	Posisi Simpanan Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara Pada Bank Umum dan BPR Tahun 2011 (Juta Rupiah)	75
2.13	Persentase Rumah tangga Menurut Akses Terhadap Teknologi dan Informasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013	77
2.14	Persentase Penduduk Uumur 5 Tahun ke Atas Menurut Akses Terhadap Teknologi Internet Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013	77
2.15	Persentase Penduduk Uumur 5 Tahun ke Atas Menurut Lokasi/Media Akses Internet Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013	78
3.1	Trend PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara atas harga konstan tahun 2010-2014	114
3.2	Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara atas harga konstan tahun 2010 2014 99	114

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR. 15 TAHUN 2014, TANGGAL 30 MEI 2014
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan adalah sebuah proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2000).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari tahapan sistem perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah serta mengacu pada RKPD Provinsi dan RKP Nasional. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD ini didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Kedudukan RKPD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015, merupakan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dimana proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 dimulai dengan Rancangan awal RKPD yang menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam penyusunan rancangan Renja SKPD. Dalam rangka menerapkan perencanaan partisipatif, rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan pemangku kepentingan (**stakeholder**) dalam Forum Musrenbang RKPD, musrenbang di kecamatan dan menjadi acuan dalam membahas Renja SKPD dalam forum SKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari periode kepemimpinan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015, dan sekaligus merupakan penjabaran skema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2015.

Dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran. Dimana pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

1.2. DASAR HUKUM

Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015, dilandasi dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;

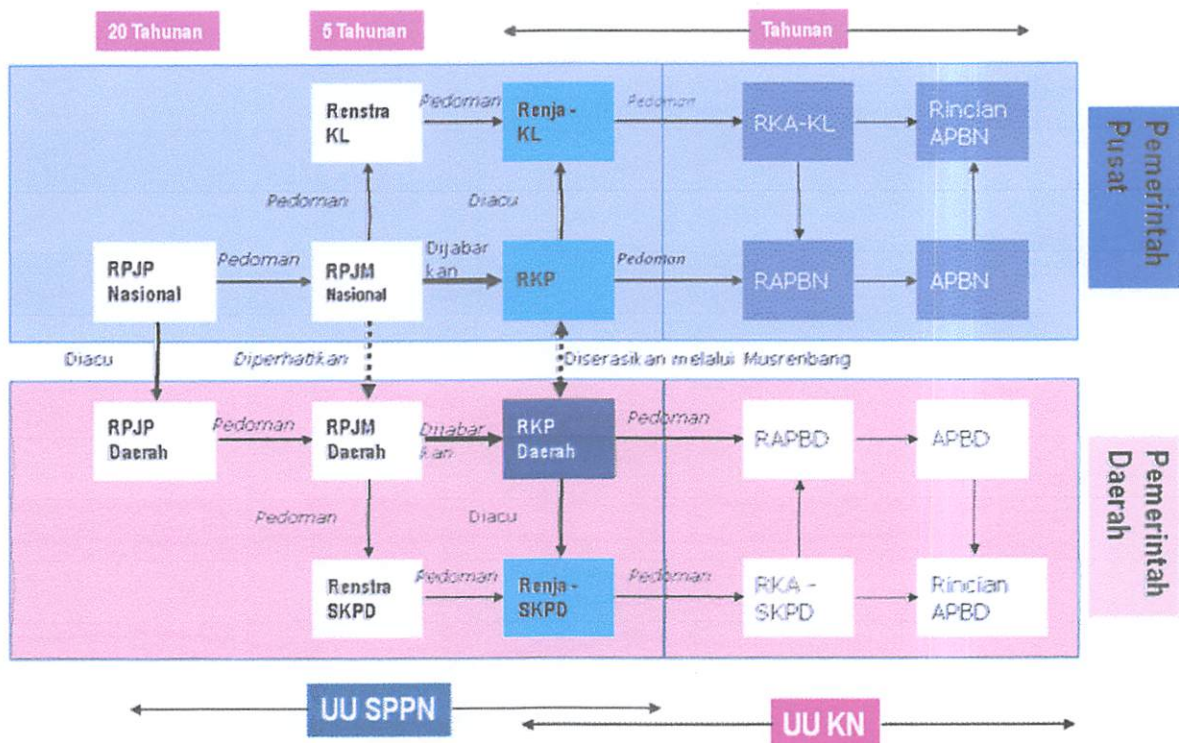
8. Undang-Undang No. 2 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015;
15. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015;
21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015.

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015. Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti RPJM Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan RKP Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2010-2015 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD.

Adapun hubungan keterkaitan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini .

Gambar 1.1.
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.4. SISTEMATIKA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 meliputi :

BAB I

PENDAHULUAN, *berisi tentang* : Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Dokumen RKPD serta Maksud dan Tujuan RKPD 2015;

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN, *berisi tentang* : Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD hingga Tahun 2013 dan Permasalahan Pembangunan Daerah;

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH, *berisi tentang* : Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah;

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH, *berisi tentang* : Tujuan dan Sasaran Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2015;

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH, *berisi tentang* : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas serta pagu yang akan menjadi dasar penyusunan Renja SKPD Tahun 2015.

BAB VI

PENUTUP, *berisi tentang* : Kaidah pelaksanaan RKPD 2015.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1. Maksud

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 disusun dengan maksud :

1. Menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana kerja (Renja SKPD) Tahun 2015 di lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Menjadi acuan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2015;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun 2015;

1.5.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

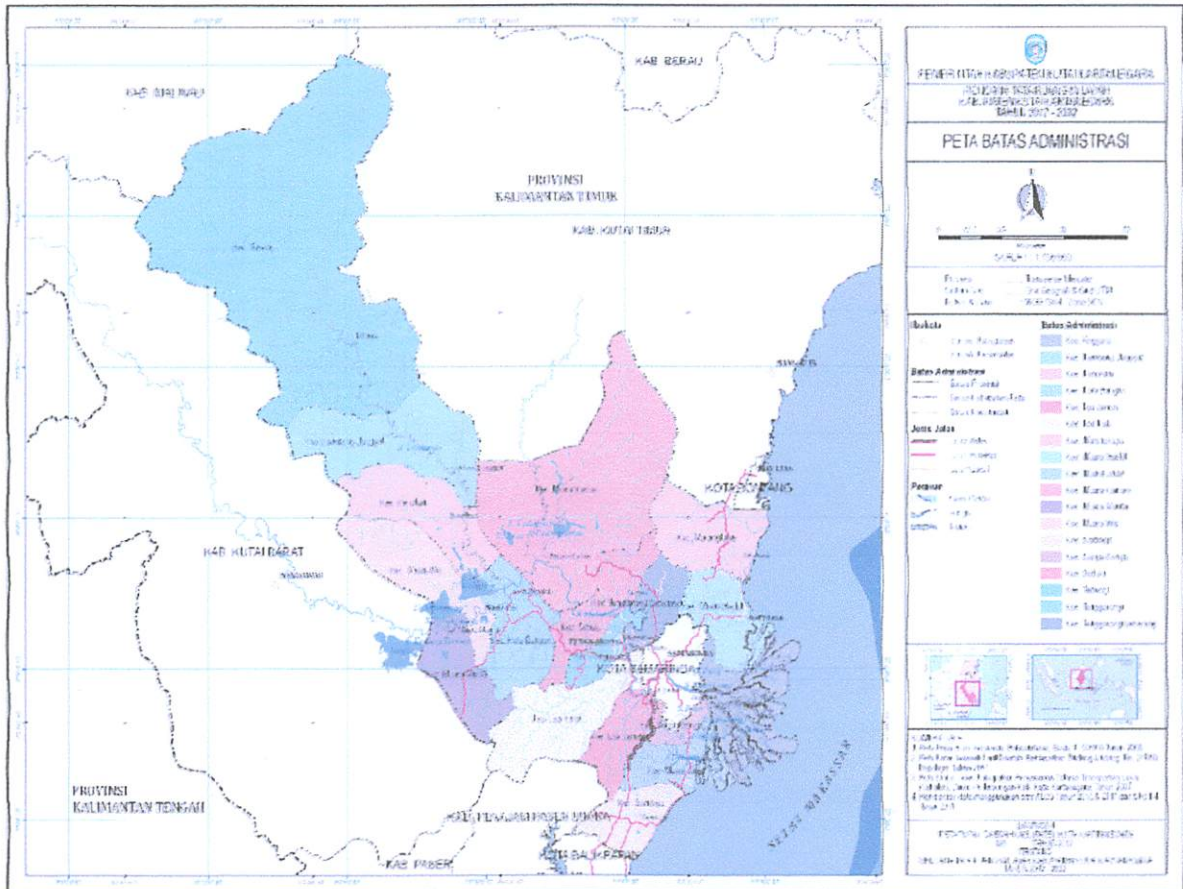
Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki luas wilayah daratan sekitar 27.263,10 km², dan luas wilayah perairan sekitar 4.097 km², secara administratif wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 18 kecamatan dan 237 desa/kelurahan. Ibukota dari Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Tenggarong dan dari 18 kecamatan tersebut terbagi kembali menjadi desa/kelurahan sebanyak 237desa/kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.1. dan Gambar 2.1.

Tabel 2.1
**Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2012**

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH		JUMLAH DESA
		Km ²	Persen	
1.	Samboja	1.045,90	3,84	23
2.	Muara Jawa	754,50	2,77	8
3.	Sanga-sanga	233,40	0,86	5
4.	Loa Janan	644,20	2,36	8
5.	Loa Kulu	1.405,70	5,16	15
6.	Muara Muntai	928,60	3,41	13
7.	Muara Wis	1.108,16	4,06	7
8.	Kota Bangun	1.143,74	4,2	21
9.	Tenggarong	398,10	1,46	14
10.	Sebulu	859,50	3,15	14
11.	Tenggarong Seberang	437,00	1,6	18
12.	Anggana	1.798,80	6,6	8
13.	Muara Badak	939,09	3,44	13
14.	Marang Kayu	1.165,71	4,28	11
15.	Muara Kaman	3.410,10	12,51	20
16.	Kenohan	1.302,20	4,78	9
17.	Kembang Janggut	1.923,90	7,06	11
18.	Tabang	7.764,50	28,48	19
J U M L A H		27.263,10	100,00	237

Sumber: Kutai Kartanegara dalam Angka Tahun, 2013

Gambar 2.1.
Peta Batas Administrasi Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2012-2023

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Kutai Kartanegara terletak pada posisi antara 115°26'28" – 117°36'43" Bujur Timur dan 1°28'21" Lintang Utara sampai 1°08'06" Lintang Selatan. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki batasan administratif wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kabupaten Malinau
- Sebelah Timur : Kabupaten Kutai Timur dan Selat Makasar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan
- Sebelah Barat: Kabupaten Kutai Barat

c. Topografi

Berdasarkan Data Kutai Kartanegara Dalam Angka tahun 2013, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar memiliki kontur bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. Daerah kemiringan datar sampai landai dengan ketinggian antara 7 – 25 m dpl terdapat di beberapa bagian yaitu pada kawasan pantai dan sebagian besar Daerah Aliran Sungai Mahakam.

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng/Kemiringan
Per Kecamatan Tahun 2011.

NO.	KECAMATAN	KELAS LERENG / KEMIRINGAN (%)			
		0-2	2-15	15-40	>40
1	Samboja	16.99	3.693	47.277	16.99
2	Muara Jawa	35.44	0	19.846	6.144
3	Sanga-sanga	12.448	0	10.892	0
4	Loa Janan	2.526	842	42.947	18.105
5	Loa Kulu	12.064	4.721	52.451	71.334
6	Muara Muntai	49.369	4.114	15.281	24.096
7	Muara Wis	85.47	28.023	16.113	11.209
8	Kota Bangun	29.403	6.818	26.421	21.733
9	Tenggarong	5.259	0	30.053	6.011
10	Sebulu	8.891	5.928	59.276	11.855
11	Tenggarong Seberang	6.461	2.66	22.424	10.642
12	Anggana	92.607	11.576	9.261	16.206
13	Muara Badak	40.938	7.642	21.834	12.554
14	Marangkayu	20.207	12.762	38.82	24.993
15	Muara kaman	199.551	64.743	76.716	0
16	Kenohan	47.297	34.398	48.525	0
17	Kembang Janggut	47.176	22.851	75.187	47.176
18	Tabang	28.924	101.043	203.043	443.44
TOTAL		741.021	311.814	816.367	742.488

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2012

Berikut ini merupakan data ketinggian setiap kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang diukur dari permukaan laut. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa menurut luas wilayahnya sebagian besar wilayah Kecamatan Sebulu termasuk ke dalam kelas ketinggian 7 – 25 m dan 25 – 100 m. Wilayah yang tergolong ke dalam kelas ketinggian 7 – 25 m memiliki sifat berupa permukaan tanah datar sampai landai, kadang tergenang, kandungan air tanah cukup baik, dapat diairi dan tidak ada erosi, sehingga sangat cocok untuk pertanian lahan basah. Untuk mengetahui kondisi kemiringan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

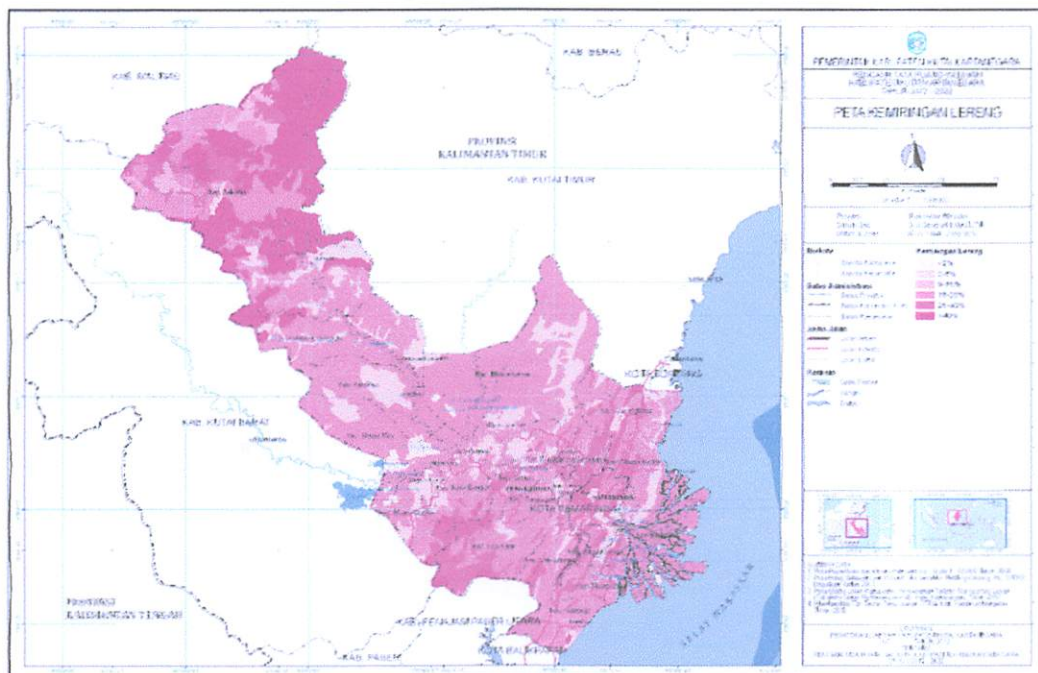
Tabel 2.3
Luas Wilayah Menurut Ketinggian per Kecamatan Tahun 2012

NO	KECAMATAN	KELAS LERENG / KEMIRINGAN (%)		
		0-7	7-25	25-100
1	Samboja	14.442	41.625	28.883
2	Muara Jawa	21.342	26.725	13.363
3	Sanga-sanga	13.125	10.215	0
4	Loa Janan	0	18.809	45.611
5	Loa Kulu	0	47.413	56.762
6	Muara Muntai	0	48.365	27.141
7	Muara Wis	0	101.839	25.146
8	Kota Bangun	0	55.522	17.924

NO	KECAMATAN	KELAS LERENG / KEMIRINGAN (%)		
		0-7	7-25	25-100
9	Tenggarong	0	30.772	10.551
10	Sebulu	0	40.929	36.017
11	Tenggarong Seberang	0	16.318	23.481
12	Anggana	113.507	13.116	3.027
13	Muara Badak	29.677	13.512	23.362
14	Marangkayu	10.188	20.941	45.844
15	Muara kaman	0	232.656	94.282
16	Kenohan	0	77.526	35.129
17	Kembang Janggut	0	41.664	103.548
18	Tabang	0	0	91.956
TOTAL		202.281	837.947	682.027

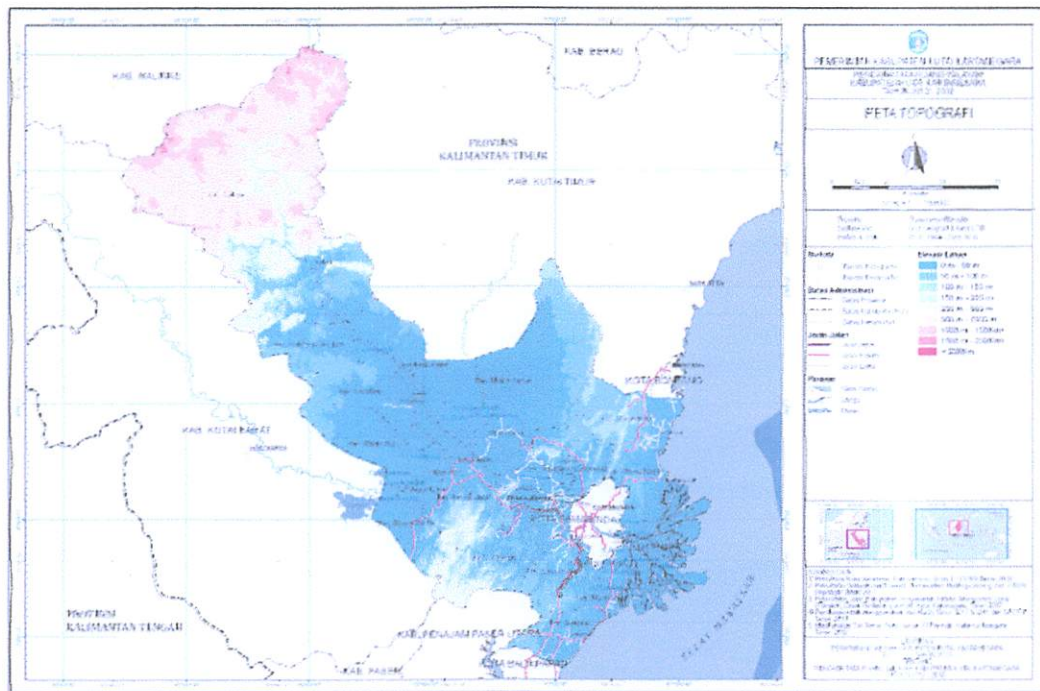
Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2013

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2012-2023

Gambar 2.3
Peta Topografi Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2012-2023

d. Geologi

Struktur geologi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini belum seluruhnya diketahui. Hasil survey dan pemetaan geologi yang dimuat dalam buku “Geologi of Indonesia” oleh R.W. Van Bemmelen tahun 1949, menunjukkan bahwa baru sebagian sebelah timur (daerah pantai dan dataran rendah sekitarnya) yang dipetakan, yang membujur dari arah selatan sampai utara. Diduga bahwa struktur geologi Kabupaten Kutai Kartanegara berumur antara Pratertier hingga Kwartier.

Formasi geologi ini terbentuk pada zaman Pratertier meliputi areal seluas 667,05 Km² Atau 7,55 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Formasi ini terdiri dari; batuan serpih kristalin, phylit, batu sebak, serpih liat, batu liat, napal, batu gamping dan batuan eruftif asam sampai basa. Penyebarannya terdapat di Kecamatan Tabang. Pada zaman Tertier terbentuk formasi batuan : Paleogen, Pamaluan Beds, Pulaubalang Beds, Balikpapan (Kutai Beds), Kampung Baru dan Dumaring Beds.

1. Formasi Paleogen yang terbentuk pada jaman Eosen – Oligosen

Terdiri dari batu pasir berkonglomerat basalt, batu pasir jempungan, napal dan batu gamping, meliputi area 153.08 Km² atau 0,59 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Formasi ini terdapat di kecamatan Kembang Janggut.

2. Formasi Pamaluan (Pamaluan Beds)

Terdiri dari batu pasir, batu opsir, dengan sisipan batuliat, serpih. Batu gamping dan batu lanau (Siltstone) meliputi areal seluas 4.446,24 Km²atau 17 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Formasi ini terdapat di wilayah Kecamatan Muara Badak, Muara Muntai, Kota Bangun, Muara Kaman dan Sebulu.

3. Formasi Pulau balang

Dengan luas 3.726,15 Km²atau 14,27 % dari wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Formasi ini terdiri dari Grewake, batu pasir kwarsa, batu gamping, batu lempung, dan tufa dasitik dengan sisipan batu bara. Formasi ini tersebar dengan garis pantai yang meliputi Kecamatan Muara Badak, Sebulu, Tenggarong, Loa Kulu, Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Kaman, Sanga-sanga dan Samboja.

4. Formasi Balikpapan yang terbentuk pada jaman Miosen

Terdiri dari batu pasir kwarsa dan lempung dengan sisipan lanau, serpih, batu gamping dan Batu bara. Luas formasi ini adalah 4.360,93 Km²atau 16,70 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyebaran formasi ini terdapat di wilayah Kecamatan Muara Badak, Sebulu, Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Sanga-Sanga dan Samboja. Formasi Pulau Balang dan Balikpapan ini dikenal dengan nama formasi Kutai Beds.

5. Formasi Kampung Baru

Terdiri dari batu pasir kwarsa dengan sisipan lempung, serpih, lanau dan lignit, terdapat seluas 1.644,73 Km²atau 6,30 % dari laus wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Formasi ini terdapat di wilayah Kecamatan Muara Badak, Anggana, Sanga-sanga, Muara Jawa, Loa Janan dan Samboja.

6. Pada jaman Kuarter terbentuk alluvium

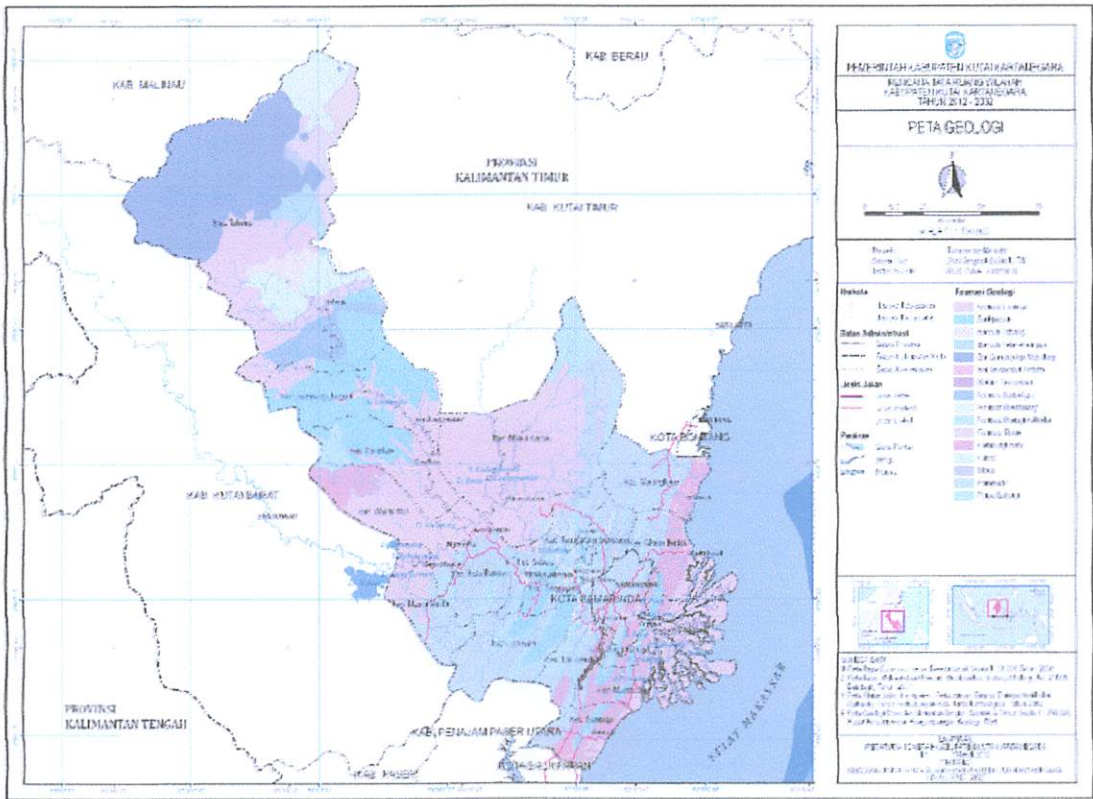
Terdiri dari pasir lumpur dan kerikil. Formasi ini meliputi areal seluas 8.075,76 Km²atau 30,92 % dari luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyebaran dan luas masing-masing geologi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 2.4
Jenis Formasi Geologi Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	JENIS FORMASI GEOLOGI	LUAS (KM ²)	(%)
1	Alluvium	8.430.20	30.92
2	Kampung Baru Beds	1.716.91	6.3
3	Balikpapan Beds	4.552.31	16.7
4	Pulau Balang Beds	3.889.68	14.27

NO	JENIS FORMASI GEOLOGI	LUAS (KM2)	(%)
5	Pamaluans Beds	4.641.37	17.02
6	Paleogene	159.8	0.59
7	Pratertiar	696.32	2.55
8	Tidak ada data	3.176.51	11.65
TOTAL		27.263.10	100

Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara 2012-2023

e. Hidrologi

Potensi hidrologi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat besar. Berdasarkan data yang ada, wilayah ini memiliki 31 sungai besar dan kecil, Dari sungai-sungai tersebut yang tersebar dan terpanjang adalah Sungai Mahakam sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional dengan DAS meliputi DAS Mahakam, DAS Semboja, DAS Senipah, dan DAS Semoi. Aliran Sungai Mahakam yang lebar dan tenang memberikan pengaruh yang sangat besar terutama bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Besarnya potensi air sungai yang mengalir sepanjang sungai dan anak sungai Mahakam ini dapat diakibatkan oleh penggunaan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan kawasan hutan, sehingga sangat berpotensi untuk daya resap air (infiltrasi) di wilayah ini dan selanjutnya menghasilkan volume/debit air yang sangat besar di daerah hulu. Bagi kepentingan sosial ekonomi masyarakat sungai/anak sungai Mahakam

hingga saat ini dimanfaatkan sebagai air baku bagi penyediaan air minum penduduk di sepanjang wilayah yang dilaluinya. Sedangkan lebar dan dalamnya sungai dijadikan sarana esensial bagi kegiatan transportasi air sebagai transportasi lokal maupun antar wilayah (transportasi regional).

Selain memiliki banyak sungai besar dan kecil, wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki banyak danau. Beberapa danau yang cukup besar yang ada di wilayah ini antara lain Danau Semayang dan Danau Melintang. Kedua danau ini cukup terkenal karena merupakan habitat Pesut Mahakam yang dilindungi.

Tabel 2.5
Nama Sungai di Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	NAMA SUNGAI	PANJANG		LEBAR (Meter)	KEDALAMAN (Meter)
		SELURUHNYA	YANG DAPAT DILAYARI		
1	Sungai Mahakam	920	823	100-800	5-12
2	Sungai Loa Haur	120	80	10-30	2-4
3	Sungai Jembayan	180	112	20-80	2-6
4	Sungai Kedang Rantau	132	132	30-100	2-4
5	Sungai Sabintulung	15	15	6-15	2-4
6	Sungai Pela	10	10	8-15	3-10
7	Sungai Kahala	77	77	2-6	3-4
8	Sungai Batangan Muntai	10	10	4-8	3-6
9	Sungai Bongan	20	20	3-5	2-4
10	Sungai Kedang Kepala	319	266	40-150	3-10
11	Sungai Kelinjau	15	10	20-75	3-10
12	Sungai Belayan	319	319	15-150	3-10
13	Sungai Kedang Pahu	144	98	20-75	2-10

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2013

Tabel 2.6
Nama dan Luas Danau di Kabupaten Kutai Kartanegara

NO.	NAMA DANAU	LUAS (Ha)
1.	Ngayau	920
2.	Mulupan	24
3.	Siran	39
4.	Man	29
5.	Melintang	11.000
6.	Semayang	13.000
7.	Ubis	38
8.	Karang	39
9.	Merambi	51
10.	Puan Rabuk	319

NO.	NAMA DANAU	LUAS (Ha)
11.	Loa Karang	23
12.	Perian	198
13.	Tempatung	119
14.	Batu Bumbun	182
15.	Kajo	32
16.	Tanah Liat	49

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2013

Selain danau, terdapat juga beberapa waduk yang tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah sebanyak 3 unit. Waduk yang dimaksudkan adalah Waduk Panji Sukarame di Kecamatan Tenggarong, Waduk Marangkayu di Kecamatan Marangkayu, dan Waduk Samboja di Kecamatan Samboja. Keberadaan waduk ini selain sebagai kawasan konservasi dan sumber air baku, juga digunakan sebagai alat untuk pengendali banjir di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumberdaya air lainnya yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah jaringan irigasi yang manfaat utamanya sebagai pengairan kegiatan pertanian. Jaringan irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu jaringan irigasi kewenangan provinsi dan jaringan irigasi kewenangan kabupaten.

Jaringan irigasi dengan kewenangan provinsi terdapat sebanyak 8 (delapan) unit yaitu Daerah Irigasi Samboja 1.167 hektar, Daerah Irigasi Sabintulung 1.000 hektar, Daerah Irigasi Marangkayu 2.000 hektar, Daerah Irigasi Limpahung 1.500 hektar, Daerah Irigasi Sukabumi 1.000 hektar, Daerah Irigasi Sidomukti 1.000 hektar, Daerah Irigasi Bunga Jadi 1.500 hektar, dan Daerah Irigasi Rampak Lambur 1.000 hektar.

Disamping sumber air permukaan, terdapat juga sumber air tanah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara berupa mata air yang dimanfaatkan sebagai air baku untuk air minum di Kecamatan Muara Jawa.

f. Klimatologi

Iklim wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat dipengaruhi oleh iklim tropis basah yang bercirikan curah hujan cukup tinggi dengan penyebaran merata sepanjang tahun, sehingga tidak terdapat pergantian musim yang jelas.

Iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh letak geografinyayakni iklim hutan tropika dengan suhu udara rata-rata 26°C, dimanaperbedaan antara suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5°–7°C. Jumlah curah hujan wilayah ini berkisar 2.000–4.000 mm/tahun dengan

jumlahhari hujan rata-rata 130-150 hari/tahun. Curah hujan terendah yaitu dari 0 –2.000 mm/tahun tersebar di wilayah pantai dan semakin meningkat ke wilayahpedalaman atau kearah barat.

Curah hujan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dibagi kedalam 6(enam) klasifikasi curah hujan, yaitu :

1. Curah hujan antara 0 – 2.000 mm per tahun.

Meliputi luas 12.376,53²Kmatau 47,39 % luas wilayah Kabupaten KutaiKartanegara, tersebar di bagian Timur di sepanjang pantai dari utara ke selatanyang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Muara Badak, Anggana, Loa Janan,Loa Kulu, Tenggarong, Sebulu dan Muara Kaman.Pada kawasan ini terdapat 2 (dua) bulan lembab yaitu pada bulan Agustus dan bulan September.

2. Curah hujan antara 2.000 – 2.500 mm per tahun.

Meliputi Luas 5.979,52 Km²atau 22,90 % wilayah Kabupaten KutaiKartanegara, sebagian kawasan ini terdapat di Kecamatan Kota Bangun.Kawasan ini mempunyai 2 (dua) bulan lembab yaitu bulan Juli dan Agustus.

3. Curah hujan antara 2.500 – 3.000 mm per tahun

Meliputi luas 1.986,40 Km² atau 7,61 % luas wilayah Kabupaten KutaiKartanegara. Kawasan ini terletak di bagian tengah wilayah Kabupatenmembujur dari utara ke selatan, yang meliputi Kecamatan Kembang Janggut.Pada kawasan ini hanya terdapat satu bulan lembab yaitu pada bulan Juli.

4. Curah hujan antara 3.000 – 3.500 mm per tahun

Meliputi luas 1.344,35 Km²atau 5,15 % luas wilayah Kabupaten KutaiKartanegara. Kawasan ini terletak agak ke barat wilayah Kabupaten denganpenyebaran di sekitar Kecamatan Kembang Janggut membujur ke utara danpada kawasan ini tidak terdapat bulan lembab dan bulan kering.

5. Curah hujan antara 3.500 – 4.000 mm per tahun

Meliputi luas 1.425, 15 Km²atau 5,46 % luas wilayah Kabupaten KutaiKartanegara. Kawasan ini terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Tabang,membujur dari selatan ke utara, dan pada kawasan ini tidak terdapat bulanlembab dan bulan kering. Curah hujan lebih dari 4.000 mm per tahun, meliputi luas 3.004,96 Km² atau 11,51 % luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara,terletak pada ujung barat wilayah Kabupaten yaitu di sebagian KecamatanTabang, dan pada kawasan ini tidak terdapat bulan lembab dan bulan kering.

g. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diklasifikasikan ke dalam kawasan lindung dan budi daya. Untuk kawasan lindung yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, terdiri atas:

- a) *Hutan Lindung*
- b) *Cagar Alam Sedulang di Kecamatan Muara Kaman;*
- c) *Taman Nasional Kutai di Kecamatan Muara Kaman; dan*
- d) *Taman Hutan Raya Bukit Suharto.*

Sedangkan untuk klasifikasi kawasan budidaya, terdiri atas Kawasan Budi Daya Kehutanan (KBK) dan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK). KBK terbagi lagi menjadi kawasan Hutan Produksi tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Sedangkan untuk KBNK meliputi pertanian, perkebunan, pertambangan permukiman, dan tubuh air (termasuk untuk budidaya perikanan).

Tabel 2.7
Penggunaan Lahan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012

N O	PEMANFAATAN RUANG	LUAS (Ha)	%
A.	Kawasan Lindung		
1	Hutan Lindung	212,614	
2	Cagar Alam	20,566	
3	Taman Nasional	50,736	
4	Taman Hutan Raya	61,776	
	Total Kawasan Lindung	345,692	
B.	Kawasan Budidaya		
1	Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)		
	Hutan Produksi Tetap (HP) (Termasuk kawasan hutan bakau/fungsi lindung)	787,675	
	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	504,204	
	Hutan Produksi yang dapat di konversi	893,355	
	Total KBK	2,185,234	
2	Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)		
	Pertanian		
	Perkebunan		
	Pertambangan		
	Permukiman		
	Tubuh Air (Perikanan)		
	Total KBNK		
	Total Kawasan Budidaya		
	Total (Kawasan Lindung + Kawasan Budidaya)		

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai KartanegaraTahun 2012-2023 Potensi Pengembangan Wilayah berdasarkan Jenis Kawasan, tujuan, dan Lokasi dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Potensi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara

JENIS KAWASAN	TUJUAN BUDIDAYA	RENCANA PENGELOLAAN RUANG	LOKASI
Kawasan Lindung			
a. Kawasan Hutan Lindung b. Kawasan Perlindungan Setempat c. Kawasan Suaka Alam, pelestarian Alam, dan Cagar Budaya		1. Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung 2. Rehabilitasi kawasan lindung 3. Reboisasi kawasan lindung	1. Kec. Samboja 2. Kec. Marang Kayu 3. Kec. Kembang Janggut 4. Kec. Tabang
Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK)			
a. Hutan Produksi Tetap b. Hutan Produksi Terbatas c. Hutan Produksi yang dapat dikonversi	1. Memanfaatkan hasil hutan yang eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam 2. Memanfaatkan hasil hutan secara terbatas yang eksploitasinya hanya dapat dilakukan dengan tebang pilih dan tanam	1. Penataan batas kawasan hutan produksi 2. Pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan 3. Mengusahakan hutan produksi melalui HPH dan penerapan prinsip tebang pilih secara tepat pada kawasan hutan produksi 4. Pengawasan secara ketat pada kewajiban reboisasi dan rehabilitasi tanah pada bekas tebangan HPH 5. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lainnya	1. Kec. Samboja 2. Kec. Muara Jawa 3. Kec. Loa Janan 4. Kec. Loa Kulu 5. Kec. Muara Muntai 6. Kec. Muara Wis 7. Kec. Kota Bangun 8. Kec. Sebulu 9. Kec. Tenggarong Seberang 10. Kec. Muara Badak 11. Kec. Marang Kayu 12. Kec. Muara Kaman 13. Kec. Kenohan 14. Kec. Kembang Janggut 15. Kec. Tabang
Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK)			
a. Kawasan tanaman pangan lahan basah	Pengembangan areal persawahan pada kawasan-kawasan yang sesuai menurut hasil analisis kesesuaian lahan didukung prasarana pengairan/irigasi	1. Pengembangan prasarana pengairan 2. Pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu kawasan pertanian yang subur 3. Perluasan areal persawahan 4. Pengembangan usaha transmigrasi untuk menunjang pengembangan	1. Kec. Samboja 2. Kec. Muara Jawa 3. Kec. Sanga-sanga 4. Kec. Loa Janan 5. Kec. Loa Kulu 6. Kec. Muara Muntai 1. Kec. Muara Wis

JENIS KAWASAN	TUJUAN BUDIDAYA	RENCANA PENGELOLAAN RUANG	LOKASI
		kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah	2. Kec. Kota Bangun 3. Kec. Tenggarong 4. Kec. Sebulu 5. Kec. Tenggarong Seberang 6. Kec. Muara Badak 7. Kec. Marang Kayu 8. Kec. Muara Kaman 9. Kec. Kenohan 10. Kec. Kembang Janggut 11. Kec. Tabang 12. Kec. Anggana
b. Kawasan tanaman pangan lahan kering	Mengembangkan areal tanaman lahan kering dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan	1. Perluasan areal pertanian lahan kering 2. Pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan perladangan berpindah 3. Pengembangan kawasan pertanian lahan kering sesuai dengan kesesuaian lahan secara optimal.	
c. Kawasan tanaman tahunan/ perkebunan	Mengembangkan produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan	1. Perluasan dan peremajaan areal perkebunan 2. Pengembangan kawasan perkebunan secara optimal sesuai dengan potensi lahannya. 3. Pengendalian usaha perkebunan agar tetap terjaga kelestarian lingkungannya.	
d. Kawasan peternakan	Mengembangkan areal peternakan atau penggembalaan dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan	1. Pengembangan kawasan peternakan/ penggembalaan secara intensif. 2. Pengendalian upaya pemanfaatan lahan pada kawasan peternakan sehingga tetap terjaga kelestarian sumber makanan bagi ternak hewan besar.	
e. Kawasan perikanan	Mengembangkan produksi perikanan dengan memanfaatkan potensinya.	Pengembangan produksi perikanan dengan tetap memelihara kelestariannya.	
f. Permukiman perkotaan	Mengembangkan kawasan permukiman sebagai tempat pemusatan penduduk yang ditunjang oleh penyediaan sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan hirarki dan fungsinya.	1. Penataan ruang kota (RUTRK, RDTRK, RTRK) berupa penyusunan rencana tata ruang kota atau peninjauan kembali rencana tata ruang kota. 2. Pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota sesuai dengan rencana tata ruang kota. 3. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman terutama sarana air bersih, drainase, limbah, persampahan, listrik.	

JENIS KAWASAN	TUJUAN BUDIDAYA	RENCANA PENGELOLAAN RUANG	LOKASI
g. Permukiman pedesaan	Mengembangkan kawasan permukiman pedesaan yang erat kaitannya dengan kegiatan budidaya pertanian yang lokasinya tersebar sesuai dengan potensinya.	1. Pengembangan desa-desa menjadi pusat pertumbuhan Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan fungsi dan hirarkinya. 2. Peningkatan prasarana perhubungan dan pemasaran antar desa dan kota.	
h. Kawasan pertambangan	Memfaatkan kawasan dengan potensi bahan galian strategi bagi kegiatan eksplorasi, eksploitasi yang termasuk dalam wilayah kuasa pertambangan	1. Pemanfaatan dan pengendalian kegiatan penambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung. 2. Pengedalian fungsi lindung atau rehabilitasi tanah pada kawasan bekas kuasa pertambangan.	
i. Kawasan pariwisata	Mengembangkan kawasan pusat layanan wisata melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta atraksi kesenian tradisional dan penjualan kerajinan/ cinderamata lokal.	1. Penyusunan Rencana Detail Kawasan Wisata 2. Peningkatan aksesibilitas kawasan 3. Pengembangan promosi wisata.	

JENIS KAWASAN	TUJUAN BUDIDAYA	RENCANA PENGELOLAAN RUANG	LOKASI
		kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah	2. Kec. Kota Bangun 3. Kec. Tenggarong 4. Kec. Sebulu 5. Kec. Tenggarong Seberang 6. Kec. Muara Badak 7. Kec. Marang Kayu 8. Kec. Muara Kaman 9. Kec. Kenohan 10. Kec. Kembang Janggut 11. Kec. Tabang 12. Kec. Anggana
b. Kawasan tanaman pangan lahan kering	Mengembangkan areal tanaman lahan kering dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan	1. Perluasan areal pertanian lahan kering 2. Pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan perladangan berpindah 3. Pengembangan kawasan pertanian lahan kering sesuai dengan kesesuaian lahan secara optimal.	
c. Kawasan tanaman tahunan/ perkebunan	Mengembangkan produksi perkebunan terutama untuk komoditas utama dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan	1. Perluasan dan peremajaan areal perkebunan 2. Pengembangan kawasan perkebunan secara optimal sesuai dengan potensi lahannya. 3. Pengendalian usaha perkebunan agar tetap terjaga kelestarian lingkungannya.	
d. Kawasan peternakan	Mengembangkan areal peternakan atau penggembalaan dengan memanfaatkan potensi dan kesesuaian lahan	1. Pengembangan kawasan peternakan/ penggembalaan secara intensif. 2. Pengendalian upaya pemanfaatan lahan pada kawasan peternakan sehingga tetap terjaga kelestarian sumber makanan bagi ternak hewan besar.	
e. Kawasan perikanan	Mengembangkan produksi perikanan dengan memanfaatkan potensinya.	Pengembangan produksi perikanan dengan tetap memelihara kelestariannya.	
f. Permukiman perkotaan	Mengembangkan kawasan permukiman sebagai tempat pemusatan penduduk yang ditunjang oleh penyediaan sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan hirarki dan fungsinya.	1. Penataan ruang kota (RUTRK, RDTRK, RTRK) berupa penyusunan rencana tata ruang kota atau peninjauan kembali rencana tata ruang kota. 2. Pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota sesuai dengan rencana tata ruang kota. 3. Peningkatan sarana dan prasarana permukiman terutama sarana air bersih, drainase, limbah, persampahan, listrik.	

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.

Salah satu klasifikasi kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kawasan rawan banjir, dan kawasan gerakan tanah kecil atau tanah longsor.

1. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kawasan yang mempunyai tingkat banjir yang sangat tinggi, meliputi:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Kecamatan Anggana; | 8. Kecamatan Muara Muntai; |
| 2. Kecamatan Kenohan; | 9. Kecamatan Muara Wis; |
| 3. Kecamatan Kota Bangun; | 10. Kecamatan Samboja; |
| 4. Kecamatan Marang Kayu; | 11. Kecamatan Sanga-Sanga; |
| 5. Kecamatan Muara Badak; | 12. Kecamatan Sebulu; |
| 6. Kecamatan Muara Jawa; | 13. Kecamatan Tenggarong; dan |
| 7. Kecamatan Muara Kaman; | 14. Kecamatan Tenggarong Seberang. |

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah Rawan Banjir, sehingga perlu perhatian khusus dalam perencanaan pembangunannya.

2. Kawasan Rawan Longsor

Tipologi kawasan rawan bencana longsor, diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Daerah lereng perbukit dan pegunungan;
2. Daerah kaki bukit/ gunung;
3. Daerah tebing sungai.

Tingkat kerawanan ditetapkan berdasarkan kajian atau evaluasi terhadap

1. Kondisi alam (dalam hal ini kemiringan lereng, lapisan tanah/batuan, struktur geologi, curah hujan, dan geohidrologi lereng),
2. Pemanfaatan lereng,
3. Kepadatan penduduk dalam suatu kawasan.

Overview dari sebaran wilayah rawan bencana longsor menunjukkan bahwa semua pemukiman padat tidak terletak pada zona dengan tingkat kerawanan tinggi. Namun demikian banyak terdapat kegiatan penambangan

yang berada pada zona longsor, sehingga akan mempertinggi potensi terjadinya bencana. Kegiatan penambangan ini dapat memicu terjadinya gerakan tanah pada zona rawan longsor.

Daerah rawan bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat di:

1. Kecamatan Kembang Janggut;
2. Kecamatan Kota Bangun;
3. Kecamatan Loa Kulu;
4. Kecamatan Muara Kaman;
5. Kecamatan Muara Wis;
6. Kecamatan Sanga-Sanga;
7. Kecamatan Sebulu;
8. Kecamatan Tabang; dan
9. Kecamatan Tenggarong.

2.1.1.4. Demografi

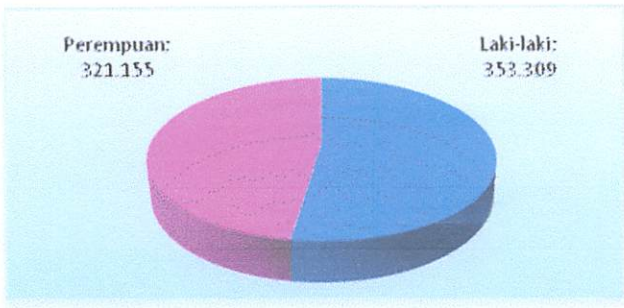
Jumlah, Pertumbuhan, Persebaran, Kepadatan, dan Komposisi Penduduk

Berdasarkan hasil *Proyeksi Penduduk*, penduduk Kutai Kartanegara tahun 2012 adalah **676.464** jiwa yang terdiri atas 353.309 laki-laki dan 321.155 perempuan. Jumlah penduduk Kutai Kartanegara pada 2010 berdasarkan hasil Sensus Penduduk sebanyak 626.680 jiwa sehingga penduduk Kutai Kartanegara diperkirakan tumbuh sebesar 7,62 % pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 sebagian besar penduduk Kutai Kartanegara berada di ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Tenggarong (15,43%). Selanjutnya berada di Kecamatan Tenggarong Seberang (9,64%), Kecamatan Loa Janan (9,16%) dan di Kecamatan Samboja (8,62%). Selebihnya tersebar di empat belas kecamatan lainnya. Pola persebaran ini dari beberapa tahun tidak banyak berubah. Sedangkan Kecamatan dengan persentase jumlah penduduk terkecil adalah Muara Wis sebesar 1,37% .

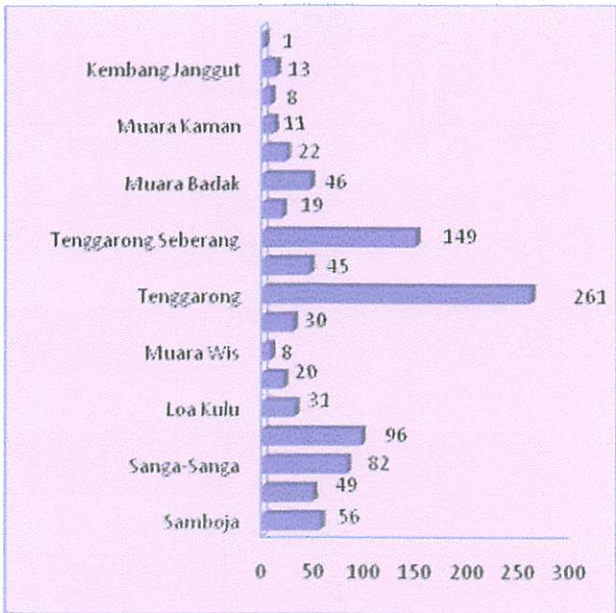
Persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut luas wilayah juga tidak merata. Dengan luas wilayah seluas 398,10 Km², Kecamatan Tenggarong berpenduduk sebanyak 104.044 jiwa. Sehingga kepadatan penduduk di Tenggarong adalah 261 jiwa/ Km². Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan Kecamatan Tabang yang merupakan wilayah terluas di Kutai Kartanegara (7.764,50 km²) dihuni oleh 10.417 jiwa. Sehingga kepadatan penduduk di Kecamatan Tabang sebesar 1 jiwa/ Km².

Gambar 2.5
Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara
berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2013

Gambar 2.6
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Per Kecamatan



Sumber: Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2013

Tabel 2.9
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2012

KECAMATAN		LUAS WILAYAH / AREA (Km ²)	RUMAH TANGGA	PENDUDUK	KEPADATAN RUTA/ Km ²	PENDUDUK/ Km ²
1.	Samboja	1 045,90	14 416	58 171	14	56
2.	Muara Jawa	754,50	8 968	36 839	12	49
3.	Sanga-Sanga	233,40	4 856	19 229	21	82
4.	Loa Janan	644,20	15 858	61 783	25	96
5.	Loa Kulu	1 405,70	11 371	43 383	8	31
6.	Muara Muntai	928,60	5 100	18 668	5	20
7.	Muara Wis	1 108,16	2 378	9 250	2	8
8.	Kota Bangun	1 143,74	8 484	33 966	7	30
9.	Tenggarong	398,10	25 402	104 044	64	261
10.	Sebulu	859,50	9 868	38 930	11	45
11.	Tenggarong Seberang	437,00	16 853	65 014	39	149
12.	Anggana	1 798,80	8 521	34 943	5	19
13.	Muara Badak	939,09	10 346	42 985	11	46
14.	Marang Kayu	1 165,71	5 915	25 256	5	22
15.	Muara Kaman	3 410,10	9 249	36 136	3	11
16.	Kenohan	1 302,20	2 438	10 616	2	8
17.	Kembang Janggut	1 923,90	6 909	24 834	4	13
18.	Tabang	7 764,50	2 269	10 417	-	1
JUMLAH		27 263,10	169 202	674 464	6	25

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara hasil pendataan Sensus Penduduk 2010 sebanyak 626.680 jiwa. Jumlah ini diproyeksikan akan terus meningkat sehingga pada tahun 2012 jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil proyeksi berjumlah 674.464 jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2011, jumlah penduduk mengalami peningkatan sebanyak 23.556 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu setahun sebesar 3,62 persen. Pada tahun 2012 jumlah penduduk laki-laki 353.309 jiwa dan penduduk perempuan 321.155 jiwa. Ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin 110,01.

Penduduk usia produktif terus meningkat sejak tahun 1990 sebesar 197.960 jiwa menjadi 280.173 jiwa pada tahun 2000 dan 414.427 jiwa pada tahun 2010. Dengan demikian beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif (0-4 tahun dan 65+ tahun) menurun. Hal ini ditunjukkan dengan angka *Dependency Ratio* (DR) yang menurun, yaitu pada tahun 1990 sebesar 71,79% menurun menjadi 52,69% pada tahun 2000. Akan tetapi, setelah tahun 2000 jumlah penduduk usia produktif mengalami ketidakstabilan, diduga hal ini juga disebabkan mereka yang pindah ke tempat lain untuk bekerja/ mencari pekerjaan atau sekolah. Pada tahun 2011 penduduk usia produktif tercatat sekitar 66,50% dengan beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia tidak produktif sebesar 50,38%. Sedangkan pada tahun 2012, dengan penduduk usia produktif

sekitar 66,13% mempunyai beban tanggungan terhadap penduduk usia tidak produktif sebesar 51,23%. Angka ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 di Kabupaten Kutai Kartanegara dari 100 orang usia produktif akan menanggung beban sekitar 51 orang usia tidak produktif.

Tabel 2.10.
Perkembangan Indikator Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2000-2012

URAIAN	SATUAN	2010	2011	2012
1. Jumlah Penduduk	Jiwa	626.680	650.908	674.464
2. Pertumbuhan Penduduk	%	3,89	3,87	3,62
3. Kepadatan Penduduk	Jiwa/km ²	22,99	23,88	24,74
4. Rasio Jenis Kelamin	-	111,35	110,48	110,01
5. Rasio Ketergantungan	%	51,22	50,39	51,23
6. Angka Harapan Hidup	Tahun	67,93	68,05	68,17

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2013

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga.

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Ekonomi

PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun 2012 mencapai nilai 132,1 triliun rupiah. Tetapi pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan pada angka 128,27 triliun rupiah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh produksi minyak dan gas yang cenderung stagnan dari tahun 2011-2013. Kondisi ini dapat terlihat dari PDRB dengan migas atas dasar harga konstan yang cenderung stabil dari tahun 2011-2013. Sementara PDRB atas dasar harga berlakudn konstan tanpa migascenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2.11.

TAHUN	PDRB ADH BERLAKU (JUTA RUPIAH)		PDRB ADH KONSTAN 2000 (JUTA RUPIAH)		LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	
	DENGAN MIGAS	TANPA MIGAS	DENGAN MIGAS	TANPA MIGAS	DENGAN MIGAS	TANPA MIGAS
2000	23.404.508	4.760.076	23.404.508	4.760.076	-	-
2005	59.207.769	11.636.105	28.008.486	6.650.958	2,67	11,58
2006	66.363.637	14.311.975	27.299.950	7.437.449	-2,53	11,83
2007	72.263.272	17.692.702	26.203.219	8.148.206	-4,02	9,56
2008	103.959.393	24.119.805	27.427.692	8.678.089	4,67	6,5
2009	90.100.222	28.318.129	27.996.883	9.288.530	2,08	7,03
2010R)	100.465.050	36.774.874	29.169.411	10.507.261	4,19	13,12
2011*)	124.774.929	53.236.184	29.426.708	12.537.080	0,88	19,32
2012**)	132.095.972	65.735.572	30.428.221	14.825.296	3,40	18,25
2013**)	128.270.962	67.185.480	30.752.058	15.880.651	1,06	7,12

Keterangan : r) Angka Revisi *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS Kutai Kartanegara (2013)

Dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, dalam 5 tahun terakhir (2008-2012) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara selalu bergerak positif, meskipun pertumbuhan ekonomi dengan migas cenderung fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi dengan migas sebenarnya kurang mencerminkan kondisi hasil pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, karena sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kinerja pemerintah pusat dalam mengendalikan produksi minyak dan gas. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas lebih mencerminkan kondisi riil hasil pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dan dalam 3 tahun terakhir (2010-2012) menunjukkan angka yang sangat tinggi, yaitu di atas 13%, tetapi pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi melambat cukup tajam dari tahun-tahun sebelumnya.

B. Struktur Ekonomi

Beragamnya kegiatan perekonomian dapat memberikan warna pada struktur perekonomian suatu wilayah. Hal ini karena dipengaruhi oleh potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah distribusi persentase sektoral.

Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Semakin besar persentase suatu sektor, semakin besar pula pengaruh sektor tersebut didalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Tingkat kontribusi terhadap pembentukan PDRB dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap sektor, sehingga akan tampak sektor-sektor

yang menjadi pemicu pertumbuhan (sektor andalan) di wilayah yang bersangkutan.

Nilai PDRB Kutai Kartanegara tahun 2012 secara keseluruhan sebesar Rp 132,10 trilyun, tanpa migas sebesar Rp 65,74 trilyun (50% dari total PDRB), serta tanpa migas & batubara sebesar Rp.22,04 trilyun (17% dari total PDRB). Jika migas dan batubara dimasukkan dalam penghitungan PDRB, maka sektor pertambangan berkontribusi 83,95% terhadap perekonomian Kutai Kartanegara. Tetapi jika migas tidak dimasukkan dalam perhitungannya, sektor pertambanganpun masih tetap mendominasi perannya yaitu sebesar 67,76%. Hal ini perlu diwaspadai dalam menjaga kestabilan pembangunan Kutai Kartanegara dalam jangka panjang. Sektor pertambangan yang menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan APBD Kutai Kartanegara akan segera habis jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan tambang perlu dilakukan dengan benar, yang memperhitungkan eksistensi dan keseimbangan pengembangan sektor ekonomi lainnya dan kelestarian alam yang ada. Perlu juga dikembangkan pengolahan tambang menjadi barang yang bernilai lebih tinggi agar nilai tambah (upah & gaji, surplus usaha, dan pajak tak langsung neto) yang tercipta di Kutai Kartanegara menjadi lebih besar. Hal ini juga sebagai implementasi Permen ESDM No. 7 tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral yang direvisi dengan Permen 11/2012 dan PMK No.75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar. Melihat dampak kerusakan alam yang terjadi saat ini akibat penambangan yang telah dilakukan, **perlu ketegasan** dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung naik setiap tahunnya, meskipun tidak terlalu tinggi. Tahun 2009 kontribusi sektor pertanian sebesar 6,14%(harga berlaku) dan 7,40% (harga konstan) menjadi 7,27%(harga berlaku) dan 7,81% (harga konstan) pada tahun 2013. Meskipun sektor pertambangan dan penggalian mempunyai kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi mempunyai kecenderungan menurun setiap tahunnya. Tahun 2009 kontribusi sektor pertambangan sebesar 80,40% (harga berlaku) dan 78,05% (harga konstan) turun menjadi 81,44% (harga berlaku) dan 74,05% (harga konstan) terhadap total PDRB Kutai Kartanegara.

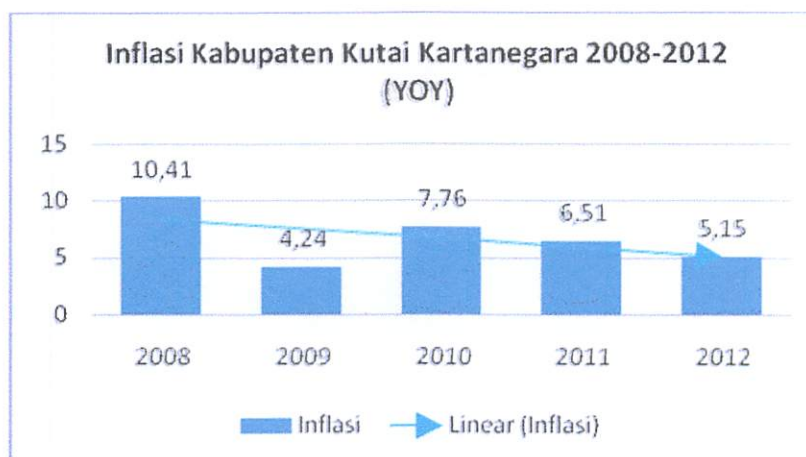
Tabel 2.12
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009 s/d
2013 Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan
(Hk) Kabupaten Kutai Kartanegara

SEKTOR	2010		2011		2012		2013	
	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %	Hb %	Hk %
1. Pertanian	6,41	7,47	6,13	7,70	6,45	7,53	7,27	7,81
2. Pertambangan dan Penggalian	83,92	77,40	84,86	76,00	83,95	75,73	81,44	74,05
3. Industri Pengolahan	1,25	2,40	1,18	2,58	1,16	2,50	1,28	2,62
4. Listrik, Gas dan air bersih	0,05	0,10	0,05	0,11	0,06	0,12	0,07	0,14
5. Konstruksi	3,16	4,78	2,87	5,05	3,24	5,38	3,85	5,84
6. Perdagangan, hotel dan restoran	2,81	4,73	2,71	5,24	2,82	5,23	3,36	5,69
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,42	0,79	0,38	0,84	0,41	0,92	0,51	1,04
8. Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	0,37	0,76	0,37	0,83	0,42	0,89	0,51	0,98
9. Jasa-jasa	1,59	1,58	1,45	1,65	1,49	1,70	1,72	1,83
PDRB	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0	100,0 0

C. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi didasarkan pada indeks harga konsumen (IHK) yang dihitung secara sampel di 45 (empat puluh lima) kota di Indonesia yang mencakup 283-397 komoditas dan dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil survei biaya hidup (SBH). Kabupaten Kutai Kartanegara tidak termasuk sampel kota/kabupaten perhitungan IHK, namun berdasarkan perhitungan BPS Kutai Kartanegara, laju inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara *year on year* (YOY) semenjak tahun 2009 hingga tahun 2012 dapat terkendali pada angka satu digit, kondisi ini menandakan tingkat kenaikan harga barang dan jasa di Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum tidak memberikan beban berat bagi aktivitas perekonomian daerah, namun yang perlu menjadi perhatian adalah salah satu penyebab terjadinya inflasi adalah karena proses *contractional agregat supply* yang disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi karena biaya mahal dalam distribusi barang, hal ini dimungkinkan terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang disebabkan karena sarana infrastruktur jalan yang belum tersedia dengan baik. Namun demikian inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kecenderungan bergerak positif, yang terlihat dari angka rata-rata pertumbuhan inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara 2008-2012 (*end to end*) selalu menurun yakni dengan rata-rata penurunan sebesar minus 16,1 persen.

Gambar 2.7
Perkembangan Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara 2008 s/d 2012



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

D. PDRB per Kapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau *Percapita Income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) serta pendapatan faktor produksi dan transfer masuk (*transfer in*) yang merupakan komponen penghitungan pendapatan regional, belum dapat dihitung maka dalam penghitungan pendapatan per kapita menggunakan PDRB perkapita. Angka ini diperoleh dengan cara **membagi** PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

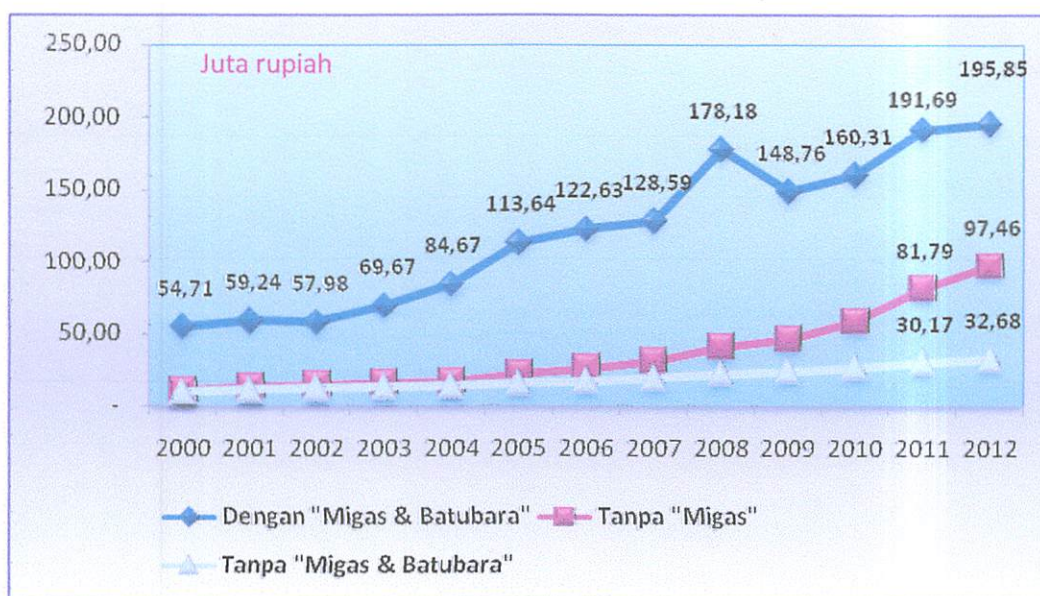
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk dalam satu tahun secara nominal. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata serta pertumbuhannya. Peningkatan PDRB per kapita atas dasar berlaku selama kurun waktu 2000-2012 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Hal yang berbeda dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang mana tingkat pertumbuhannya sangat kecil. Dengan demikian pertumbuhan tingkat pendapatan riil penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun belum begitu banyak berarti.

Nilai PDRB per kapita ADH berlaku di Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung selalu meningkat mulai tahun 2000, kecuali pada tahun 2009 angka ini mengalami penurunan sebesar 16,51% kemudian berangsur-angsur mengalami peningkatan kembali. Tahun 2000 nilainya sebesar Rp.54,71 juta

per tahun dan di tahun 2012 meningkat hampir 4 kali lipatnya menjadi Rp. 195,85 juta per tahun atau rata-rata sekitar Rp. 16,32 juta setiap bulannya. Jika komponen migas dikeluarkan dari penghitungan PDRB, maka besarnya PDRB per kapita ADH berlaku 2000 sebesar Rp. 11,13 juta per tahun dan tahun 2012 sebesar Rp.97,46 jutaper tahun atau terjadi peningkatan rata-rata sebesar 65%setiap tahunnya. Tetapi jika komponen migas dan batubara dikeluarkan dari penghitungan PDRB, maka PDRB per kapita mengalami peningkatan rata-rata sebesar 20% setiap tahunnya. PDRB per kapita tanpa migas dan batubara pada tahun 2000 sebesar Rp.9,48 jutaper tahun menjadi sebesar Rp.32,68 jutaper tahun atau sekitar Rp.2,72 jutaper bulannya pada 2012.

Peningkatan PDRB per kapita ADH berlaku belum menggambarkan peningkatan secara riil, karena masih adanya pengaruh kenaikan harga atau tingkat inflasi yang terjadi di wilayah tersebut. Adapun PDRB per kapita atas dasar harga konstan memberi gambaran pendapatan per kapita penduduk yang riil tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga dan menunjukkan perubahan tingkat kesejahteraan penduduk.

Gambar2.8.
PDRB Per Kapita Kutai Kartanegara Atas Dasar Harga (ADH) Berlaku Tahun 2000-2012

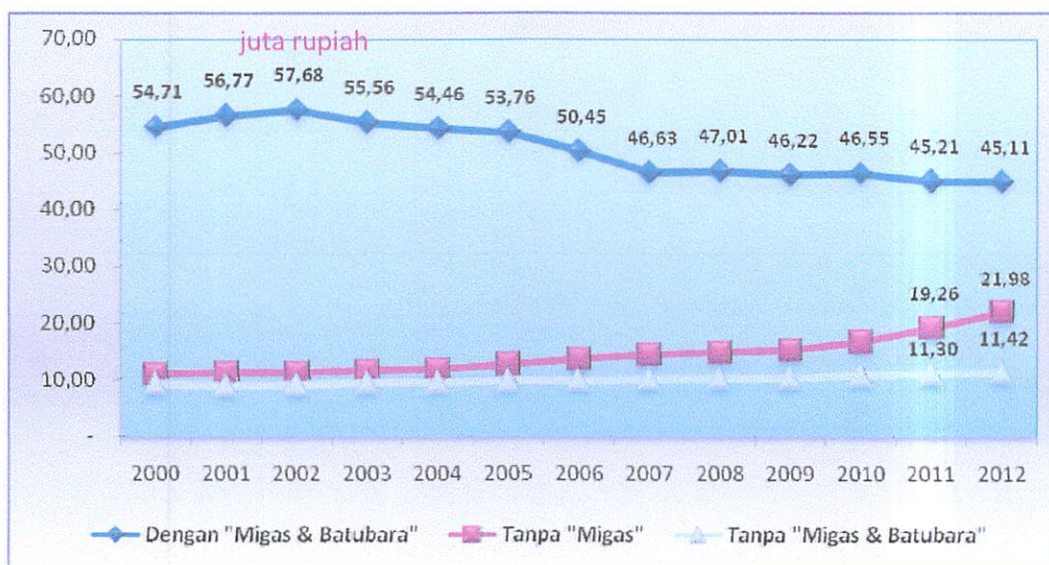


Sumber BPS Kutai Kartanegara, 2013

Pada tahun 2000 PDRB per kapita riil atau ADH konstan (*jika migas dan batubara masih dimasukkan dalam penghitungan PDRB*) sebesar Rp.54,71 juta per tahun dan di tahun 2012 turun menjadi Rp.45,11 juta per tahun atau PDRB per kapita riil penduduk Kutai Kartanegara telah mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,46% setiap tahunnya. Hal tersebut memberi arti bahwa selama periode tahun 2000 - 2012 secara riil daya beli masyarakat cenderung

menurun setiap tahunnya. Akan tetapi jika migas dikeluarkan dari penghitungan PDRB, maka PDRB riil perkapita masyarakat Kutai Kartanegara masih mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 PDRB per kapita riil sebesar Rp.11,13 juta per tahun dan di tahun 2012 naik menjadi Rp.21,98 juta per tahun atau PDRB per kapita riil penduduk Kutai Kartanegara telah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 8,13% setiap tahunnya.

Gambar 2.9.
PDRB Per Kapita Kutai Kartanegara Atas Dasar Harga (ADH) Konstan Tahun 2000-2012



Sumber BPS Kutai Kartanegara, 2013

Jika migas dan batubara dikeluarkan dari penghitungan PDRB, PDRB riil perkapita masyarakat Kutai Kartanegara juga masih mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun kenaikannya cukup kecil yaitu sekitar 1,70% setiap tahunnya. Pada tahun 2000 PDRB per kapita riil sebesar Rp.9,48 juta per tahun dan di tahun 2012 naik menjadi Rp.11,42 juta per tahun.

E. Indeks Gini/Koefisien Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Caranya adalah dengan membagi penduduk menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Tabel 2.13
Perkiraan Persentase Pembagian Total Pendapatan Perkapita Dan Gini
Ratio Dengan Menggunakan Metode Desil

Distribusi Pembagian Pendapatan	2010	2011	2012
40% Rendah / <i>Lower</i>	20,62	21,17	21,45
40% Sedang / <i>Middle</i>	51,78	39,51	39,21
20% Tinggi / <i>Highest</i>	27,59	39,31	39,34
Rasio Pembagian Pendapatan Tinggi Terhadap Pendapatan Rendah	1,34	1,86	1,83
Gini Rasio	0,22	0,30	0,30

F. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

Bank Dunia menetapkan tingkat ketimpangan terbagi berdasarkan ketentuan: 1) digolongkan tinggi apabila penduduk kelompok rendah menerima lebih kecil dari 12% jumlah pendapatan; 2) Tingkat ketimpangan dikategorikan sedang, apabila penduduk kelompok rendah menerima antara 12-17% dari jumlah pendapatan; 3) Tingkat ketimpangan dikategorikan rendah, apabila penduduk kelompok rendah menerima lebih dari 17%. Berdasarkan Versi Bank Dunia, Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah, karena distribusi pembagian pendapatan dari tahun 2010 s/d 2012 menunjukkan bahwa kelompok penduduk pendapatan rendah menerima lebih dari 17%.

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

A. Pendidikan

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melaksanakan berbagai macam program dan kegiatan, salah satunya pada bidang pendidikan. Aspek kesejahteraan masyarakat pada bidang pendidikan tercermin pada beberapa indikator keberhasilan pembangunan, antara lain : angka melek huruf (AMH), angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan (APT).

Angka melek huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka melek huruf (AMH) digunakan sebagai beberapa indikator keberhasilan pembangunan daerah, antara lain :

1. mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan.
2. menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagaimedia.

3. menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Sehingga angkamelek huruf dapat berdasarkan kabupaten mencerminkan potensi perkembangan intelektualsekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Angka melek huruf (AMH) Kabupaten Kutai Kartanegarasudah sangat tinggi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.Pada tahun 2011 angka melek huruf telah mencapai angka sebesar 95,91%,artinya bahwa 96 orang diantara 100 penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara usia 15 tahun ke atas sudah dapat membaca dan menulis, atau hanya 4 orang diantara 100 penduduk yang masih tidak dapat membaca dan menulis.Pada tahun2013 AMH mengalami peningkatan menjadi sebesar 99,82%, yang artinya bahwa diantara 100 penduduk usia 15, hampir seluruhnya sudah dapat membaca dan menulis.

Tabel 2.14
Angka Melek Huruf dan Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara

INDIKATOR	2010	2011	2012	2013
Angka Melek Huruf		95,91	99,79	99,82
Lama Sekolah	8,33	8,70	8,76	

Lamanya Sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik. Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Ukuran ini mengatasi masalah kekurangan estimasi dari TPT yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu. Tetapi, jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi *kelebihan estimasi* atau bahkan terlalu rendah (*underestimate*).

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2010s/d 2012. Rata-rata lama sekolah tahun 2012 baru mencapai angka 8,76,hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata baru mencapai pendidikan kelas 2 SLTP. *Human capital* yang secara umum baru mencapai pendidikan SLTP ini menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara masih sulit untuk bersaing di tingkat regional maupun tingkat nasional.

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 2.15
Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Kutai Kartanegara

INDIKATOR	2010	2011	2012	2013
APM SD/MI	99,78	98,94	92,54	94,81
APM SLTP/MTs	95,54	82,13	68,80	87,58
APM SLTA		81,76	56,86	79,56
APK SD/MI	111,86	106,07	110,18	
APK SLTP/MTs	89,54	98,42	94,71	
APK SLTA	71,87	70,32	72,46	

Angka partisipasi murni Kabupaten Kutai Kartanegarasudah sangat tinggi dan tercatat sebesar 99,78untuk tingkat SD/MI,artinya bahwa setiap 100 penduduk terdapat 99 anakusia 7-12 tahun yang bersekolah di SD/MI. Kondisi ini cenderung menurun setiap tahun hingga pada tahun 2013 APM SD/MI menjadi 94,81. Pada jenjang SLTP/M.Ts APM pada tahun 2010 sebesar 95,54 dan cenderung turun sampai dengan tahun 2012 menjadi 87,58, tetapi pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 87,58.APM SLTA relatif lebih rendah dibanding dengan APM SD/MI dan APM SLTP/M.Ts dan pada tahun 2013 APM SLTA baru mencapai 79,56.

Angka partisipasi kasar adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di

tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan angka yang cukup tinggi, bahkan pada jenjang SD/MI dari tahun 2010 sampai dengan 2012 selalu berada di atas angka 100, hal ini berarti bahwa untuk jenjang SD/MI jumlah siswa yang sekolah melebihi jumlah penduduk usia sekolah SD/MI. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat siswa usia kurang dari 7 tahun dan melebihi 12 tahun yang masih bersekolah pada jenjang SD/MI. Nilai APK yang sangat tinggi pada semua jenjang sekolah tersebut mengindikasikan bahwa animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya sangat

Tabel 2.16
Tingkat Pendidikan Penduduk

PENDUDUK 10+TH YANG TAMAT SEKOLAH				
SD	%	32,66	32,54	29,47
SLTP	%	20,56	18,90	19,70
SLTA	%	22,02	25,86	25,32

Pendidikan penduduk merupakan cerminan dari kualitas sumber daya manusia atau produktivitas penduduk suatu daerah. Tingkat pendidikan penduduk juga menjadi gambaran tingkat kesejahteraan rakyat dilihat dari tinggi rendahnya pendidikan yang ditamatkan. Penduduk yang berumur 10 tahun ke atas tercatat 78,26% dari total penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2012. Penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah mencapai 1,75 persen. Sedangkan yang memiliki ijazah/STTB tertingginya SD/ sederajat masih merupakan yang dominan yaitu sebesar 29,47 persen, SLTP/MTs sebesar 19,70 persen, dan SMU/MA/SMK sebesar 25,32 persen. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penduduk yang menamatkan pendidikan SMU/MA/SMK mulai meningkat. Hal ini dapat dikarenakan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang lebih tinggi dan didukung oleh sarana dan prasarana yang sudah mulai memadai.

B. Kesehatan

Aspek kesejahteraan masyarakat pada bidang kesehatan tercermin pada beberapa indikator keberhasilan pembangunan, antara lain :Angka kematian bayi (AKB),Angka harapan hidup dan status gizi buruk balita.Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan

meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Ukuran mortalitas sebagai acuan untuk mengukur kemajuan pembangunan manusia adalah *infant mortality rate* (IMR) atau angka kematian bayi (AKB) dan *expectation of life at birth* (e_0) atau angka harapan hidup (AHH). Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan rata-rata umur penduduk mulai lahir sampai dengan akhir hidupnya. Besarnya nilai AHH berkaitan erat dengan angka kematian bayi, dimana semakin tinggi kematian bayi nilai AHH akan menurun. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi kematian bayi, juga berpengaruh terhadap besaran angka harapan hidup sejak lahir. Berikut adalah tabel angka harapan hidup dan angka kematian bayi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel. 2.17
Angka harapan hidup, angka kematian bayi dan balita pernah disusui ibunya
di Kabupaten Kutai Kartanegara

INDIKATOR	2010	2011	2012
1. Angka Harapan Hidup	67,93	68,05	68,17
2. Angka Kelahiran Total / TFR	2,6431	2,6740	2,7172
3. Angka Kematian Bayi / IMR	0,0362	0,0357	0,0351
4. Balita pernah disusui ibunya	88,52	95,10	92,85

Pada tahun 2010 angka harapan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 67,93 tahun, kemudian meningkat menjadi 68,05 tahun pada tahun 2011, dan terus meningkat kembali menjadi 68,17 pada tahun 2012. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2012 ternyata masih rendah bila dibandingkan dengan AHH Provinsi Kalimantan Timur (data terakhir tahun 2012 sebesar 71,58 tahun). Rendahnya nilai AHH di Kabupaten Kutai Kartanegara kemungkinan berkaitan erat dengan tingginya angka kematian bayi yang mencapai angka 0,0351 pada tahun 2012.

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan balita menurut umur sesuai dengan standar, maka anak disebut gizi baik, tetapi jika sedikit di bawah standar disebut gizi kurang dan jika jauh di bawah standar dikatakan gizi buruk. Kekurangan gizi pada anak yang pada umumnya disebabkan oleh kuantitas dan kualitas asupan makanan yang dikonsumsi dan tingkat kesehatan anak tersebut. Salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi gizi buruk adalah saat bayi hingga usia 2 tahun anak tidak cukup mendapat makanan bergizi seimbang seperti Air Susu Ibu (ASI).

Bila dilihat dari balita yang pernah disusui ibunya, pada tahun 2010 terdapat 88,52% balita yang pernah disusui ibunya, kemudian pada tahun 2011 kesadaran masyarakat akan pentingnya ASI mulai meningkat, dimana pada tahun tersebut persentase balita yang pernah diberi ASI sebesar 95,10%, namun kembali menurun menjadi hanya 92,85% di tahun 2012.

C. Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk:

- Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan;
- Membandingkan kemiskinan antar waktu, antar daerah;
- Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Beberapa pengertian terkait dengan kemiskinan antara lain:

- Kemiskinan relatif, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat subjektif.
- Kemiskinan absolut, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Untuk melihat penduduk miskin dunia, biasanya Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan US \$ 1 atau US \$ 2 per hari.
- Kemiskinan Struktural, yaitu kemiskinan karena lokasi yg terisolasi dan karena faktor kultural (karena faktor adat).

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis

kemiskinan bukan-makanan (GKBM). Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Tabel 2.18
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2010 – 2012

URAIAN	2010	2011	2012
Penduduk Miskin	54.724	47.332	47.100
Garis Kemiskinan	272.835	309.604	N/A
Persentase Penduduk Miskin	8,68	7,21	6,94

Sumber : BPS Kutai Kartanegara (2013)

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan garis kemiskinan (menggunakan Metode Engel) menunjukkan sedikit penurunan. Pada tahun 2010 persentase penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara sekitar 8,68 persen, kemudian turun menjadi sekitar 7,21 persen pada tahun 2011, dan terus mengalami penurunan pada tahun 2012 dengan jumlah penduduk miskin sekitar 6,94 persen.

Pada tahun 2005 melalui Tim Komite Penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan studi identifikasi penduduk miskin dan melakukan pendataan kemiskinan yang dimaksudkan untuk mendapatkan data kemiskinan yang bersifat operasional, agar dapat menjawab siapa dan dimana penduduk miskin berada. Metode pendataan yang dilakukan adalah pendataan dari rumah ke rumah pada populasi rumah tangga yang beresiko miskin. Kriteria/ indikator yang digunakan dalam pendataan terdiri atas 13 variabel. Adapun hasil pendataan mencatat jumlah penduduk miskin berjumlah 70.358 orang atau 13,25% penduduk miskin (19.231 rumah tangga miskin). Adanya penurunan persentase jumlah penduduk miskin pada beberapa tahun terakhir menandakan bahwa kesejahteraan penduduk mulai membaik.

Sementara itu, jumlah rumah tangga sasaran hasil PPLS 2011 menurut klasifikasi kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 2.902 rumah tangga Sangat Miskin (SM), 3.632 rumah tangga Miskin (M), 8.932 rumah tangga Hampir Miskin (HM) dan 18.382 rumah tangga Rentan Miskin Lainnya (RML).

Tabel 2.19
Jumlah Rumah Tangga Sasaran PPLS 2011 Menurut Klasifikasi
Kemiskinan dan Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara

KECAMATAN	SANGAT MISKIN	MISKIN	HAMPIR MISKIN	RENTAN MISKIN LAINNYA	TOTAL
Samboja	266	396	1.195	2.371	4.228
Muara Jawa	93	110	268	889	1.360
Sanga-Sanga	55	55	145	374	629
Loa Janan	172	232	541	1.064	2.009
Loa Kulu	185	163	384	611	1.343
Muara Muntai	26	37	76	111	250
Muara Wis	67	99	235	358	759
Kota Bangun	186	255	642	1.136	2.219
Tenggarong	138	172	556	1.713	2.579
Sebulu	132	184	555	1.365	2.236
Tenggarong Seberang	110	199	504	1.402	2.215
Anggana	390	429	812	1.216	2.847
Muara Badak	298	316	669	1.325	2.608
Marangkayu	294	328	780	1.528	2.930
Muara Kaman	250	335	910	1.893	3.388
Kenohan	90	107	229	355	781
Kembang Janggut	102	128	273	517	1.020
Tabang	48	87	158	154	447
JUMLAH	2.902	3.632	8.932	18.382	33.848

Sumber : BPS Kutai Kartanegara (2013)

D. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk Yang Bekerja)

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja.

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

Menurut Soemitro Djojohadikusumo, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif. Bisa juga disebut sumber daya manusia. Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap

jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang digunakan adalah = (1 - angka pengangguran).

Pada tahun 2012, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 64,53 persen dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,89 persen. Dengan demikian, Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) pada tahun 2012 sebesar 92,11 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2011, angka TPT di tahun 2012 mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2011, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,68 persen, sehingga Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 92,32 persen.

Tabel 2.20
Tabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

JENIS KELAMIN	2010		2011		2012	
	ANGKAT AN KERJA	TPAK (%)	ANGKAT AN KERJA	TPAK (%)	ANGKAT AN KERJA	TPAK (%)
Laki-laki / Male	201.446	86,88	215.239	90,65	221.902	88,68
Perempuan / Female	93.174	45,75	90.950	42,78	82.113	37,17
JUMLAH / TOTAL	294.620	67,65	306.189	68,04	304.015	64,53

Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2013

E. Kriminalitas (Angka Kriminalitas Yang Tertangani)

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Angka kriminalitas tahun 2012 jika dibandingkan dengan tahun 2011 terlihat menurun 2 kali lipat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kejahatan yang dilaporkan ke Polres Kutai Kartanegara. Tercatat jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan sebanyak 1.348 kasus (di tahun 2011) menjadi 695 kasus (di tahun 2012).

Tabel 2.21
Tabel Angka Krimininalitas

BULAN / MONTH	JUMLAH KRIMINAL	JUMLAH KASUS	ANGKA KRIMINALITAS (%)
1. Januari	56	33	8,95
2. Februari	85	53	13,58
3. Maret	77	51	12,30
4. April	72	38	11,50
5. Mei	65	43	10,38
6. Juni	48	28	7,67
7. Juli	51	32	8,15
8. Agustus	51	39	8,15
9. September	30	16	4,79
10. Oktober	58	34	9,27
11. Nopember	51	35	8,15
12. Desember	51	35	8,15
JUMLAH 2012	695	437	111,08
2011	1 348	754	55,93

Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2013

F. Seni Budaya dan olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 2 (dua) sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu (i) untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta (ii) mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Selanjutnya penyajian pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.22
Pencapaian Pembangunan Seni, Budaya dan Olahraga

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Klub olah raga	103
2.	Gedung olah raga	185
3.	Organisasi pemuda	315
4.	Organisasi olah raga	52
5.	Kegiatan kepemudaan	15
6.	Kegiatan olah raga	13
7.	Gelangang/balai remaja (selain miik swasta)	187
8.	Lapangan olah raga	1.341

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1. Pendidikan

A. Pendidikan Dasar

Angka Partisipasi Sekolah (APS), Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, Rasio guru/murid, APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah, sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Angka partisipasi sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah sangat tinggi dan tercatat sebesar 99,78 untuk tingkat SD/MI, artinya bahwa hanya 0,22% anak usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah di SD/MI. Kondisi ini cenderung menurun setiap tahun hingga pada tahun 2013 APS SD/MI menjadi 94,81. Pada jenjang SLTP/M.Ts APS pada tahun 2010 sebesar 95,54 dan cenderung turun sampai dengan tahun 2012 menjadi 87,58, tetapi pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 87,58. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mampu memenuhi kebutuhan pendidikan dasar bagi masyarakat, meskipun kemampuan tersebut cenderung menurun dari tahun ke tahun.

Tabel 2.23
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara

INDIKATOR	2010	2011	2012	2013
1. APS SD/MI	99,78	98,94	92,54	94,81
2. APS SLTP/MTs	95,54	82,13	68,80	87,58
3. Rasio Guru/Murid SD/MI	11,32	11,80	11,43	13
4. Rasio Guru/Murid SLTP/MTs	9,73	9,88	11,09	13
5. Rasio Ketersediaan Sekolah SD/MI	172	174	171	179
6. Rasio Ketersediaan Sekolah SLTP/MTs.	180	181	185	190

Rasio ketersediaan sekolah pendidikan dasar mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan dasar di Kabupaten Kutai

kartanegara cenderung meningkat dan pada tahun 2013 sebesar 179 di jenjang SD/MI dan 190 di tingkat SLTP/MTs. Sekolah yang dibangun untuk SD dan memiliki 6 ruang kelas (setiap ruang 40 siswa) dapat digunakan untuk menampung 240 siswa. Pada kenyataannya pada tahun 2013 penggunaan ruang kelas SD sebesar 179 atau mencapai 74,65% yang berarti belum didayagunakan secara maksimal. Bila SMP menggunakan tipe sekolah C yang memiliki 9 ruang kelas (setiap ruang 40 siswa) maka dapat digunakan untuk menampung 360 siswa. Pada kenyataannya penggunaan ruang kelas di SMP sebesar 190 atau mencapai 52,65% yang berarti belum didayagunakan secara maksimal.

Perbandingan atau rasio antara murid dan guru akan menggambarkan beban yang harus dihadapi seorang guru dalam mengajar. Tenaga pengajar di Kutai Kartanegara untuk semua jenjang pendidikan dasar masih belum memadai, tercatat rasio murid guru pada tingkat SD/ sederajat negeri dalam periode 2012 sekitar 13, artinya seorang guru pada tingkat SD/ sederajat dalam mengajar harus menghadapi 13 orang murid. Sedangkan pada tingkat SLTP/ sederajat negeri sekitar 13. Jika untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran yang baik digunakan standar SD sebesar 18 dan SMP sebesar 12, maka untuk SD sebesar 13 artinya rasio guru/murid masih belum mencapai standar atau masih kekurangan guru dan untuk SMP sebesar 13 berarti rasio guru/murid juga masih belum didayagunakan secara maksimal atau masih kekurangan guru

B. Pendidikan Menengah

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Angka Partisipasi Sekolah pendidikan menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2010-2013 cenderung mengalami penurunan dan pada tahun 2013 mencapai angka sebesar 79,56. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadinya kecenderungan penurunan kemampuan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memenuhi kebutuhan pendidikan menengah bagi masyarakat.

Tabel 2.24
Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

INDIKATOR	2010	2011	2012	2013
1. APS SLTA		81,76	56,86	79,56
2. Rasio Guru/Murid SLTA	10,03	9,86	10,98	13
3. Rasio Ketersediaan Sekolah SLTA	231	222	260	222

Rasio guru terhadap murid mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Rasio guru/murid SLTA di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2010-2013 cenderung menunjukkan peningkatan. Jika untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran yang baik digunakan standar rasio guru/murid SLTA sebesar 10, maka untuk rasio guru/murid SLTA pada tahun 2013 sebesar 13 menunjukkan bahwa telah didaya gunakan secara maksimal karena mencapai 100% atau kelebihan guru.

Rasio ketersediaan sekolah pendidikan menengah mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ketersediaan sekolah untuk pendidikan menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung menurun dan pada tahun 2013 sebesar 222. Bila Sekolah Menengah menggunakan 12 ruang kelas (setiap ruang 40 siswa) maka dapat menampung 480 siswa. Pada kenyataannya penggunaan ruang kelas Sekolah Menengah hanya sebesar 222 siswa atau mencapai 46,17% yang berarti belum didayagunakan secara maksimal. Dengan demikian, dari tiga jenjang pendidikan yang ada maka penggunaan ruang kelas yang paling baik adalah jenjang SD dan paling buruk adalah jenjang Sekolah Menengah.

2.1.3.1.2. Kesehatan

Pada dasarnya pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan murah. Dengan meningkatnya pelayanan kesehatan, pemerintah berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemeratakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan penyediaan sarana kesehatan terutama puskesmas dan puskesmas pembantu karena kedua fasilitas tersebut dapat menjangkau segala lapisan masyarakat hingga ke daerah terpencil.

Penyediaan sarana kesehatan yang memadai merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam upaya meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, dan program ini terus ditingkatkan kualitas pelayanan serta keberadaannya. Sarana kesehatan yang dimaksud berupa rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik berikut pembinaan dan penambahan tenaga kesehatan yang memadai. Di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2012 terdapat dua rumah sakit yang berlokasi masing-masing di Kecamatan Tenggarong (RSUD AM. Parikesit) dan Kecamatan Samboja (RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti).

Sementara sarana kesehatan di kecamatan (Puskesmas) telah tersedia di setiap kecamatan dengan jumlah seluruhnya 30 buah. Jumlah puskesmas terbanyak di kecamatan Samboja, Loa Janan dan Tenggarong masing-masing mempunyai 3 buah. Selain itu, di kabupaten Kutai Kartanegara telah menyediakan juga puskesmas pembantu sebanyak 170 buah.

Tabel 2.25
Sementara Sarana Kesehatan di Kecamatan (*Puskesmas*)

KECAMATAN	PUSKESMAS	PUSKESMAS PEMBANTU/	DOKTER PUSKESMAS	DOKTER GIGI
1. Samboja	3	15	10	2
2. Muara Jawa	1	8	3	1
3. Sanga-Sanga	1	5	2	2
4. Loa Janan	3	5	11	5
5. Loa Kulu	1	13	5	1
6. Muara Muntai	1	7	2	1
7. Muara Wis	1	5	1	-
8. Kota Bangun	2	9	5	1
9. Tenggarong	3	12	18	5
10. Sebulu	2	10	8	3
11. Tenggarong Seberang	2	13	8	5
12. Anggana	1	10	4	2
13. Muara Badak	2	14	8	4
14. Marang Kayu	2	8	5	3
15. Muara Kaman	1	18	4	-
16. Kenohan	1	6	3	2
17. Kembang Janggut	1	10	4	2
18. Tabang	2	2	3	4
JUMLAH 2012	30	170	104	43
TOTAL 2011	30	170	98	40

Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2013

2.1.3.1.2. Lingkungan Hidup

A. Persentase Penanganan Sampah

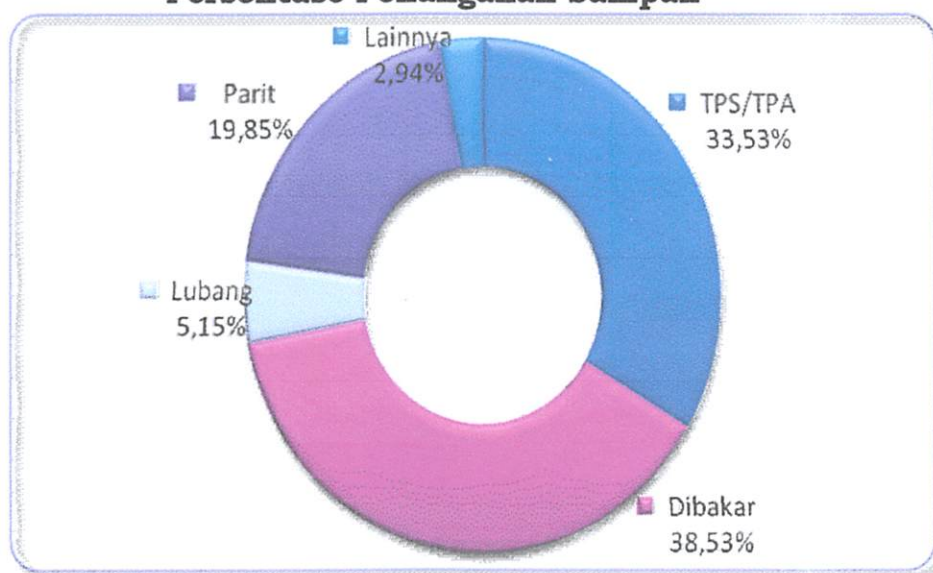
Berdasarkan Suseda 2013, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Kutai Kartanegara rata-rata menghasilkan sampah dalam sehari sebanyak 1 kg, yaitu sekitar 60% rumah tangga. Selain itu 25% rumah tangga lainnya menghasilkan sampah rata-rata sekitar 2 kg perhari. Sedangkan 15% sisanya menghasilkan sampah 3 kg atau lebih setiap harinya. Produksi sampah dan volume sampah yang dapat ditangani dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.26
**Produksi Sampah Dan Volume Sampah Yang Dapat Ditangani
Di Kabupaten Kutai Kartanegara**

INDIKATOR	2010	2011	2012	2013
1. Volume sampah yang ditangani (m3)			140	43.079
2. Volume produksi sampah (m3)			264,5	48.946
3. Penanganan sampah (%)			52,93	88,01

Sementara itu jika dilihat menurut tempat pembuangan sampahnya, sebanyak 38,53% rumah tangga membuang sampahnya dengan cara dibakar. Disamping itu yang membuang sampah langsung ke Tempat Pembuangan Sementara/Tempat Pembuangan Akhir sebanyak 33,53%. Sementara yang membuang ke parit sekitar 19,85%, ke lubang 5,15%, dan lainnya sebanyak 2,94%.

Gambar 2.10
Persentase Penanganan Sampah



B. Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum

Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya *Escherichia coli*) atau zat-zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini.

Kualitas air minum bagi anggota rumah tangga sangat dipengaruhi oleh sumber air minum bagi rumah tangga. Yang terpenting tentang sumber air untuk masyarakat adalah kualitasnya, penggunaan air yang bersih akan dapat mempengaruhi derajat kesehatan penduduk. Karena air yang kotor akan dapat menyebabkan dan menularkan berbagai penyakit. Oleh sebab itu, besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih akan dapat menunjukkan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber air bersih diantaranya adalah air dalam kemasan, air isi ulang, air leding, pompa, mata air terlindung dan sumur terlindung. Dengan melihat sumber air minum ini akan dapat menggambarkan tingkat kesehatan rumah tangga/masyarakat suatu daerah.

Tabel 2.27
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih Di Kabupaten Kutai Kartanegara

SUMBER AIR BERSIH	2010	2011	2012	2013
1. Leding (perpipaan)	22,79	23,51	23,87	16,47
2. Leding eceran				1,47
3. Sumur Lindung	10,26	5,44	2,40	4,12
4. Sumur Tidak Terlindung	5,78	11,17	1,35	7,50
5. Mata Air Terlindung	2,57	0,44	2,85	3,38
6. Mata Air Tidak Terlindung	0,00	0,94	1,35	1,32
7. Sungai	8,05	8,05	6,31	4,41
8. Sumur Bor/pompa	5,44	3,05	3,30	2,50
9. Air Hujan	2,00	0,29	0,3	0,59
10. Air Kemasan	42,66	48,18	57,96	56,03
11. Air Kemasan bermerk				2,21
12. Lainnya	0,00	0,00	0,3	0,00
13. Jumlah	100,00	100,00	100,00	
12. Jumlah Rumah Tangga	157.230	163.964	166.349	
14. Rumah Tangga pengguna air bersih				

Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2013

Kesadaran masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara akan pentingnya air bersih sudah sangat tinggi, hal ini dapat terlihat dari banyaknya rumah tangga yang menggunakan air isi ulang (56,03%) sebagai air minum. Leding meteran mengambil porsi sebesar 16,47%. Selain itu, rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang berasal dari sumur tak terlindung sebesar 7,50%. Sedangkan selebihnya rumah tangga menggunakan sumber air minum yang lain dimana masing-masing hanya digunakan kurang dari 5% rumah tangga.

C. Pesentase Rumah Layak Huni

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Persentase Luas Permukiman yang Tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan.

Tabel 2.28
Persentase Rumah Layak Huni Di Kabupaten Kutai Kartanegara

INDIKATOR	2010	2011	2012	2013
1. Jumlah Rumah Layak Huni			52.138	153.245
2. Jumlah Seluruh Rumah Di Wilayah Pemerintah Daerah Yang Bersangkutan			135.747	175.949
3. Persentase Rumah Layak Huni			38,41	87,1

2.1.3.1.2. Sarana dan Prasarana Umum

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Kinerja jaringan jalan sebagai hasil dari manajemen pengelolaan didasarkan kepada beberapa indikator makro yaitu : kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan, kinerja jaringan jalan berdasarkan kondisi dan kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek pemanfaatan.

Kinerja jaringan jalan berdasarkan aspek kemantapan adalah merupakan kinerja gabungan dari aspek kondisi dan aspek pemanfaatan/kapasitas. Kinerja jaringan jalan dinyatakan sebagai Mantap Sempurna, Mantap Marginal dan Tidak Mantap, dimana hal tersebut lebih merupakan definisi secara kualitatif. Untuk keperluan teknis operasional diperlukan suatu definisi atau batasan/kriteria teknis (*"engineering criteria"*) yang lebih jelas dan bersifat kuantitatif. Kinerja jaringan jalan berdasarkan kemantapan dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu :

- Mantap Sempurna, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik dan lebarnya memenuhi ketentuan lebar minimum perkerasan (berdasarkan LHR yang ada), atau semua ruas jalan yang mantap baik dari aspek kondisi maupun aspek pemanfaatan/kapasitas.
- Mantap Marginal, adalah semua ruas jalan dengan kondisi sedang sampai baik tetapi lebarnya kurang dari ketentuan berdasarkan jumlah LHR yang ada, atau sebaliknya yaitu jalan dengan lebar yang cukup tetapi kondisi rusak sampai rusak berat. Dapat dikatakan juga sebagai semua ruas jalan yang mantap dari aspek kondisi tetapi tidak mantap dari aspek pemanfaatan/ kapasitas atau sebaliknya.
- Tidak Mantap, adalah semua ruas jalan baik secara kondisi maupun kapasitas tidak mantap.

Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase tingkat kerusakan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kondisi Baik (B) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis, sehingga arus lalu - lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan disain dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan.
- Kondisi Sedang (S) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi sedang

menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 6% s/d 10%). Kerusakan yang ada belum (atau sedikit saja) menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu – lintas.

- Kondisi Sedang Rusak (SR) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalandan saluran samping dalam kondisi sedang menuju rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 10% s/d 16%). Kerusakan yang ada mulai menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus pergerakan lalu – lintas, sehingga kendaraan harus mengurangi kecepatannya.
- Kondisi Rusak (R) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi rusak menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan 16% s/d 20%). Kerusakan yang ada sudah sangat menghambat kelancaran arus pergerakan lalu - lintas, sehingga kendaraan harus berjalan secara perlahan - lahan, mengurangi kecepatannya, kadangkala harus berhenti akibat adanya kerusakan atau hambatan pada permukaan perkerasan.
- Kondisi Rusak Berat (RB) adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalandan saluran samping dalam kondisi rusak berat menurut kriteria teknis (tingkat kerusakan > 20%). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan nyaris tidak dapat lagi dilewati oleh kendaraan roda – 4, atau hanya dapat dilewati dengan kecepatan sangat rendah.

Kinerja jaringan jalandi Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan kondisinya dapat dilihat pada tabel 2.29 berikut :

Tabel 2.29
Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Di Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	KONDISI JALAN	PANJANG JALAN (KM)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Kondisi Baik	247,65	349,43	259,80	294,35	636,280
2	Kondisi Rusak Sedang	313,81	295,20	327,70	397,99	393,718
3	Kondisi Rusak	148,57	128,09	167,35	232,67	682,841
4	Kondisi Rusak Berat	655,84	775,19	792,27	639,38	566,917
JUMLAH		1.525,39	1.547,91	1.547,12	1.564,39	2.279,756

Jaringan jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013 ditinjau menurut kondisi jalan menunjukkan kinerja yang lebih baik (meningkat) dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat panjang jalan kondisi Baik pada tahun 2013 mencapai 636,28 km atau meningkat 715,37 km dari tahun 2012 yang hanya mencapai 294,35 km. Namun secara persentase kondisi

jalan Baik dari total panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 masih relatif kecil yakni 27,91%.

Tabel 2.30
Jaringan Jalan Di Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara

TAHUN	PANJANG JALAN BAIK (KM)	PANJANG JALAN KESELURUHAN (KM)	PROPORSI (RASIO)
2009	274,65	1.525,39	0,180
2010	349,43	1.547,91	0,226
2011	259,80	1.547,12	0,168
2012	294,35	1.564,39	0,188
2013	636,28	2.279,756	0,2791

Yang menjadi perhatian pemerintah daerah hingga saat ini adalah jaringan jalan dengan kondisi berat, dimana hingga tahun 2013 masih menyisakan sepanjang 566,91 km atau 24,87% dari total panjang jalan di Kutai Kartanegara. Kondisi ini salah satunya dipengaruhi oleh kondisi (situasi) kultur tanah maupun topografi di Kutai Kartanegara yang beragam, seperti melalui jalur sungai, gunung batu, dan lainnya.

B. Rasio Jaringan Irigasi

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap.

Didalam pengelolaan jaringan irigasi, tolok ukur keberhasilan pengelolaan adalah efisiensi dan efektifitas. Dalam hal ini efisiensi teknis diukur dari tiga indikator yaitu Pasok Irigasi per Area (PIA), Pasok Irigasi Relatif (PIR) dan Pasok Air Relatif (PAR). Sedangkan efektivitas ditunjukkan oleh indeks luas areal (IA).

Semakin kecil nilai PIA, PIR dan PAR, maka pengelolaan irigasi semakin efisien. Efisiensi pengelolaan jaringan irigasi ditunjukkan oleh nilai koefisien PIA, PIR dan PAR. PIA menunjukkan nisbah antara pasok irigasi dengan luas

lahan terairi, dalam hal ini semakin kecil nilai PIA maka efisiensi manajemen akan semakin besar. Sementara itu PIR atau disebut juga *Relative Irrigation Supply (RIS)* menunjukkan nisbah antara pasok irigasi total dengan kebutuhan air tanaman, dan PAR atau *Relative Water Supply (RWS)* merupakan nisbah total pasok air (irigasi ditambah curah hujan efektif) terhadap kebutuhan air tanaman. PIR dan PAR biasa juga dipakai untuk mengukur kemampuan masyarakat mengelola sumberdaya air dalam kegiatan suatu sistem irigasi. Selisih antara PAR dan PIR merupakan curah hujan yang dapat digunakan tanaman. Apabila curah hujan tinggi dan nilai PIR juga tinggi maka fenomena ini menunjukkan bahwa petani belum mampu untuk mengelola sumberdaya secara sepadan. Semakin kecil nilai PIR dan PAR menunjukkan bahwa efisiensi manajemen irigasi semakin bagus.

Efektifitas pengelolaan jaringan irigasi ditunjukkan oleh nisbah antara luas areal terairi terhadap luas rancangan. Dalam hal ini semakin tinggi nisbah tersebut semakin efektif pengelolaan jaringan irigasi. Dengan pemahaman seperti itu, di lapangan diidentifikasi rasio atau nisbah luas areal terairi terhadap rancangan luas areal mencapai 91% (0,91). Artinya dari seluruh target areal yang akan diairi hanya ada sekitar 9% saja yang tidak terairi. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (89%), efektifitas pengelolaan air ini mengalami peningkatan sekitar 2%.

Tabel 2.31
Efektifitas Pengelolaan Jaringan Irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara

NO.	KECAMATAN	2012	2013
1	Anggana	11007	11.007,00
2	Loa Kulu	54.212,00	54.212,00
3	Muara Jawa	853,00	853,00
4	Loa Janan	8.741,46	8.741,46
5	Marang Kayu	1.4710,30	14.710,30
6	Muara Badak	1.707,40	1.707,40
7	Tenggarong	2.9238,00	29.238,00
8	Tenggarong Seberang	161.290,90	90.203,00
9	Samboja	46657,8	46.657,80
10	Sanga-Sanga	1377	1.377,00
11.	Muara Muntai		3.276,73
12.	Kota Bangun		178.702,69
13.	Muara Wis		20.267,65
14.	Sebulu		60.264,35
15.	Muara Kaman		42.119,81
16.	Kenohan		7.077,71
17.	Kembang Janggut		8.135,14
18.	Tabang		6.334,33
TOTAL PANJANG IRIGASI		329.794,86	484.885,36
LUAS AREA IRIGASI (HA)			20.287,99

Jaringan irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013 menunjukkan kinerja yang lebih baik (meningkat) dari tahun-tahun

sebelumnya. Hal ini dapat dilihat total panjang irigasi pada tahun 2013 mencapai 484.885,36 km atau meningkat 155.090,50 km dari tahun 2012 yang hanya mencapai 329.794,86 km. Panjang irigasi tersebut mampu mengairi lahan seluas 20.287,99 ha.

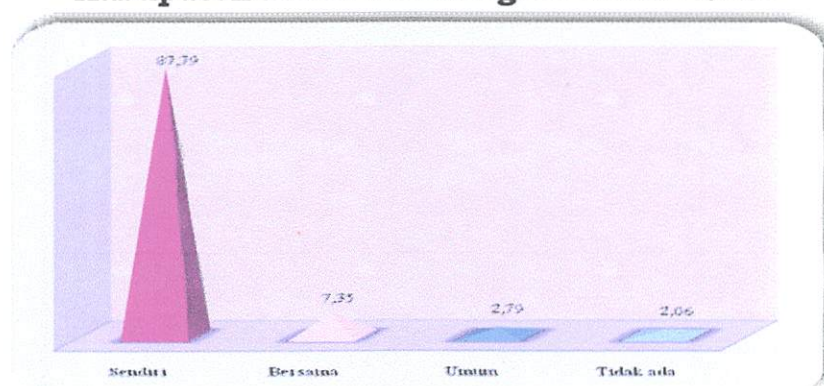
C. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Perumahan merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia selain makanan dan pakaian. Rumah dalam kehidupan manusia berfungsi sebagai tempat tinggal yang diperlukan manusia untuk memasyarakatkan diri. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, maka kebutuhan akan perumahan juga akan meningkat. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut:

- Fasilitas Air bersih
- Pembuangan Tinja
- Pembuangan air limbah (air bekas)
- Pembuangan sampah

Salah satu pertimbangan dalam memilih rumah tinggal adalah tersedianya fasilitas sanitasi seperti tempat buang air besar. Rumah tangga akan cenderung memilih tempat tinggal yang memiliki tempat buang air besar sendiri dengan alasan bahwa fasilitas milik sendiri bisa lebih terjaga kebersihannya. Jika dilihat dari penggunaan fasilitas tempat pembuangan air besar, maka terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 telah mempunyai fasilitas tempat pembuangan air besar sendiri, yaitu mencapai 87,79 persen. Sedangkan persentase rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar secara bersama sebesar 7,35 persen, yang menggunakan fasilitas buang air besar umum sebesar 2,79 persen dan yang tidak menggunakan tempat pembuangan air besar sebesar 2,06 persen.

Gambar 2.11.
Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013



2.1.3.1.2. Penataan Ruang

A. Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yangditetapkan dengan kriteria:

- Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
- berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- didominasi komunitas tumbuhan.

Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tamping lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Tabel 2.32
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

INDIKATOR	2010	2011	2012	2013
1. Luas ruang terbuka hijau			1.504,16	1.504,16
2. Luas wilayah ber HPL/HGB			5.003,00	5.003,00
3. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB			0.30	0,30

B. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Tabel 2.33
Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

INDIKATOR	2010	2011	2012	2013
1. Jumlah rumah ber IMB sd. akhir Tahun				2.849
2. Jumlah seluruh rumah sd. akhir Tahun				242.820
3. Rasio Rumah ber IMB				0,0117

2.1.3.1.2. Perhubungan

A. Rasio Ijin Trayek

Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas:

- jaringan trayek lintas batas negara;
- jaringan trayek antarkota antarprovinsi;
- jaringan trayek antarkota dalam provinsi;
- jaringan trayek perkotaan; dan
- jaringan trayek perdesaan.

Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Ijin trayek kendaraan angkutan umum di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2012 sebanyak 346 ijin, yang terdiri dari 215 ijin trayek perkotaan dan 131 ijin trayek pedesaan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 676.464 pada tahun 2012, maka rasio ijin trayek perpenduduk sebesar 0,001, yang artinya setiap ijin trayek akan melayani 1000 penduduk.

Tabel 2.34
Ijin Trayek Kendaraan Angkutan Umum Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012

U R A I A N	2012
Izin Trayek Perkotaan	215
Izin Trayek Perdesaan	131
Jumlah Ijin Trayek	346
Jumlah Penduduk	676.464
Rasio Ijin Trayek	0,001

B. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi:

- uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumahrumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Sejak tahun 2010 jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR secara keseluruhan mengalami peningkatan. Pada tahun 1020, jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR sebanyak 8759 kendaraan, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 1,61 % menjadi 8900 kendaraan. Pada tahun 2012, terjadi kenaikan sebesar 10,81 % dari tahun sebelumnya menjadi 9.862 kendaraan. Uji KIR pada masing-masing tahun masih didominasi oleh mobil barang, dimana pada tahun 2012 persentase kendaraan yang melakukan uji KIR sebanyak 8.990 atau mencapai 91,16 % dari total kendaraan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.35
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2010-2012

NO.	ANGKUTAN UMUM	2010	2011	2012
1	Mobil Penumpang Umum	192	460	318
2	Mobil Bus	270	786	554
3	Mobil Barang	8.297	7.654	8.990
4	Kereta Tempelan	-	-	-
JUMLAH		8.759	8.900	9.862

C. Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Pada tahun 2012, jumlah orang yang terangkut angkutan umum melalui dermaga dan terminal pertahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 jumlah orang yang melalui dermaga hanya mencapai 112.440 orang. Kondisi ini meningkat pada tahun 2011 menjadi 217.946 orang dan menurun lagi pada tahun berikutnya menjadi hanya 140.505 orang. Sedangkan untuk barang selalu mengalami peningkatan mulai dari 16.886 ton pada 2010, menjadi 286.996 ton pada tahun 2011 dan akhirnya mencapai 350.141 ton pada tahun 2012.

Tabel 2.36
Jumlah Orang Dan Barang Yang Terangkut Angkutan Umum Melalui Dermaga Dan Terminal Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 - 2012

URAIAN	2010		2011		2012	
	ORANG	BARANG (TON)	ORANG	BARANG (TON)	ORANG	BARANG (TON)
Dermaga	112.440	16.886	217.946	286.996	140.505	350.141
Terminal	-	-	-	-	17.865	-
JUMLAH	112.440	16.886	217.946	286.996	158.370	350.141

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1. Penanaman Modal

A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwapemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskalanasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah danpada suatu periode tahun pengamatan. Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayananpenunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing (PMA) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang

dilakukan oleh penanam modal asing, baik dengan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal asing.

Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan. Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah.

Tabel 2.37
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2007 – 2012

TAHUN	PMDN	PMA	JUMLAH
2007	4	22	26
2008	2	50	52
2009	4	25	29
2010	3	38	41
2011	4	54	58
2012	4	18	22

B. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai proyek yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

Semakin banyak nilai realisasi investasi maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Jumlah proyek dan nilai investasi PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah proyek dan nilai investasi PMDN dan PMA yang telah disetujui oleh Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Sedangkan realisasi jumlah proyek dan nilai investasi PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan jumlah proyek dan nilai investasi PMDN dan PMA yang dihitung dari total proyek dan nilai investasi PMDN dan PMA yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan.

Tabel 2.38
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2007 – 2012

TAHUN	PERSETUJUAN		REALISASI	
	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI (JUTA Rp.)	JUMLAH PROYEK	NILAI INVESTASI (JUTA Rp.)
2007	26	1.094.197,51	4	40.703,07
2008	52	597.812,20	7	231.413,90
2009	29	4.227.377,05	6	2.876.393,87
2010	41	2.661.773,00	17	2.047.218,30
2011	58	11.712.448,00	8	5.713.669,56
2012	22	3.010.256,00	14	8.249.804,76

Semakin banyak nilai realisasi investasi maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

C. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi PMA/PMDN yang terealisasi pada suatu tahun. Jumlah seluruh PMA/PMDN dihitung dari banyaknya proyek investasi yang terealisasi di daerah pada suatu tahun berdasarkan data BKPM.

Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA dan PMDN akan mencerminkan besarnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah.

Tabel 2.39
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2007 - 2012
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	282	273	724	10.624	7.193	9.906
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	4	7	6	17	8	14
3	Rasio daya serap tenaga kerja	70,50	39,00	120,67	624,94	899,13	707,57

Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA dan PMDN akan mencerminkan besarnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja.

2.1.3.2.1. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

A. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.

Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Adanya dukungan pemerintah dan koordinasi yang baik antar berbagai elemen terkait, maka perkoperasian di Kutai Kertanegara cukup meningkat selama 4 tahaun terakhirt. Jumlah koperasi aktif meningkat menjadi 447 pada tahun 2012 dari 399 tahun 2011. Tetapi sayang pada tahun 2013 jumlah koperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara turun menjadi 305 koperasi.

Tabel 2.40
Perkembangan Jumlah Koperasi di Kutai Kertanegara

KOPERASI	2010	2011	2012	2013
Jumlah Koperasi Aktif	237	399	447	305
Jumlah Koperasi Tidak Aktif	375	231	110	252
Jumlah Koperasi	612	630	557	557
Persentase koperasi aktif	38,73	63,33	80,25	52, 68

B. Jumlah UKM non BPR/LKMUUKM

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

Tabel 2.41
Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2012

NO	RINCIAN	JUMLAH USAHA	JUMLAH TENAGA	NILAI PRODUKSI
1. Industri Pangan / Agro				
a.	Industri Tahu dan Tempe	73	217	1.753.100.00
b.	Industri Keripik Buah	1	2	10.000.000
c.	Industri Kerupuk	96	212	2.234.000.00
d.	Industri Kue Kering	139	226	1.858.700.00
e.	Industri Lada Sortir	-	-	-
f.	Industri Ikan Asin	10	49	264.000.000
g.	Industri Susu Kedelai	4	8	86.000.000
h.	Industri Selai/Dodol	-	-	-
i.	Industri Udang Beku	1	480	1.536.635
j.	Industri Air Minum	131	144	4.318.000.00
k.	Industri VCO	-	-	-
2. Industri Sandang				
a.	Industri Tenun Ulap	1	4	25.000.000
b.	Industri Badong Tancep	1	3	20.000.000
c.	Industri Penjahitan	71	180	2.304.000.00
d.	Industri Batik Motif Kutai	-	-	-
e.	Kerajinan Bordir	-	-	-
3. Industri Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut				
a.	Industri Pandai Besi	7	17	132.000.000
b.	Industri Bengkel Sepeda Motor	184	284	11.010.000.0
c.	Industri Bengkel Las	11	38	893.000.000
d.	Industri Galangan Kapal	8	147	9.900.000.00
e.	Industri Tandon Air	1	30	125.500.000
4. Industri Kimia dan Bahan Bangunan				
a.	Industri Moulding	41	160	6.034.000.00
b.	Industri Percetakan	5	12	435.000.000
c.	Industri Meubel/Korsen	51	179	6.388.000.00
d.	Industri Gas	-	-	-
e.	Industri Genteng dari Semen	-	-	-
f.	Industri Briket Batu Bara	-	-	-
g.	Industri Barang dari Logam	-	-	-
h.	Industri Batu Bata/Batako	45	258	3.097.000.00
i.	Industri Atap Nipah	12	13	97.000.000

NO	RINCIAN	JUMLAH USAHA	JUMLAH TENAGA	NILAI PRODUKSI
5. Industri Kimia dan Bahan Bangunan				
a.	Industri Manik	13	67	295.500.000
b.	Industri Ukiran Kayu	2	8	80.000.000
c.	Industri Manon	-	-	-
d.	Industri Souvenir	4	16	102.000.000
e.	Industri Pembuatan Kopiah	2	6	30.000.000
f.	Industri Rotan	-	-	-
g.	Industri Tikar Purun	-	-	-
h.	Industri Sulam	-	-	-
i.	Industri Bambu	-	-	-

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah beradadan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai berikut:

2.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per

jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan sebagainya.

Tabel 2.42
Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Menurut Daerah Kota dan Pedesaan,
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008-2012

U R A I A N	2010		2011		2012	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
1. Kota						
a. Makanan	372 746	51,25	401 231	48,82	502 602	47,01
b. Bukan Makanan	354 515	48,75	420 567	51,18	566 539	52,99
c. Jumlah	727 261	100,00	821 798	100,00	1 069 141	100,00
2. Pedesaan						
a. Makanan	331 440	53,22	333 741	53,96	416 483	53,76
b. Bukan Makanan	291 388	46,78	284 736	46,04	358 194	46,24
c. Jumlah	622 828	100,00	618 477	100,00	774 677	100,00
3. Kota + Pedesaan						
a. Makanan	344 910	52,51	355 774	51,95	443 458	51,15
b. Bukan Makanan	311 975	47,49	329 080	48,05	423 454	48,85
c. Jumlah	656 885	100,00	684 854	100,00	866 912	100,00

Di tahun 2012 ini, sebagian besar pengeluaran penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara digunakan untuk memenuhi kebutuhan *makanan* daripada *non makanan* (perumahan, sandang, aneka barang dan jasa, dan lain-lain). Hal ini sama dengan kondisi tahun 2011 yaitu pengeluaran untuk kebutuhan *makanan* lebih besar daripada *non makanan*. Hal ini dapat dilihat dari persentase pengeluaran penduduk bulanan.Mereka menghabiskan 51,15 persen dari pengeluarannya untuk *makanan*, dan 48,85 persen untuk *non makanan*. Sedangkan pada tahun 2011, pengeluaran untuk kebutuhan *makanan* sebesar 51,95 persen dan pengeluaran *non makanan* sebesar 48,05 persen.

Berdasarkan tipe daerah, secara umum tingkat pengeluaran penduduk *perkotaan* jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk *pedesaan*. Di perkotaan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan sebesar Rp.1.069.141,- sedangkan di pedesaan sekitar Rp. 774.677,-. Sementara rata-rata total pengeluaran secara total di *perkotaan* dan *pedesaan* per kapita sebulan mencapai Rp. 866.912,-

2.1.4.1.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkatkesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yangdihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk prosesproduksi (usaha) maupun

untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani.

Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani.

Tabel 2.43
Nilai Tukar Petani (NTP)
Kabupaten Kutai Kartanegara 2009 s.d 2013

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Indeks yang diterima petani (It)	114,42	121,69	126,42	1.378.225	
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	110,24	114,01	116,81	1.222.267	
3.	NTP	104,03	106,73	108,22	112,76	

Nilai tukar petani Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun dan nilai NTP-nya selalu di atas 100. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli petani Kabupaten Kutai Kartanegara selalu meningkat dari tahun ke tahun.

2.1.4.1.2. Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor.

Tabel 2.44
Produktivitas Total Daerah

SEKTOR	2010		2011		2012	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1. Pertanian	6.444.519	21,87	7.649.525	24,98	8.518.245	28,02
2. Pertambangan dan Penggalian	84.313.364	286,18	105.878.887	345,80	110.901.152	364,79
3. Industri Pengolahan	1.260.109	4,28	1.475.424	4,82	1.532.875	5,04
4. Listrik, Gas dan air bersih	50.474	0,17	59.684	0,19	75.474	0,25
5. Konstruksi	3.175.242	10,78	3.585.481	11,71	4.275.155	14,06
6. Perdagangan, hotel dan restoran	2.823.709	9,58	3.381.785	11,04	3.726.334	12,26
7. Pengangkutan dan Komunikasi	425.072	1,44	477.593	1,56	546.457	1,80
8. Keuangan, sewa, & Js. Perusahaan	375.106	1,27	459.479	1,50	550.534	1,81
9. Jasa-jasa	1.597.455	5,42	1.807.073	5,90	1.969.746	6,48
10. PDRB Dengan Migas	100.465.05	341	124.774.93		132.095.97	

SEKTOR	2010		2011		2012	
	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
	0		1		2	
11. Angkatan Kerja	294.620		306.189		304.015	

2.1.4.1.3. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

2.1.5. Aksesabilitas Daerah

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah dapat dihitung dengan :

A. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Tabel 2.45
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

TAHUN	PANJANG JALAN (Km)	JUMLAH KENDARAAN	PROPORSI (Rasio)
2009	1.525,39	27.081	0,0563
2010	1.547,91	30.809	0,0502
2011	1.547,12	30.809	0,0502
2012	1.564,39	34.845	0,0449

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin menurun, artinya bahwa pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak sebanding dengan pertumbuhan jalan, sehingga di masa depan lalu lintas kendaraan akan semakin bertambah.

B. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Melalui Dermaga Per Tahun

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 3 (tiga) buah sungai besar, sungai Mahakam adalah yang terbesar dengan panjang sekitar 920 Km yang membentang dari wilayah pantai hingga pedalaman dan terbelah menjadi beberapa anak sungai besar seperti, sungai Kedang Kepala dan Belayan yang hanya dapat dilalui kapal motor yang berukuran kecil sampai sedang. Beberapa Kecamatan dapat dijangkau melalui sungai tersebut dan terdapat

pelabuhan/dermaga disetiap kecamatan hanya berukuran kecil. Dalam menghubungkan antara Kota Tenggarong sebagai Ibukota Kabupaten menuju Kecamatan dapat ditempuh melalui jalur transportasi sungai dengan beberapa jenis kapal, Speed Boad, Perahu panjang (long boad) dan perahu motor berukuran kecil (ces). Untuk penumpang pengguna jasa transportasi sungai dapat menggunakan kapal setiap hari dari Ibukota Kecamatan melalui Tenggarong menuju Kota Samarinda dan sebaliknya. Aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sungai di Kabupaten tercermin dari jumlah orang/barang yang terangkut melalui dermaga untuk setiap tahunnya sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.46

Orang/Barang Yang Terangkut Melalui Dermaga Per Tahun

TAHUN	PENUMPANG	BARANG (Ton)
2010	112.364	16.887
2011	217.883	290.717
2012	79.136	180.971

2.1.6. Penataan Wilayah

Rencana Tata Rang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara baru saja di perdakan dikarenakan adanya verifikasi dokumen Padu serasi dengan RTRW Propinsi, sehingga belum dilaksanakan evaluasi untuk menganasila prosentase ketaatan pelaksanaan pembangunan terhadap dokumen RTRW tersebut.

Luas lahan produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2008 – 2012 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.47

Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2008 s.d 2012

Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012
1	Luas Wilayah Produktif	780.246,00	799.208,00	810.211,00	792.622,00	811.963,00
2	Luas Seluruh Wilayah	2.726.310,00	2.726.310,00	2.726.310,00	2.726.310,00	2.726.310,00
3	Rasio (1/2)	0,29	0,29	0,30	0,29	0,30

Sumber : Dinas Bina Marga Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 2.48
Persentase Luas Wilayah Produktif Tahun 2008 s.d 2012 Menurut Kecamatan

NO	KECAMATAN	2008			2009			2010			2011			2012			2013		
		LUAS WILAYAH PRODUKTIF (A)	LUAS SELURUH WILAYAH (B)	RASIO A/B	LUAS WILAYAH PRODUKTIF (A)	LUAS SELURUH WILAYAH (B)	RASIO A/B	LUAS WILAYAH PRODUKTIF (A)	LUAS SELURUH WILAYAH (B)	RASIO A/B	LUAS WILAYAH PRODUKTIF (A)	LUAS SELURUH WILAYAH (B)	RASIO A/B	LUAS WILAYAH PRODUKTIF (A)	LUAS SELURUH WILAYAH (B)	RASIO A/B	LUAS WILAYAH PRODUKTIF (A)	LUAS SELURUH WILAYAH (B)	RASIO A/B
1	Samboja	26.718	104.59	0.26	26.607	104.59	0.25	26.577	104.59	0.25	26.577	104.59	0.25	26.615	104.59	0.25		104.59	
2	Muara Jawa	23.143	75.45	0.31	23.569	75.45	0.31	36.673	75.45	0.49	23.569	75.45	0.31	24.513	75.45	0.32		75.45	
3	Sanga sanga	9.042	23.34	0.39	9.042	23.34	0.39	9.042	23.34	0.39	9.042	23.34	0.39	9.042	23.34	0.39		23.34	
4	Loa Janan	15.792	64.42	0.25	15.792	64.42	0.25	15.792	64.42	0.25	15.792	64.42	0.25	15.792	64.42	0.25		64.42	
5	Loa Kulu	44.547	140.57	0.32	44.547	140.57	0.32	44.547	140.57	0.32	44.457	140.57	0.32	44.547	140.57	0.32		140.57	
6	Muara Muntai	4.488	92.86	0.05	3.149	92.86	0.03	3.3.155	92.86	0.03	3.155	92.86	0.03	3.155	92.86	0.03		92.86	
7	Muara Wis	17.925	110.816	0.16	17.8	110.816	0.16	17.81	110.816	0.16	16.858	110.816	0.16	16.858	110.816	0.03		110.816	
8	Kota Bangun	17.849	114.374	0.16	17.849	114.374	0.16	20.207	114.374	0.18	20.207	114.374	0.18	20.207	114.374	0.15		114.374	
9	Tenggarong	15.582	39.81	0.39	15.582	39.81	0.39	15.58	39.81	0.39	15.58	39.81	0.39	15.58	39.81	0.18		39.81	
10	Sebulu	69.304	85.95	0.81	70.789	85.95	0.82	70.789	85.95	0.82	70.798	85.95	0.82	72.267	85.95	0.39		85.95	
11	Tenggarong Seberang	24.472	43.7	0.56	24.472	43.7	0.56	24.472	43.7	0.56	18.985	43.7	0.56	16.229	43.7	0.84		43.7	
12	Anggana	103.349	179.88	0.57	109.969	179.88	0.61	105.152	179.88	0.58	105.194	179.88	0.58	105.306	179.88	0.37		179.88	
13	Muara Badak	88.809	93.909	0.95	89.259	93.909	0.95	88.939	93.909	0.95	89.068	93.909	0.95	87.7	93.909	0.59		93.909	
14	Marangkayu	52.593	116.571	0.45	52.776	116.571	0.45	52.726	116.571	0.45	52.996	116.571	0.45	52.996	116.571	0.93		116.571	
15	Muara Kaman	147.448	341.01	0.43	147.448	341.01	0.43	148.498	341.01	0.44	148.498	341.01	0.44	148.498	341.01	0.045		341.01	
16	Kenohan	33.717	130.22	0.26	33.171	130.22	0.26	33.171	130.22	0.26	33.717	130.22	0.26	56.206	130.22	0.44		130.22	
17	Kembang Janggut	57.45	192.39	0.3	57.756	192.39	0.3	57.45	192.39	0.3	59.046	192.39	0.30	57.45	192.39	0.43		192.39	
18	Tabang	34.445	776.45	0.04	39.085	776.45	0.05	39.085	776.45	0.05	39.002	776.45	0.05	39.002	776.45	0.3		776.45	

2.1.7. Fasilitas Bank dan Non Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Jumlah bank yang terdapat di Kutai Kartanegara hampir selalu bertambah setiap tahunnya hingga menjadi 15 bank pada tahun 2012. Simpanan masyarakat di Bank Umum dan BPR cenderung berfluktuasi setiap bulannya, dimana pada tahun 2011 posisi simpanan terendahnya terjadi pada bulan Januari sebesar 3,19 triliun rupiah yang terdiri dari simpanan giro sebanyak 1,07 triliun rupiah, simpanan berjangka 0,57 triliun rupiah dan 1,54 triliun rupiah tabungan. Sedangkan posisi simpanan tertingginya terjadi pada bulan September 2011 yang terkumpul sebanyak 5,23 triliun rupiah yang terdiri dari simpanan giro sebanyak 1,98 triliun rupiah, simpanan berjangka 1,53 triliun rupiah dan 1,72 triliun rupiah tabungan.

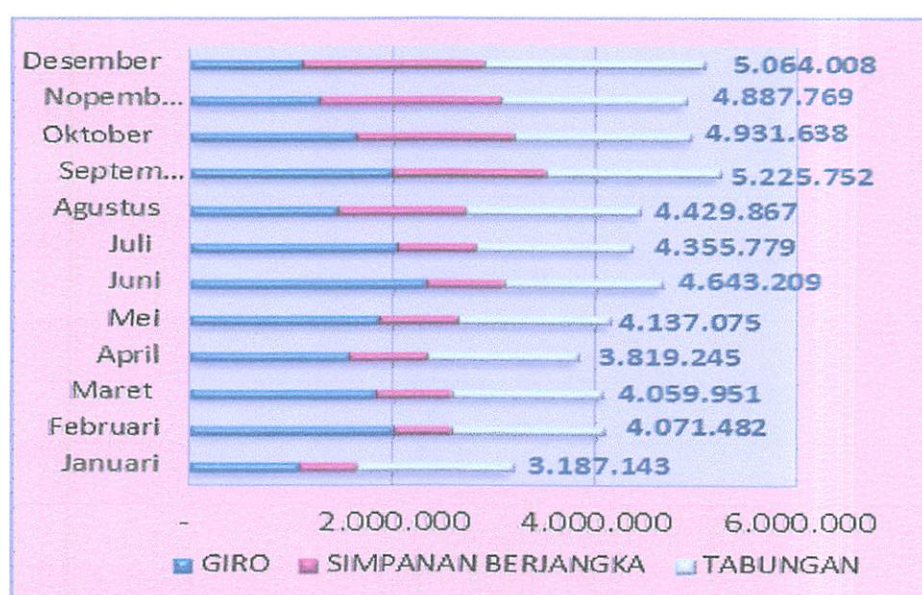
Dalam hal posisi kredit/pinjaman yang disalurkan Bank Umum dan BPR pada tahun 2011 di Kutai Kartanegara, sebagian besar digunakan untuk investasi berkisar antara 58%–67% dari total pinjaman setiap bulannya. Sedangkan pinjaman yang digunakan untuk modal kerja berkisar antara 21% – 29% dari total pinjaman. Sisanya sekitar 11%–14% dari total pinjaman setiap bulannya pada tahun 2011 digunakan untuk keperluan konsumsi .

Posisi kredit bank di Kutai Kartanegara yang disalurkan pada tahun 2011 yang terbesar adalah sektor pertanian sebesar Rp. 35.422 milyar, kemudian sektor perindustrian Rp.6.484 milyar, sektor pertambangan sebesar Rp.6.286 milyaran selebihnya adalah lainnya, perdagangan, konstruksi, jasa usaha, listrik, gas, air, jasa sosial, dan pengangkutan.

Tabel 2.49
Sarana Perbankan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013

NO	URAIAN	2011
1	Bank Umum	1
2	Bank Konvensional	25
3	Bank Syariah	1
4	Bank Perkreditan Rakyat	5

Gambar 2.12
Posisi Simpanan Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara
Pada Bank Umum dan BPR Tahun 2011 (Juta Rupiah)



Sumber : BI Samarinda

2.1.8. Fasilitas listrik dan telepon

A. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melistriki masyarakat tidak mampudandaerah terpencil. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian sasaran pemerintah daerah tersebut adalah persentase rumah tangga yang menggunakan listrik. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik merupakan proporsi jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai daya penerangan terhadap jumlah rumah tangga.

Sumber penerangan rumah yang menggunakan listrik PLN tahun 2011 sekitar 82,45 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar 2,45 persen dari 80,90 persen pada 2010. Pada tahun

2012 penerangan rumah yang menggunakan listrik PLN kembali meningkat lagi menjadi sebesar 85,29%.

Tabel 2.50
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2009-2012

SUMBER PENERANGAN	2009	2010	2011	2012	2013
Listrik PLN	87.76	80.9	82.45	85.29	77.59
Listrik Non PLN	10.09	13.21	12.66	8.71	15.22
Petromak / Aladin	0.20	0.56	0.00	1.35	1.69
Pelita / Senter	1.47	3.07	3.13	3.6	4.98
Lainnya	0.48	2.25	1.75	1.05	0.52
TOTAL	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

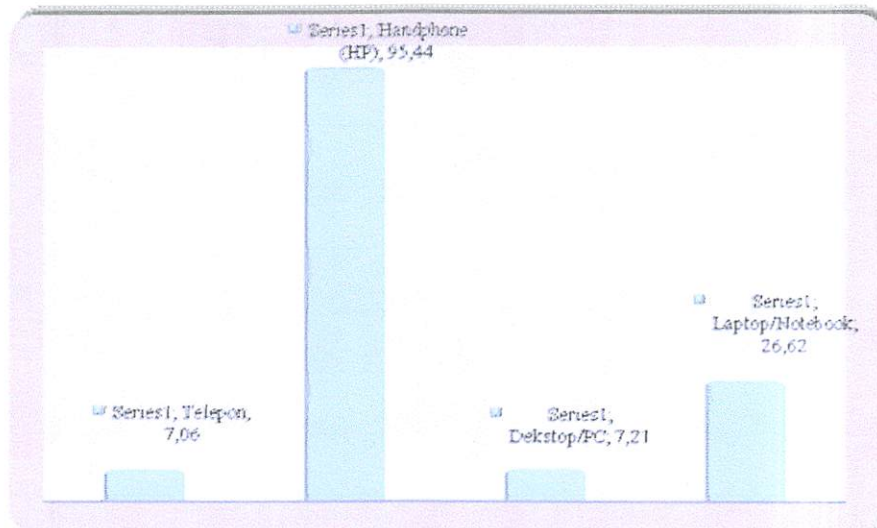
Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara

B. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi pada suatu daerah. Salah satu indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memilikiperangkat komunikasi berupa hand-phone (HP) dan telepon rumah biasa. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon adalah proporsi jumlah penduduk menggunakan telepon/HP terhadap jumlah penduduk. Persentase penduduk atau rumah tangga yang memiliki HP dan fasilitas telepon (PSTN) dapat diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS mengenai survei tentang teknologi komunikasi dan informasi.

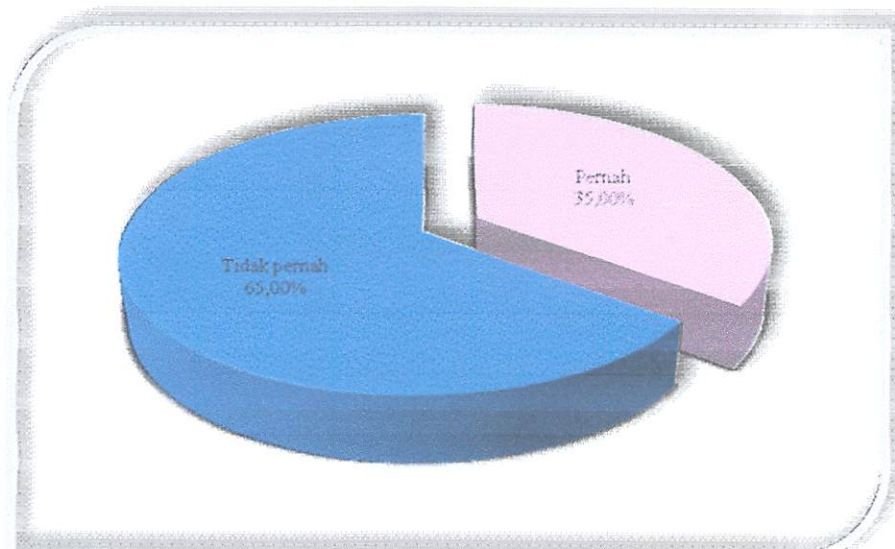
Rumah tangga yang menguasai telepon rumah di Kabupaten Kutai Kartanegara dari hasil Suseda 2013 sebesar 7,06 persen. Sementara itu rumah tangga yang menguasai telepon seluler sebesar 95,44 persen. Dan rumah tangga yang menguasai komputer baik *desktop*/PC ataupun *laptop/notebook* masing-masing sebesar 7,21 persen dan 26,62 persen.

Gambar 2.13
Persentase Rumah tangga Menurut Akses Terhadap Teknologi dan Informasi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013



Saat ini internet merupakan kebutuhan bagi banyak orang karena dengan internet kita bisa mengakses dan menemukan segala informasi di seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Internet adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Yang dimaksud mengakses internet apabila seorang meluangkan waktu untuk mengakses internet, sehingga ia dapat memanfaatkan/menikmati fasilitas internet seperti : mencari literatur/referensi, mencari/mengirim informasi/berita, komunikasi, *email/chatting* dll.

Gambar 2.14
Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas Menurut Akses Terhadap Teknologi Internet Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013



Jika dilihat berdasarkan akses terhadap internet pada rumah tangga, maka di Kabupaten Kutai Kartanegara hanya terdapat sekitar 35 persen rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam kurun waktu sebulan

sebelum masa pencacahan Suseda 2013. Sisanya sebanyak 65 persen tidak pernah mengakses teknologi internet dalam periode tersebut.

Pada Grafik 3.7.3 nampak bahwa berdasarkan lokasi/media akses internet di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013, sebagian besar rumah tanggayang mengakses internet melakukannya di rumah sendiri, yaitu sebesar 18,38 persen. Selain itu menggunakan fasilitas yang ada di kantor dan warnet untuk mengakses internet, yaitu masing-masing sebesar 11,47 persen dan 10,59 persen. Selebihnya penduduk menggunakan akses internet di sekolah (6,91 persen) dan lainnya (7,50 persen).

Gambar 2.15
Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas Menurut Lokasi/Media Akses Internet Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013



2.1.9. Ketersediaan Restoran dan Penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel.

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Kutai Kartanegara, terdapat sekitar 70 usaha restoran, 22 usaha bar/rumah minum, serta 9 usaha jasa boga/catering. Pada periode yang sama, terdapat sekitar 61 usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi. Adapun jenis usaha perjalanan wisata yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga Juni 2011 adalah 13 unit usaha yang tersebar di Kecamatan Tenggarong sebanyak 12 unit dan di Kecamatan Loa Janan sebanyak 1 unit. Jenis usaha perjalanan

ini terbagi menjadi 5 unit usaha biro perjalanan wisata dan 8 agen perjalanan wisata. Daftar hotel dan tingkat huniannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.51
Daftar Hotel dan Tingkat Hunian Kamar (%) di Kecamatan Tenggaraong Tahun 2012

	HOTEL	TINGKAT HUNIAN KAMAR		
		JUMLAH KAMAR SETAHUN	PEMAKAIAN KAMAR SETAHUN	RATE= KOLOM [3]:[2] X100%
1.	Hotel Grand Elty Singgasana Dan Elty Suite	26.442	10.916	41
2.	Hotel Syarifah	5.110	400	8
3.	Hotel Amanah	11.759	4.131	33
4.	Hotel Lizha	17.650	2.949	17
5.	Hotel Kendilo	7.060	1.203	17
6.	Hotel Tangga Arung	3.530	733	21
7.	Hotel Viladina	7.413	252	3
8.	Hotel Fatma	15.239	2.957	19
9.	Hotel Payong Sari	3.177	418	13
10.	Hotel Herlang	7.180	391	5
11.	Hotel Andira	6.707	712	16
12.	Hotel Karya Tapin II	4.942	926	19
13.	Hotel Lizha	17.650	2.949	17
14.	Hotel Karmila	1.400	235	8
15.	Hotel Pelangi Harapan	4.260	1.635	38
16.	Hotel Batar	2.800	69	1
17.	Hotel Grand Yuda	6.677	3.070	46
18.	Hotel Karya Tapin I	3.883	443	11
19.	Hotel Indonesia	3.150	4.136	65
20.	Hotel Simpang Handayani	7.413	535	7
21.	Hotel Kojo Muara Badak	16.390	27.314	82
22.	Hotel Sekarini Muara Badak	5.250	2.514	24
23.	Senipah Resort Samboja	9.625	4.245	44
JUMLAH		194.707	73.133	38

2.2. IKLIM BERINVESTASI

2.2.1. Keamanan dan ketertiban

A. Angka Kriminalitas

Angka Kriminalitas adalah rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Artinya dalam satu bulan rata-rata terjadi berapa tindak kriminalitas untuk berbagai kategori seperti curanmor, pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun. Angka kriminalitas di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel 2.52 berikut berikut:

Tabel 2.52
Angka Kriminalitas

JENIS KRIMINAL	2010	2011	2012
1. Jumlah Kasus Narkoba		74	51
2. Jumlah Kasus Pembunuhan		2	4
3. Jumlah Kasus Seksual	8	20	43
4. Jumlah Kasus Penganiayaan	20	53	28
5. Jumlah Kasus Pencurian	121	61	-
6. Jumlah Kasus Penipuan		23	14
7. Jumlah Pemalsuan Surat	19	13	12
8. Jumlah Pemalsuan Uang	3		
9. Perjudian	38	22	35
10. Pemerasan		3	6
11. Penggelapan		31	
12. Senjata Tajam		11	213
13. Lain-Lain		6	193
14. Total Jumlah Tindak Kriminal	209	319	406
15. Jumlah Penduduk	626.680	650.000	676.464
16. Angka Kriminal (8)/(9)	0,00033	0,000490	0,0006

B. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi adalah jumlah demonstrasi yang terjadi dalam periode 1 (satu) tahun. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Jumlah demonstrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2012 adalah 198 kali.

C. Peraturan Daerah (PERDA) yang Mendukung Iklim Usaha

Kondusifitas iklim berinvestasi juga diikuti dengan penerapan regulasi yang jelas seperti peraturan tentang perijinan, pajak dan retribusi yang dikenakan merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda dapat diketahui adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Beberapa peraturan Daerah yang mendukung Investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.53
Jumlah Perda Yang Mendukung Iklim Investasi
di Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	URAIAN	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Perijinan Investasi PMA yang dikeluarkan/disetujui	22	24	56	26
2	Jumlah Perijinan Investasi PMDN yang dikeluarkan/disetujui	5	4	4	5

2.3. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah, merupakan rencana pembangunan yang diaktualisasikan dalam kebijakan dan program tahunan, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan di daerah, dan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, yang di implementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja pembangunan daerah. Melalui evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan akan dihasilkan informasi kinerja yang dapat menjadi masukan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan menjadi lebih efisien, efektif, disertai dengan akuntabilitas pelaksanaannya yang jelas.

Evaluasi kinerja kebijakan dan program, merupakan bagian penting untuk menilai pencapaian program dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana kebijakan dan program selanjutnya. Evaluasi terhadap rencana kerja Tahun 2013 difokuskan pada penilaian kinerja kebijakandan program pembangunan melalui capaian target terhadap realisasi rencana pembangunan tahunan daerah yang didukung oleh sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai

Kartanegara. Adapun hasil evaluasi tersebut dituangkan berdasarkan capaian kinerja program dan kegiatan pada urusan wajib dan urusan pilihan.

2.3.1. Urusan Wajib

A. Urusan Wajib Pendidikan

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Tahun 2013 alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pendidikan sebesar Rp 561.227.453.037,- realisasi Rp. 432.920.772.851,- atau 77,14%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai sebanyak 7 program dan 347 kegiatan dengan tingkat capaian kinerja program sangat baik. Adapun perkembangan capaian indikator program pada urusan wajib pendidikan dari tahun 2011 s/d 2013 sebagai berikut :

Tabel 2.54.
Perkembangan Capaian Indikator Program Pada Urusan Wajib Pendidikan

INDIKATOR PROGRAM	2011	2012	2013
1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	53,00	34,55	46,95
2. Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	95,91	99,79	99,82
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,94	92,54	94,81
4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82,13	68,80	87,58
5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	81,76	56,86	79,56
6. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	1,39	0,07	0,01
7. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1,74	0,23	0,05
8. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	1,08	0,33	0,35
9. Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,61	92,77	100,00
10. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	98,26	88,78	96,27
11. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	95,85	96,88	99,74
12. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	95,40	102,39	97,23
13. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	89,16	99,04	91,15
14. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	62,41	77,26	80,35

Realisasi anggaran yang hanya 77,14% lebih disebabkan pada pelaksanaan kegiatan DAK yang tidak bisa terserap karena terkendala dengan terbitnya juknis yang terlambat, sehingga tidak mungkin dilaksanakan menyebabkan sisa anggaran cukup besar. Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu:

- 1) Capaian indikator program PAUD yang masih sangat rendah, hal ini kemungkinan disebabkan kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya pendidikan anak usia dini;

- 2) Masih terdapatnya pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi Hal ini disebabkan antara lain guru pada jenjang SD/SMP sebagian besar berpendidikan SPG dan D2 dan sebagian besar masih dalam tahap menyelesaikan pendidikan;
- 3) Pendidik dari aspek kuantitas sudah sudah mencukupi, tetapi dari aspek kualitas dan standar kompetensi terhadap penguasaan mata pelajaran masih kurang;
- 4) Angka partisipasi murni pendidikan SMA/SMK/MA yang masih rendah yaitu masih dibawah 80%. Hal ini kemungkinan disebabkan faktor geografis dan sebaran penduduk yang tidak merata pada desa dan kecamatan sehingga fasilitas sekolah SLTA sulit terjangkau. Permasalahan ini kemungkinan juga disebabkan oleh faktor ekonomi ekonomi keluargayang mengharuskan anak usia 16-18 harus bekerja membantu orang tua mencari nafkah, serta pernikahan dini;
- 5) Masih terdapat fasilitas pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK yang ruang kelasnya mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan, sedang dan berat, sehingga mengganggu kegiatan belajar.

B. Urusan Wajib Kesehatan

SKPD penyelenggara urusan kesehatan adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AM. Parikesit dan RSUD Adji Batara Sakti. Alokasi anggaran tahun 2013 untuk penyelenggaraan urusan kesehatan sebesar Rp. 403.368.952.610,- realisasi Rp. 290.102.298.377,- atau 71,92%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 18 program yang terdiri dari 158 kegiatan. Capaian kinerja urusan wajib kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 77,21 % atau sebanyak 2.311 kasus komplikasi pada tingkat puskesmas dari 2.993 ibu dengan kasus komplikasi kebidanan.
- b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 88% atau 12.648 ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan dari sasaran ibu bersalin sebanyak 14.259 ibu bersalin .
- c. Cakupan desa/kelurahan UCI yaitu tingkat pencapaian 51,5 % atau 117 desa/kelurahan yang telah mencapai UCI dibanding/dari 237 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- d. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan sebesar 100 % atau 110 balita gizi buruk yang mendapat perawatan dari 110 balita gizi buruk yang ditemukan .

- e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 23 % atau 286 orang penderita TBC+ ditemukan dan diobati dari 1.256 penderita baru TBC BTA+ (perkiraan penderita tb+).
- f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD sebesar 100 % atau 411 penderita DBD yang ditangani dari 411 penderita DBD yang ditemukan.
- g. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin sebesar 20 % atau sebanyak 24.764 kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata 1 dari 123.789 Jiwa masyarakat miskin (*Peserta Jamkesmas*).
- h. Cakupan kunjungan bayi sebesar 57,61 % atau 7.794 bayi yang berkunjung dan memperoleh pelayanan, dari 13.529 bayi baru lahir.

Dari pelaksanaan program dan capaian indikator capaian program-program pada lingkup kesehatan tahun 2013 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu :

- 1) Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) yang masih rendah;
- 2) Cakupan penemuan dan penanganan penyakit TBC BTA yang masih rendah;
- 3) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin yang masih rendah
- 4) Cakupan kunjungan bayi yang masih rendah
- 5) Usia harapan hidup yang rendah.

C. *Urusan Wajib Pekerjaan Umum*

SKPD penyelenggara urusan pekerjaan umum adalah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Cipta Karya dan Pertamanan, Kecamatan dan Kelurahan se Kabupaten Kutai Kartanegara. Alokasi anggaran tahun 2013 untuk penyelenggaraan urusan pekerjaan umum sebesar Rp. 2.363.407.996.588,- dan realisasi Rp. 1.850.387.612.049,- atau 78,29%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 8 program yang terdiri dari 617 kegiatan. Capaian berbagai program dan kegiatan mampu mendukung upaya peningkatan infrastruktur daerah, antara lain; prasarana jalan, jembatan, irigasi, pengelolaan air minum, air limbah, gedung pemerintah, dan infrastruktur daerah.

Capaian Kinerja urusa pekerjaan umum tahun 2013 antara lain Program Pembangunan Jalan dan Jembatan baru mencapai 79,25%. Hal ini terlihat dari kondisi Jalan Kabupaten yang dalam keadaan baik hanya mencapai 27,91%. Demikian juga halnya dengan Irigasi di Kabupaten Kutai

Kartanegara yang mencapai 8,925 Ha apabila dibandingkan dengan Luas Budidaya pertanian yang mencapai 38.751,36 Ha sehingga rasio irigasi tersebut hanya mencapai 15,09% dengan kondisi baik.

Dilihat dari tingkat pencapaian indikator kinerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air masih belum maksimal.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pekerjaan umum sampai dengan tahun 2013, masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain :

- 1) Laju tingkat kerusakan jalan dan jembatan tidak seimbang dengan ketersediaan dana untuk program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. Kendaraan berat yang digunakan untuk aktivitas perusahaan pertambangan dan perkebunan merupakan penyumbang terbesar terhadap kerusakan jalan;
- 2) Pembangunan gedung, jalan dan jembatan dan gedung sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku yang sering langka di pasar, sehingga dalam pelaksanaannya mengalami keterlambatan karena menunggu jadwal penyaluran;
- 3) Pembangunan Jalan Dan Jembatan, Ada beberapa kegiatan yang masuk dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Untuk jalan dan jembatan. Secara umum faktor yang menjadi penyebab tidak selesainya kegiatan di lapangan adalah (1) faktor cuaca; (2) faktor tidak tersedianya/tidak tercukupinya kuota material yang digunakan dalam kegiatan tersebut; dan (3) faktor dari pihak penyedia jasa (kontraktor pelaksana) yang kurang menguasai skup kegiatan dan kondisi lapangan.

D. Urusan Wajib Perumahan

Pembangunan perumahan tidak hanya bersifat pembangunan perumahan dalam arti sempit, tapi juga meliputi infrastruktur dasar perumahan permukiman, misal pembangunan sarana air bersih, perbaikan fasilitas umum seperti pasar, dan juga perbaikan lingkungan sehingga dapat tercipta perumahan permukiman yang sehat.

SKPD penyelenggara urusan perumahan adalah Dinas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertamanan. Alokasi anggaran tahun 2013 untuk penyelenggaraan urusan perumahan sebesar Rp. 197.997.609.550,- dan realisasi sebesar Rp. 158.612.378.837,- atau 80,11%. Anggaran tersebut

dipergunakan untuk membiayai 8 program dan 280 kegiatan. Capaian kinerja urusan wajib Perumahan tahun 2013 ditunjukkan dengan besaran Rumah tangga pengguna air bersih sebesar 40,84%, rumah layak huni sebanyak 92% dan lingkungan pemukiman kumuh yang hanya 5,93%.

E. Urusan Wajib Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan proses perencanaan penataan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Penataan ruang Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat, serta efisien dalam alokasi investasi. SKPD penyelenggara urusan penataan ruang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Alokasi anggaran tahun 2013 untuk penyelenggaraan urusan penataan ruang sebesar Rp179.168.274.425,- dan realisasinya sebesar Rp. 129.454.896.712,- atau 72,25%. Anggaran ini digunakan untuk membiayai 4 program yang terdiri dari 46 kegiatan. Capaian program dan kegiatan yang mampu berkontribusi pada meningkatnya penataan ruang.

Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Kutai Kartanegara berupa terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kartanegara No. 9 Tahun 2013 tentang RTRW. Disamping itu juga tersedianya ruang terbuka hijau per satuan wilayah sebesar 9,61%.

F. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan.

Penyusunan berbagai dokumen perencanaan disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta menjaga konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Untuk itu model perencanaan partisipatif terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan maksud mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyarakat ke dalam berbagai program dan kegiatan tahunan daerah. Proses perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013 dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan siklus perencanaan. Proses perencanaan dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, dan tingkat nasional. Proses ini telah menghasilkan perencanaan yang komprehensif, mengakomodasi berbagai kepentingan dari para pihak, berbagai sektor dan sasaran yang

bermuara pada satu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Musrenbang tersebut menghasilkan usulan program dan kegiatan yang nantinya akan dibiayai dana APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten dan masyarakat.

Usulan program dan kegiatan tersebut dirangkum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD menjadi acuan dalam penyusunan KUA dan PPAS. Rencana Kerja Pembangunan Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam mendukung kelancaran dan kemudahan dalam proses perencanaan, saat ini Bappeda telah membangun sebuah sistem Perencanaan Pembangunan dengan nama SIPPIter (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Interaktif) secara online yang bisa diakses dari manapun selama terhubung dengan internet. Inovasi dibidang perencanaan ini mengantarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi wakil Kalimantan Timur untuk berjuang mendapatkan penghargaan “Pangripta Nusantara 2014” di tingkat Nasional.

Evaluasi penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan juga telah dibangun sistem online bernama E-Monev, sehingga akan memudahkan bagi SKPD terutama di Kecamatan dan Kelurahan untuk melaporkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara online. Selain system tersebut diatas, juga telah dibangun system yang lain diantaranya E-Database, ERPIS (*Education Resources Planning Information System*), SIPOTENDA (*Sistem Informasi Potensi Daerah*) berbasis Google Maps dan JDSD (*Jaring Data Spasial Daerah*) yang semuanya berbasis web.

SKPD penyelenggara urusan perencanaan pembangunan adalah BadanPerencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Alokasi anggaran tahun 2013 untuk penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan sebesar Rp. 26.072.631.250,- dan realisasi sebesar Rp. 18.947.710.493,- atau 72,67%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 6 program yang terdiri dari 47 kegiatan.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 masih ditemuiberbagai permasalahan, yaitu :

- 1) Masih lemahnya pemahaman tentang perencanaan daerah menyebabkan lemahnya dokumen perencanaan daerah untuk menjadi acuan yang kuat dalam menyusun APBD.
- 2) Proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, dianggap masih belum memadai sehingga kekuatan data

dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan berikutnya masih lemah.

G. *Urusan Wajib Perhubungan*

Prasarana dan sarana perhubungan yang meliputi prasarana dan sarana lalu lintas, manajemen transportasi, dermaga dan terminal merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk menunjang mengoptimalkan aktivitas perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Capaian kinerja urusan wajib perhubungan tahun 2013 dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan nilai 0,562 % dengan jumlah angkutan darat sebanyak 427 yang melayani penumpang sebanyak 84.830 Orang. Kecilnya jumlah angkutan darat tersebut disebabkan masyarakat Kutai Kartanegara sebagian besar sudah memiliki kendaraan sendiri.

SKPD penyelenggara urusan perhubungan adalah Dinas Perhubungan. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan perhubungan sebesar Rp.164.095.717.376,- dan realisasinya sebesar Rp. 135.601.921.318,- atau 82,64%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 5 program yang terdiri dari 56 kegiatan.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu :

- 1) Masih kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas;
- 2) Masih kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap kapasitas berat muatan kendaraan angkutan barang yang melebihi beban yang diizinkan;
- 3) Masih terhambatnya proses perizinan pembangunan bandara Loa Kulu.

H. *Urusan Wajib Lingkungan Hidup*

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan perhatian yang serius terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini didasari dengan kesadaran bahwa kualitas lingkungan yang buruk mempengaruhi mutu generasi sekarang maupun yang akan datang. SKPD penyelenggara urusan lingkungan hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan lingkungan hidup sebesar Rp. 15.401.422.350,- dan realisasinya sebesar Rp. 5.514.533.290,- atau 35,81%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 4 program yang terdiri dari 22 kegiatan.

Sebagai implementasi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup, maka capaian kinerjanya ditunjukkan dengan penanganan sampah sebesar

52,9% dengan daya tampung TPS sebesar 0,176 per 1000 penduduk. Dalam penegakan hukum lingkungan, semua kasus lingkungan telah dapat diselesaikan.

I. Urusan Wajib Pertanahan

Upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan terus dilakukan melalui pendataan, pengukuran, dan pensertifikatan. Ketersediaan data terusdiupayakan dengan inventarisasi peta persil tanah. Guna kepastian status tanah dilakukan sertifikasi tanah sampai dengan tahun 2013 seluas 1.908.180ha, bidang tanah dari tanah yang seharusnya bersertifikat seluas 1.6817.597 ha.

SKPD penyelenggara urusan pertanahan adalah Bagian Administrasi Pertanahan, Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran pada tahun 2013 untuk penyelenggaraan urusan pertanahan sebesar Rp. 95.066.343.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.383.328.949,- atau 42,48%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 3 program yang terdiri dari dan 26 kegiatan.

Realisasi pelaksanaan urusan Pertanahan dapat dinilai berdasarkan indikator kinerja kunci pada tahun 2013 berupa penyelesaian kasus tanah Negara sebanyak 19 dari 25 kasus (76%) dan penyelesaian ijin lokasi sebanyak 62 dari 134 ijin yang diajukan (46,3%). Permasalahan yang masih dihadapi pada pelaksanaan urusan pertanahan antara lain :

- 1) Penyelesaian konflik-konflik pertanahan belum optimal;
- 2) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah belum optimal;
- 3) Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah belum optimal;
- 3) Implementasi Sistem Informasi Perizinan belum optimal.

J. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

Sehubungan masih terdapatnya status kependudukan ganda antarkabupaten/kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta masih banyaknya data penduduk yang tidak akurat maka pemerintah mencanangkan pelaksanaan program nasional Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada tahun 2011 sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Adapun maksud dari program nasional tersebut adalah untuk pembentukan akurasi data kependudukan skala nasional serta mewujudkan Nomor Induk Kependudukan tunggal bagi penduduk Indonesia. Pelaksanaan kegiatan e-KTP di Kabupaten

Kutai Kartanegara berjalan lancar, hal ini ditunjukkan dengan respon masyarakat terhadap pelaksanaan e-KTP sangat positif, ditunjukkan dengan kehadiran masyarakat dalam pengambilan gambar dan sidik jari di kecamatan.

SKPD penyelenggara urusan kependudukan dan catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Alokasi anggaran tahun 2013 untuk penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil sebesar Rp.14.914.781.891 dengan realisasi sebesar Rp 12.368.945.100 atau 82,93%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 1 program yang terdiri dari 19 kegiatan.

Indikator Kinerja Kunci yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 untuk bidang kependudukan dan catatan sipil ditandai dengan telah diterapkannya KTP berbasis nasional (SIAK), dengan jumlah penduduk ber-KTP sebesar 81,58 % dan penduduk yang telah memiliki akta kelahiran mencapai 656 per 1000 penduduk. Disamping itu pemerintah daerah juga telah berhasil memperoleh Piagam Penghargaan dari Gubernur Kalimantan Timur kepada Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Harapan III atas Bidang Administrasi Kependudukan dalam rangka HUT Provinsi Kalimantan Timur ke - 56 Tahun 2013

K. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditujukan untuk mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan dalam mewujudkan peran serta dan kemandirian masyarakat di semua lapisan tanpa membedakan gender dan memperhatikan hak-hak anak dengan sasaran meningkatnya pemberdayaan perempuan.

Keberhasilan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak jika dilihat berdasarkan indikator kinerja kunci cukup memuaskan, hal ini terlihat dari Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 83,98% meningkat dibanding tahun 2012 yang sebesar 78,18, Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun ke atas sebesar 86,8 % dengan partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 35,57 %.

Kepedulian pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sudah diakui secara nasional dengan diperolehnya Penghargaan dari Bapak Presiden RI berupa

Anugrah Parahita Ekapraya (APE), penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk menuju Kabupaten Layak Anak Tahun 2013 Kategori PRATAMA serta dari Kementrian Dalam Negeri berupa IGA (Innovation Government Awards).

SKPD penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 725.022.500 realisasi Rp. 723.493.000 atau 99,79%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 4 program dan 12 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui permasalahan sebagai berikut :

1. Masih terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap perempuan dan anak.
2. Masih terjadi bias gender di masyarakat.

L. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penyelenggaraan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan sasaran terwujudnya Norma Keluarga Kecil yang Berkualitas dan Sejahtera. SKPD penyelenggara urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera adalah Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Alokasi anggaran tahun 2013 untuk penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera sebesar Rp. 8.852.900.051,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.999.436.570,- atau 90,36%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 6 program yang terdiri dari 25 kegiatan.

Capaian Indikator Kinerja Kunci bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dikatakan cukup berhasil untuk ukuran suatu daerah dengan kondisi wilayah yang sangat luas dan persebaran penduduk yang masih belum merata. Hal ini terlihat dari prevalensi peserta KB aktif yang berada pada kisaran 71,36 %. Disamping itu juga ditunjukkan dengan adanya penghargaan dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagai Pemenang I Regional Luar Jawa Bali II sebagai Puskesmas terbaik dengan lomba pencapaian Pelayanan KB, Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kategori Puskesmas/Klinik KB Pemerintah Tahun 2013.

Dari pelaksanaan urusan wajib keluarga berencana dan keluarga sejahtera tahun 2013 ditemuiberbagai permasalahan, yaitu :

- 1) Terjadinya kecenderungan penurunan capaian kinerja prevalensi KB aktif yang disebabkan oleh kerkurangnya peserta KB aktif;
- 2) Terjadinya kecenderungan penurunan capaian kinerja keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I terhadap rasio petugas lapangan KB.

M. Urusan Wajib Sosial

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan sosial diarahkan untuk merealisasikan salah satu prioritas pembangunan yaitu penanggulangan kemiskinan. Selain itu juga diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlindungan bayi/anak terlantar, korban bencana, lansia dan anak sekolah. Upaya yang telah dilakukan adalahdengan pemberian bantuan, subsidi, pembinaan, pendampingan terhadap anak panti asuhan, penyandang cacat, korban bencana, korban kekerasan, danlansia rawan sosial. Penyelenggara urusan sosial adalah Bidang Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Alokasi anggaran tahun 2013 untuk penyelenggaraan urusansosial sebesar Rp. 97.015.653.550,- terealisasi sebesar Rp. 87.957.205.152 atau sebesar 90,66%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 9 program yang terdiri dari 29 kegiatan. Capaian kinerja urusan wajib sosial yang tercermin pada Kinerja Kunci (IKK) tahun 2013 di Bidang Sosial ditandai dengan tersedianya 15 buah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, Prosentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sebanyak 8.774 penyandang cacat dan bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang juga mencapai 31,65 % dari total 43.768 PMKS.

N. Urusan Wajib Tenaga kerja

Jumlah Angkatan Kerja (AK) tahun 2012 sebanyak 304.015 orang dengan jumlah Penduduk Usia Kerja/PUK (15-64 tahun) sebanyak 560.230 orang. Dengan melihat jumlah tersebut maka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) saat ini menunjukkan angka 54,27%. Persentase ini menurun jika dilihat dari tahun sebelumnya (tahun 2011) sebesar 68,04%. Sementara jika dilihat dari sisi pengangguran terbuka ditahun 2012 menunjukkan angka

sebanyak 23.977 orang, angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (tahun 2011) sebanyak 23.530 orang.

SKPD penyelenggara urusan ketenagakerjaan adalah Bidang Tenaga Kerjapada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial. Alokasi anggaran tahun 2011 untuk penyelenggaraan urusan ketenaga kerjaan sebesar Rp 3.484.071.200 dengan realisasi Rp. 2.938.521.500,- atau sebesar 84,34%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 3 program yang terdiri dari 17 kegiatan. Capaian kinerja urusan wajib tenaga kerja dapat dilihat dari jumlah pencari kerja yang terdaftar hingga tahun 2013 sebanyak 19.987 orang, yang berhasil ditempatkan hanya sebanyak 11.661 orang atau 58,34. Disisi lain penyelesaian permasalahan kasus perselisihan hubungan industrial (PHI) yang didaftarkan pada tahun 2013 ini sebanyak 129 kasus dan mampu diselesaikan ditingkat mediasi sebanyak 129 kasus, proses penyelesaian secara Bipartit ataupun anjuran.

O. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki potensi yang besar dan strategis dalam meningkatkan aktifitas ekonomi daerah sekaligus mendorong pemerataan pendapatan yang lebih baik. Kegiatan UMKM yang tersebar luas diseluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang koperasi mampumeningkatkan jumlah lembaga, anggota dan volume usaha koperasi. SKPD penyelenggara urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Alokasi anggaran tahun 2013 untuk penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah sebesar Rp. 6.262.474.590 realisasi Rp. 5.555.357.200 atau 88,71%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 4 program yang terdiri dari 16 kegiatan.

Capaian Kinerja Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam memacu perkembangan dan pertumbuhan wirausaha melalui Koperasi pada tahun 2013 mengalami pasang surut. Hal tersebut terlihat dari indikator koperasi aktif yang hanya sebanyak 305 koperasi dari

579 koperasi yang ada atau sebesar 52,68 %. Sementara apabila dilihat dari jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah baru mencapai 167 usaha atau sebesar 14,15% dari seluruh UKM di Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencapai 1.180 buah.

P. Urusan Wajib Penanaman Modal

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya memperbaiki iklim usahadan investasi, baik melalui perbaikan pelayanan perizinan, penyederhanaan prosedur perizinan, perbaikan regulasi, maupunmenciptakan suasana yang kondusif bagi pengembangan investasi. SKPD penyelenggara urusan penanaman modal adalah Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah. Alokasi anggaran tahun 2013 untuk penyelenggaraan urusan penanaman modal sebesar Rp. 7.320.940.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.275.203.000,- atau 85,72%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 2 program yang terdiri dari 17 kegiatan.

Capaian kinerja urusan wajib penanaman modal dapat dilihat dari realisasi penanaman modal dalam Negeri tahun 2013 mencapai Rp. 5,525 trilyun, mengalami kenaikan Investasi dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp. 857 Milyar.

Q. Urusan Wajib Kebudayaan

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus mendorong pelestarian budaya yang hidup di masyarakat sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang antara lain tercermin dalam upacara adat dan tradisi dusun/desa yang masih dilestarikan oleh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam bidang kesenian, diupayakan pelestarian dan pengembangan berbagai seni budaya lokal maupun nasional. Kegiatan dilakukan melalui berbagai pembinaan kelompok-kelompok kesenian.

Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun menyelenggarakan agenda budaya tahunan disebut Pesta adat Erau dan Festival Kota Raja. Pesta Adat Erau dilaksanakan selama satu minggu di pekan pertama bulan Juli di Kota Tenggarong dan diakhiri dengan upacara mengulur naga di perairan Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana. Pesta adat erau pertama kali dilaksanakan pada upacara Tijek Tanah dan Mandi ke Tepian ketika Aji Batara Agung Dewa Sakti berusia 5 tahun. Setelah dewasa dan diangkat menjadi raja Kutai Kartanegara yang pertama (1300-1325) juga diadakan upacara Erau, dan sejak itulah Erau selalu diadakan setiap terjadi penggantian atau penobatan Raja-raja Kutai Kartanegara. Erau sebagai upacara adat dalam usaha

pelestarian budaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, atas prakarsa bupati saat itu, Drs. H. Achmad Dahlan diadakan pada tahun 1971. Dan atas petunjuk Sultan Kutai Kartanegara terakhir, Sultan A.M. Parikesit, maka Erau dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah Kutai dengan kewajiban untuk mengerjakan beberapa upacara adat tertentu, tidak boleh mengerjakan upacara Tijak Kepala dan Pemberian Gelar, dan beberapa kegiatan yang diperbolehkan seperti upacara adat lain dari suku dayak, kesenian dan olahraga/ketangkasan. Festival Erau kini masuk dalam kalender even pariwisata nasional, tidak lagi dikaitkan dengan seni budaya Kraton Kutai Kartanegara, tetapi lebih bervariasi dengan berbagai penampilan ragam seni budaya yang berkembang diseluruh wilayah Kutai Kartanegara.

Penyelenggara urusan Wajib Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Alokasi anggaran tahun 2013 untuk penyelenggaraan urusan kebudayaan sebesar Rp. 6.623.289.800,- realisasi Rp. 5.934.503.400,- atau 89,60%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 5 program dan 13 kegiatan.

Sebagai daerah yang dikenal dengan kerajaan hindu tertua di Republik Indonesia, serta adanya fanatisme masyarakat terhadap warisan budaya maka sudah sewajarnya jika Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga mempunyai perhatian lebih dalam bidang budaya. Hal ini terlihat dari adanya Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya sebanyak 40 kali, Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 8 buah serta pelestarian terhadap budaya, situs dan kawasan budaya sebesar 86,49% dari total benda situs dan kawasan budaya sebanyak 37.

R. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Keberhasilan pelaksanaan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri tercermin dengan kondisi kehidupan sosial politik di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang kondusif. Upaya-upaya terus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjaga stabilitas dengan terus meningkatkan pengetahuan, pemahaman wawasan kebangsaan, dan pemantapan ideologi bagi aparat dan tokoh masyarakat serta dengan meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap masalah keamanan dan ketertiban di wilayah.

Dalam mengantisipasi potensi kerawanan sosial politik telah diupayakan langkah-langkah monitoring, deteksi dini dan pencegahan dini melalui forum kewaspadaan dini masyarakat serta mengefektifkan kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) yang anggotanya adalah dari unsur

Pemerintah Daerah, KODIM, Polres, Kejaksaan Negeri dan BIN. Disamping itu upaya lain yang ditempuh untuk cara deteksi dini dan cegah dini wilayah yang berpotensi menimbulkan konflik, khususnya SARA dilakukan dengan melibatkan tokoh agama dan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama. Pencegahan timbulnya gangguan keamanan secara umum dilakukan melalui pengamanan kegiatan penting seperti pada saat pemilihan kepala desa, patroli sambang desa, pengamanan hari besar, serta pelatihan penanggulangan huru hara.

Penyelenggara urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat. Alokasi anggaran tahun 2013 untuk penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebesar Rp. 24.870.363.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.770.796.568,- atau 79,50%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 6 program yang terdiri dari 56 kegiatan.

Sebagai tolok ukur keberhasilan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dinilai berdasarkan kinerjanya dalam pembinaan Politik Daerah dan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP. Dari pembinaan tersebut, kondisi keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup kondusif, aman dan terkendali dengan tidak adanya aksi-aksi anarkis maupun konflik berbau SARA.

S. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga melalui berbagai program dan kegiatan diarahkan untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan serta membudayakan olah raga di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berupaya meningkatkan pembinaan kepada generasi muda maupun meningkatkan prestasi di bidang olah raga.

SKPD penyelenggara urusan kepemudaan dan olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga sebesar Rp. 47.145.701.800,- realisasi Rp. 41.856.350.201,- atau 88,78%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 6 program yang terdiri dari 51 kegiatan. Pencapaian program dan kegiatan urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2013 didukung oleh sarana dan prasarana serta kinerja aparat. Berbagai program dan kegiatan di atas mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang kepemudaan dan

olahraga. Sarana dan prasarana olahraga yang merata di seluruh wilayah menjadi pendukung hal ini.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun anggaran 2013 dalam urusan kepemudaan dan olahraga dalam hal pencapaian Indikator Kinerja Kunci khususnya untuk penyediaan Gelanggang / Balai Remaja jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara baru mencapai 0,25%, sementara untuk penyediaan Lapangan Olah Raga telah mencapai 1,59% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada.

T. Urusan Wajib otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara perlu selaluditingkatkan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan transparansidan akuntabilitas, masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, dan kurangnya kesadaran dan ketaatanmasyarakat pada hukum. Penyelenggara urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandiandilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Kabupaten, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretariat KORPRI, Bappeda, Badan Kesbanglinmas, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, dan Informatika, Dinas Pertanian, DinasSDAEM, Dinas Perindagkop, Dinas Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kelauatan dan Perikanan, RSUD, Kecamatan dan Kelurahan.

Penataan perangkat daerah masih diperlukan komitmen, miskin struktur kaya fungsi yang menyesuaikan kebutuhan, kemampuan dan kondisi daerah sehingga peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dapat mengoptimalkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat serta memberikan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip mandiri, tertib, dan sejahtera. Komitmen dari reformasi birokrasi telah menjadi kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Reformasi birokrasi sebagai tuntutan dinamika masyarakat dengan menitik beratkan pada area perubahan.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara sudah mencapai pada tahapan implementasi. Diawali dengan melaunching atau menerapkan program Quick Win Reformasi Birokrasi yang untuk tahap awal diberlakukan pada 6 unit Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Peluncuran program Quick Win atau Program Cepat Capai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kukar dilakukan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Profesor Doktor Eko Prasjo yang ditandai dengan penyerahan Road Map Reformasi Birokrasi di Kukar beberapa waktu yang lalu.

Tolok ukur keberhasilan lainnya pada urusan ini dinilai berdasarkan ketersediaan Sistem Informasi Manajemen Pemda dan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. Pada tahun anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki Sistem Informasi Manajemen Pemda sebanyak 8 buah yaitu SIMDA (Sistem Informasi Daerah Keuangan), SIMBADA (Sistem Informasi Barang Daerah), SIMTAP (Sistem Informasi Satu Atap), SIMPEG (sistem Informasi Kepegawaian), SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), SIPPinter (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Interaktif), E-Monev, E-Database (JDSD; Sipotenda; Erpis dan Herpis).

Penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum administrasikeuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian serta hasil penyelenggaraan dapat disampaikan sebagai berikut :

1) Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2013 masih difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam pelayanan masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum melalui produk hukum, sosialisasi, pelayanan hukum hingga penindakan pelanggaran hukum. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum pada manajemen pemerintahan umum telah menghasilkan produk hukum dengan optimalisasi proses penyusunan antara lain melalui *public hearing* dan konsultasi pakar. Pembentukan produk hukum daerah dilakukan sebagai tindak lanjut peraturan perundang-undangan dan dalam rangka mengakomodasi kebutuhan perkembangan sosial kemasyarakatan. Maksud perumusan produk hukum daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan. Upaya pemasyarakatan produk

hukum senantiasa dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami regulasi yang berlaku. Penyelenggara urusan Otonomi daerah dan pemerintahan umum adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Otonomi daerah dan pemerintahan umum sebesar Rp. 2.048.094.362,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.982.974.000,- atau 96,82%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 1 program yang terdiri dari 6 kegiatan.

2) Perangkat Daerah

Melalui organisasi perangkat daerah yang dibentuk diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah daerah. Peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah terus diupayakan secara berkesinambungan diantaranya dengan penentuan target kinerja organisasi perangkat daerah. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja dan hasilnya digunakan sebagai dasar pemberian penghargaan kepada instansi.

3) Administrasi Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah antara lain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran daerah melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah. Pengembangan pengelolaan keuangan daerah antara lain ditempuh melalui penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan dana perimbangan, dan penyempurnaan standarisasi harga barang dan jasa. Upaya peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui media massa dan website Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta penyusunan *annual report* terhadap laporan keuangan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Untuk mendukung tertib administrasi asset daerah, pemerintah melakukan pengendalian asset daerah pada 100 SKPD berupa pembenahan penatausahaan aset melalui pengolahan data hasil sensus barang daerah, pelatihan pengurusan barang daerah, dan pembenahan administrasi mutasi asset. Sedangkan untuk mendukung kelancaran pelayanan publik telah dilakukan pengadaan berbagai barang daerah. SKPD penyelenggara urusan Administrasi Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Administrasi Keuangan Daerah dan Kekayaan Daerah sebesar Rp.59.463.565.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.242.182.265,- atau 55,90%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 1 program yang terdiri dari 75 kegiatan.

4) Kepegawaian

Pengelolaan kepegawaian dilaksanakan dengan mengacu pada polamerit dan pola karier. Sistem ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidaksesuaian antara formasi jabatan struktural yang terbatas dengan banyaknya calon yang tersedia dan untuk menjamin kualitas sumber dayamanusia. Uji kompetensi pegawai calon pejabat merupakan penjabaran konkrit dari sistem tersebut. Peningkatan profesionalisme pegawai antara lain diupayakan melalui pengembangan jabatan fungsional. Peningkatan kompetensi pegawai dilakukan dengan pemberian kesempatan tugas belajar, ijin belajar, pendidikan dan pelatihan teknis. Pengelolaan kepegawaian dalam konteks pembinaan dilakukan melalui sistem pemberian *reward* dan *punishment* bagi pegawai.

SKPD penyelenggara urusan kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kepegawaian Rp. 26.234.321.490,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.434.817.851,- atau 77,89%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 5 program yang terdiri dari 14 kegiatan.

5) Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa yang bertujuan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dievaluasi melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilaksanakan. SKPD penyelenggara urusan pengawasan adalah Inspektorat Kabupaten. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pengawasan sebesar Rp. 11.684.772.129,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.503.097.450,- atau 55,65%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 2 program yang terdiri dari 15 kegiatan.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2013 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu :

- 1) *Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Disamping itu masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan ketaatan masyarakat terhadap hukum belum optimal.*

- 2) Masih terjadinya tumpang tindih dalam pengawasan terhadap obyek pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal.
- 3) Penentuan kuota penerimaan pegawai dari Pemerintah Pusat tidak sesuai dengan kebutuhan formasi yang diusulkan.

U. Urusan Wajib Ketahanan Pangan

Pelaksanaan program kegiatan urusan wajib ketahanan pangan berjalan optimal didukung oleh regulasi, sarana dan prasarana kerja, peran sertamasyarakat peduli pangan dan pihak akademisi. Kebijakan pelaksanaan urusan wajib ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2010-2015 adalah membangun sektor pertanian ke arah agribisnis denganmemperkuat sistem pertanian dalam arti luas. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut mampu mendukung keberhasilan peningkatan ketahanan pangan selama kurun waktu 5 tahun(2010 - 2015).

Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pola konsumsi pangan yang aman, bergizi dan beragam, namun juga meningkatkan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mendukung ketahanan pangan. Program yang dilaksanakan telah mampu mempertahankan surplus pangan pokok, hal ini ditunjukkan dengan ketersediaan pangan utama (beras) tahun 2013 rata-rata sebesar 167.478,21 kg/1000 penduduk, meningkat dibanding tahun 2012 yang sebesar 160.537,27 kg/1.000 jumlah penduduk per tahun.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan urusan ketahanan pangan pada tahun 2013 masih ditemui beberapa permasalahan. Secara umum permasalahan urusan ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

1) Aspek Ketersediaan Pangan

- a. Perubahan iklim yang sulit diprediksi adanya organism pengganggu keamanan (OPT) serta alih fungsi lahan pertanian mengakibatkan penurunan luas lahan produktif, penurunan suplai air irigasi akibat kurang optimalnya saluran irigasi yang berdampak pada penurunan populasi, produksi dan produktivitas berbagai komoditas pertanian yang berdampak pada penurunan ketersediaan dan cadangan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. Akses petani ke sumber permodalan masih rendah.

2) Aspek Distribusi Pangan

Rendahnya kualitas jaringan infrastruktur jalan di Kabupaten menyebabkan distribusi bahan pangan pokok dari wilayah-wilayah surplus pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara ke wilayah-wilayah yang kekurangan bahan pangan pokok mengalami hambatan, baik dari aspek waktu maupun biaya distribusi yang menjadi sangat mahal.

V. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 serta untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa menuju demokratisasi dan kemandirian desa diberikan Alokasi Dana Desasebesar 10% dari alokasi Dana Bagi Hasil. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) diperinci untuk biaya operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar 30% dan untuk pemberdayaan masyarakatsebesar 70%. Besaran 70% dari ADD ini didistribusikan kepada warga masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di tingkat desa sebagai wujud partisipasi warga dalam proses perencanaan pembangunan.

Penyelenggara urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakanoleh Badan Pemberdayaan Masyarakat.Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 27.291.622.434,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.144.474.750,- atau sebesar 84,48%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 11 program dan 66 kegiatan.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2013 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan angka PKK Aktif dan Posyandu Aktif yang masing-masing mencapai 100%.

W. Urusan Wajib Statistik

Pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada urusan statistik telah dapatdilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terselesaikannya penyusunan beberapa dokumen yang bermanfaat sebagai bahan perencanaanpembangunan maupun perumusan kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyelenggara urusan Statistik adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan

urusan statistik melalui Program Pengembangan Data, Informasi, dan Statistik Daerah sebesar Rp. 9.068.615.400,- realisasi Rp.6.742.019.267,- atau sebesar 74,34%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 2 program dan 23 kegiatan dengan rata-rata capaian kinerja kegiatan sebesar 100%. Permasalahan yang dihadapi pada urusan statistik adalah validitas data masih kurang dikarenakan pengelola data belum berpedoman pada aturan yang sama.

Pelaksanaan program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah menghasilkan output berupa tersedianya data statistik dasar yaitu Kabupaten Dalam Angka, PDRB Kabupaten dan Sistem Informasi Pembangunan Data.

X. Urusan Wajib Kearsipan

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat memperhatikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam urusan kearsipan. Upaya meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan pada SKPD dilaksanakan melalui pemberian bimbingan teknis kepada para pengelola kearsipan, pembinaan kearsipan, pendampingan kearsipan dan monitoring sistem kearsipan pola baru. Indikator yang dapat diukur untuk penilaian kinerja sebuah instansi ataupun pemerintahan dalam bidang kearsipan adalah dengan melihat adanya penerapan pengelolaan arsip secara terpadu. Penerapan sistem kearsipan secara terpadu di Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari SKPD yang sudah menerapkan sistem kearsipan baru ada 52 % dari total 100 SKPD.

Penyelenggara urusan Kearsipan adalah Kantor Arsip Daerah. Pada tahun 2013, alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kearsipan adalah sebesar Rp. 1.147.477.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 922.215.100,- atau 80,37%. Anggaran ini dipergunakan untuk membiayai 4 program yang terdiri dari 9 kegiatan. Permasalahan yang dihadapi pada urusan kearsipan adalah:

- 1) Pemahaman tentang tata kelola arsip pada masing-masing SKPD masih rendah.*
- 2) Belum semua SKPD memiliki arsiparis.*
- 3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan birokrat tentang fungsikan pentingnya arsip.*

Y. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Program dan kegiatan urusan komunikasi dan informatika mampu melancarkan pelayanan telekomunikasi dan informasi antar instansi maupun masyarakat di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengembangan infrastruktur jaringan komputer terus dilakukan yang meliputi pengembangan jaringan komputer internal instansi (dalam instansi) dan antar instansi. Saat ini seluruh instansi telah terhubung secara *on line*. Pengembangan perangkat lunak dilakukan dengan pengembangan/penambahan perangkat lunak original yang dibutuhkan seperti MS Windows, MS Office dsb dan pengembangan aplikasi sistem informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat di Kabupaten Kutai Kartanegara juga tidak lepas dari adanya kepedulian pemerintah daerah dengan penyediaan dan pemasangan infrastruktur jaringan dari tingkat kabupaten sampai ke kecamatan, sehingga akses informasi masyarakat relatif sudah lebih baik di banding beberapa tahun sebelumnya. Ditambah lagi dengan adanya website pemerintah kabupaten, maka akses informasi bagi masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun Kalimantan Timur sangat terbuka luas. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 11.445.532.528,- dengan realisasi sebesar Rp. 10.758.939.794,- atau 94,00%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 2 program yang terdiri dari 19 kegiatan. Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2011 masih ditemui berbagai permasalahan, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat kurang mampu diikuti oleh sebagian SDM, dan ketersediaan dana.

Z. Urusan Wajib Perpustakaan

Peningkatan pelaksanaan urusan perpustakaan terus dilakukan, baik sarana prasarannya maupun peningkatan koleksi buku bacaan yang dimiliki baik dari jumlah buku maupun judul buku. Program dan kegiatan perpustakaan mendorong peningkatan minat baca masyarakat. Hal ini terlihat dari perkembangan jumlah anggota, pengunjung, maupun peminjam koleksi perpustakaan daerah. Meningkatnya minat baca ini juga telah diimbangi dengan penyediaan koleksi yang memadai, baik dari jumlah eksemplar koleksi maupun keragaman judul.

Peranan pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM melalui bidang Perpustakaan di Kabupaten Kutai Kartanegara

sampai dengan tahun 2013 dirasa memenuhi standar kecukupan. Hal ini terlihat dari jumlah pengunjung perpustakaan yang berjumlah 31.888 orang dalam setahunnya dimana jumlah pengunjung dalam tiap bulannya selalu mengalami peningkatan dengan jumlah koleksi judul Buku yang tersedia baru mencapai 19.909 judul buku dengan jumlah 44.108 Eksemplar. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan Urusan Wajib perpustakaan sebesar Rp. 3.079.259.250,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.655.490.456,- atau 86,24%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai 1 program yang terdiri dari 9 kegiatan. Permasalahan dalam urusan perpustakaan:

- 1) *Belum memadainya sarana dan prasarana.*
- 2) *Kapasitas SDM pustakawan terbatas.*
- 3) *Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang belum optimal.*

2.3.2. Urusan Pilihan

A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Salah satu kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan pembangunan adalah dengan transformasi ketergantungan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ke sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Salah satunya adalah melalui bidang Kelautan dan Perikanan yang pada tahun 2013 produksi perikanan mencapai 123.506 ton (97,4%) dari target daerah sebesar 126.760 ton. Konsumsi ikan di Kutai Kartanegara mencapai 72.8 kg/org/tahun (97 %) dari target 74,50 kg/kapita/tahun.

B. Urusan Pertanian

Capaian kinerja Bidang Pertanian untuk tahun anggaran 2013 dapat dilihat dari realisasi keberhasilan produksi komoditi unggulan (padi, sawit dan daging) sektor pertanian. Produktivitas per hektar untuk padi mencapai 4,9 ton GKG. Kontribusi Sektor pertanian dalam arti luas terhadap PDRB dengan migas sebesar 7,27 % meningkat dibanding tahun 2012 sebesar 6,53%.

C. Urusan Kehutanan

Kehutanan merupakan salah satu sektor yang selama ini menjadi andalan sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peranan pemerintah dalam sektor kehutanan terlihat dari capaian kinerjanya dalam hal Rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Pada tahun 2013 rehabilitasi hutan dan lahan kritis mencapai 14,79 %, sementara kerusakan lahan hutan sebesar 10,12 %.

Hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya hutan dalam hubungannya dengan kerusakan hutan, yaitu: semakin luasnya hutan yang rusak, besarnya tekanan terhadap sumber daya hutan dari sektor lain, sumber daya hutan kurang memberikan manfaat sesuai dengan harapan masyarakat, tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hutan, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pelestarian sumber daya hutan, kurangnya kepedulian dan kemampuan multipihak dalam pelestarian sumber daya hutan, dan rendahnya akseptabilitas terhadap eksistensi tata ruang kawasan hutan.

D. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Kontribusi sektor pertambangan yang sebesar 81,41 % (dengan Migas) dari total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 menunjukkan masih dominannya peranan sektor tersebut. Dalam hal ini tujuan pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan pada sektor migas untuk beralih ke sektor pertanian dalam arti luas dan pengembangan pariwisata daerah masih jauh dari harapan.

Produk unggulan sektor Pertambangan adalah migas, batubara, dan bahan galian golongan C, disusul gas alam cair (*liquid natural gas*). Produk unggulan lain yang masih berupa keunggulan komparatif adalah pasir kuarsa.

E. Urusan Pariwisata

Geliat sektor pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya jumlah kunjungan wisata yang mencapai 598.223 orang selama tahun 2013 meningkat dibanding tahun sebelumnya sebanyak 324.907 orang. Kontribusi urusan pariwisata terhadap PDRB sebesar 0,105%

F. Urusan Industri

Pertumbuhan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 13,48% dengan kontribusi pada PDRB yang hanya mencapai sebesar 1,31%.

G. Urusan Perdagangan

Peranan sektor perdagangan di Kabupaten Kutai Kartanegara apabila dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB adalah sebesar 3,32%, dengan nilai ekspor bersih perdagangan sebesar US\$ 565,59 milyar.

H. Urusan Ketransmigrasian

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 tidak menerima transmigran, baik transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarsa.

Disamping capaian kinerja pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan urusan-urusan pemerintahan sebagaimana diatas, pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga memperoleh beberapa Penghargaan dari Pemerintah Pusat antara lain :

- 1) Pemenang I Regional Luar Jawa Bali II sebagai Puskesmas terbaik dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- 2) Anugrah Parahita Ekapraya (APE).
- 3) IGA (Innovation Government Awards) dari Kementrian Dalam Negeri.
- 4) Kabupaten Layak Anak Tahun 2013 Kategori PRATAMA.
- 5) Penghargaan AKIP dari KemenPAN-RB.

Selain penghargaan di tingkat nasional tersebut, di tingkat Provinsi Kalimantan Timur juga memperoleh panji-panji keberhasilan. Adapun panji keberhasilan yang didapat, yakni :

Peringkat I, bidang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kategori kabupaten, pemeringkatan e-Government, pembangunan tanaman pangan, pembangunan ketahanan pangan, kepemudaan, perkebunan, pendidikan dan bidang pemeringkatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi daerah (PPID).

Peringkat II, yakni bidang ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyuluhan, administrasi kependudukan kategori Kabupaten, kehutanan dan bidang pembangunan hukum dan HAM.

Peringkat III, pada bidang pembangunan peternakan, keolahragaan, tim penggerak PKK berprestasi, dan bidang kebudayaan dan pariwisata kategori kabupaten.

2.4. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.4.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi berbagai permasalahan merupakan isu pokok permasalahan dan tantangan pembangunan daerah yang selanjutnya ditetapkan sebagai prioritas dalam rencana kerja pembangunan tahun 2014 dengan tetap

mensinkronkan rencana pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional. Beberapa permasalahan dan tantangan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah diantaranya sebagai berikut:

1) Bidang Pendidikan

- Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak pada usia dini.
- Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan.
- Masih banyak pendidik yang belum memenuhi standar kualifikasi.
- Masih rendahnya kompetensi pendidik untuk seluruh tingkatan pendidikan.

2) Bidang Kesehatan

- Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan ibu dan anak.
- Akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih belum mampu menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat, terutama masyarakat di desa dan wilayah pedalaman.
- Kurangnya jumlah tenaga medis dan paramedis.
- Terbatasnya sarana prasana kesehatan.

3) Bidang Ekonomi

- Keterbatasan daya listrik menghambat aktivitas produktif masyarakat dan pertumbuhan UKM/UMKM.
- Kelangkaan bahan bakar minyak menghambat aktivitas masyarakat, terutama yang berkaitan dengan agribisnis dan agroindustri.
- Rendahnya efektivitas kelembagaan pertanian dan keterbatasan jumlah petugas penyuluh pertanian.
- Infrastruktur pertanian menghambat produksi dan produktivitas pertanian.

4) Bidang Pekerjaan Umum

- Laju tingkat kerusakan jalan dan jembatan tidak seimbang dengan ketersediaan dana untuk program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. Kendaraan berat yang digunakan untuk aktivitas perusahaan pertambangan dan perkebunan merupakan penyumbang terbesar terhadap kerusakan jalan.
- Masih banyaknya permukaan jalan yang berupa batu dan tanah yang sangat menghambat aksesibilitas masyarakat.

- Pembangunan gedung, jalan dan jembatan dan gedung sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku yang sering langka di pasar, sehingga menghambat proses pembangunan infrastruktur.
- Irigasi baru mencapai 8,925 ha apabila dibandingkan dengan luas budidaya pertanian yang mencapai 38.751,36 Ha sehingga rasio irigasi tersebut masih kecul, yaitu hanya 15,09 % dengan kondisi baik.

5) Bidang Perhubungan

- Kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam berlalu lintas sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas.
- Minimnya sumber daya manusia yang memiliki daya saing walaupun dalam masa produktif.
- Masih lemahnya sistem informasi dan manajemen dalam bidang perhubungan.
- Lemahnya pengawasan terhadap angkutan umum dan angkutan perusahaan.
- Belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan.

6) Bidang Perumahan dan Penataan Ruang

- Fungsi saluran yang kurang memadai yang disebabkan oleh kondisi jaringan yang rusak dan tidak terawat.
- Tumbuhnya permukiman yang cukup pesat di wilayah perkotaan, khususnya kota Tenggarong.
- Jumlah kebutuhan rumah belum sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

7) Bidang Lingkungan Hidup

- Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan terhadap aktivitas pengelolaan sumber daya alam.
- Meningkatnya luasan lahan kritis baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, juga kerusakan fisik akibat pertambangan serta pada ekosistem pesisir dan laut yang berupa deforestsasi hutan mangrove.

8) Bidang Pemerintahan, Politik dan HAM

- Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat karena belum tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (*good governance*).
- Tingkat disiplin dan kinerja PNS yang rendah.

- Belum semua SKPD memiliki dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal dan Prosedur Standar Operasional.
- Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa, dan tatakelola pemerintahan desa.
- Partisipasi perempuan dalam pembangunan belum optimal.
- Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah.
- Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak masih ada.
- Kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk mematuhi aturan masih belum optimal.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kebijakan Keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan suatu analisis terhadap rencana dan strategi pembangunan daerah pada tahun 2015 yang didasari atas kecenderungan realisasi kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah tahun 2015, yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan tersebut sebelumnya mempertimbangkan keselarasan dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2015, arah kebijakan pembangunan nasional dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015, merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2015. RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 adalah tahapan rencana tahun ke-lima atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2015. Dengan demikian arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan dalam rangka mencapai target-target sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2015.

Dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian daerah, maka Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari subsistem ekonomi nasional, tidak dapat terlepas dari arah kebijakan ekonomi nasional terutama terkait dengan kebijakan perdagangan nasional dan global, terutama pada komoditi minyak mentah, gas bumi, dan batu bara, yang saat ini menjadi komoditi ekspor nasional.

Sebagaimana tertuang di dalam RKP Nasional pertumbuhan ekonomi tahun 2015 ditargetkan sebesar 5,5 – 6,3 %. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 3,53% sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun kelima.

Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut masih dibawah nasional dengan pertimbangan *trend* pertumbuhan produksi minyak dan gas bumi serta batu bara yang selalu menurun, dimana komoditi tersebut saat ini memiliki kontribusi yang besar terhadap kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun demikian untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya mengoptimalkan potensi ekonomi daerah melalui prinsip pembangunan berkelanjutan. Yakni penguatan perekonomian daerah kepada sektor-sektor potensial yang terbarukan (*renewable resources*), dan memiliki keterkaitan (*linkages*) yang tinggi terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya, adapun sektor ekonomi yang dijadikan sebagai sektor pendorong adalah **sektor pertanian** dan **industri pengolahan**. Oleh karenanya langkah-langkah strategis yang dilakukan adalah memantapkan kapasitas sektor pertanian dan industri yang berwawasan lingkungan dengan meningkatkan **investasi** dan **penguatan BUMD** sebagai penggerak perekonomian daerah.

Selain dari pada itu, secara agregat perekonomian daerah akan bergerak positif jika ditunjang dengan aksesibilitas yang memadai, aksesibilitas tersebut diarahkan pada penguatan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti proses produksi, distribusi dan konsumsi. Oleh karena itu kebijakan ekonomi daerah tidak terlepas dari kebijakan pembangunan infrastruktur daerah terutama terkait dengan aksesibilitas ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014.

A. Kondisi Ekonomi Makro

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektoral

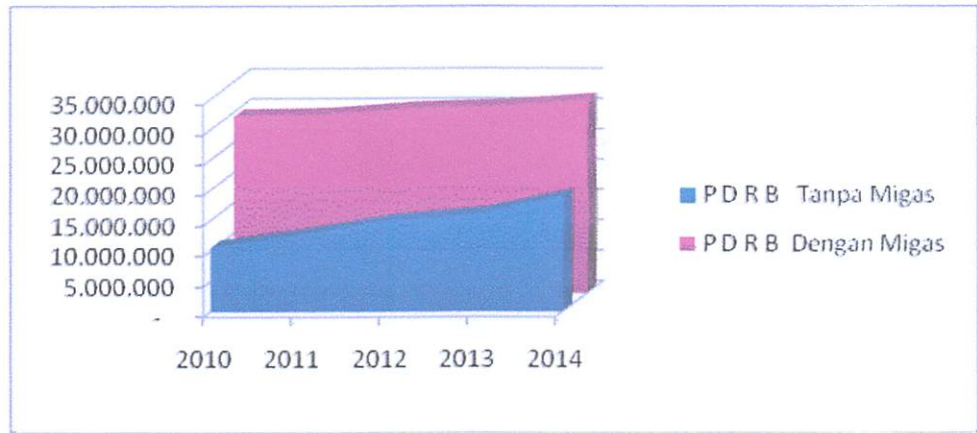
Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah dengan karakteristik perekonomian yang didominasi oleh sektor primer, terutama sektor pertambangan dan penggalian. Kecenderungan struktur perekonomian ini masih tetap bertahan hingga tahun 2013 yang tergambar dari besarnya *share* sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB sebesar 81,41%, diikuti sektor pertanian sebesar 6,45%. Dalam perspektif transformasi sektor pertambangan dan penggalian ke sektor pertanian, maka kecenderungan struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dua tahun terakhir menunjukkan arah yang lebih positif, dimana *share* sektor pertambangan dan penggalian cenderung menurun, sedangkan sektor pertanian cenderung

meningkat. 84,86% sektor pertambangan dan penggalian, 6,13% sektor pertanian pada tahun 2012. Namun demikian mengingat besarnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian, maka jika terjadi *kontraksi* terhadap nilai tambah bruto sektor tersebut, akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 dengan migas sebesar 1,06% lebih kecil dibanding tahun 2012 sebesar 3,40%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi sektor pertambangan dan penggalian, diantaranya disebabkan oleh menurunnya permintaan pasar global terhadap komoditi migas dan batu bara Indonesia, sehingga terjadi *kontraksi penawaran* yang berimplikasi pada *menurunnya* volume produksi.

Dalam perspektif yang berbeda, perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara jika mengabaikan subsektor minyak dan gas bumi lebih menggambarkan kondisi riil daerah, mengingat subsektor minyak dan gas bumi memiliki tingkat kompleksitas yang terkait dengan kewenangan Pemerintah Pusat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2013 tanpa migas sebesar 7,12%, lebih lambat dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 18,25%, kondisi ini terjadi karena masih kuatnya pengaruh sektor pertambangan dan penggalian tanpa migas, pada tahun 2013 *share* sektor pertambangan dan penggalian tanpa migas sebesar 49,75% terhadap PDRB tanpa migas, sehingga pada saat komoditi batu bara yang mengalami penurunan produksi maka akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi tanpa migas, kondisi ini diperkuat dengan pertumbuhan nilai tambah bruto sektor pertambangan dan penggalian tanpa migas pada tahun 2013 hanya sebesar 6,19% lebih kecil dibanding tahun 2012 sebesar 35,91%,

Berikut gambar 3.1 dan 3.2 yang menunjukkan *trend* nilai PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara atas harga konstan dan pertumbuhan ekonomi mulai tahun 2010 hingga tahun 2013 dan target tahun 2014.

Gambar 3.1.
Trend PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Harga Konstan Tahun 2010-2014



sumber : BPS dan RPJMD Kutai Kartanegara 2010-2015

Gambar 3.2
Trend Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara Atas Harga Konstan Tahun 2010 2014



sumber : BPS dan RPJMD Kutai Kartanegara 2010-2015

2. Pendapatan Domestik Regional Bruto Menurut Penggunaan

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut penggunaan, merupakan salah satu pendekatan lain dalam perhitungan kinerja perekonomian daerah dari sisi permintaan (*supply side*). Perhitungan PDRB menurut penggunaan dapat digunakan sebagai penyeimbang dalam melihat kondisi riil masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melakukan aktivitas ekonomi. Berikut data terakhir yang dihimpun BPS sampai dengan tahun 2012.

Tabel. 3.1.
Distribusi PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara
Menurut Penggunaan Atas Harga Konstan Tahun 2011-2012

NO	URAIAN	2011	2012
1	Konsumsi Rumah Tangga	7,89	9,05
	a. Makanan	4,26	4,52
	b. Non Makanan	3,63	4,53
2	Konsumsi LNPRT	0,24	0,26
3	Penggunaan Pemerintah	2,40	2,71
4	Pemb. Modal Tetap Bruto	8,31	9,75
5	Perubahan Inventori	0,34	0,45
6	Ekspor	95,45	98,47
	a. Luar Negeri	63,92	65,77
	b. Antar Daerah	31,53	32,70
7	Minus Import	14,63	20,70
	a. Luar Negeri	4,63	5,93
	b. Antar Daerah	9,99	14,77
	PDRB	100	100

Sumber : BPS

Tabel. 3.2.
Perkembangan Konsumsi Kabupaten Kutai Kartanegara 2011-2012

URAIAN	2011	2012
<i>Nilai (Milyar Rupiah)</i>		
- Konsumsi Rumah Tangga	9.845,40	11.960,13
- Konsumsi Lembaga Nirlaba	300,37	347,10
Jumlah	10.145,77	12.307,22
<i>Kontribusi (Persen)</i>		
- Konsumsi Rumah Tangga	7,89	9,05
- Konsumsi Lembaga Nirlaba	0,24	0,26
Jumlah	8,13	9,32
<i>Laju Pertumbuhan (Persen)</i>		
- Konsumsi Rumah Tangga	7,20	10,05
- Konsumsi Lembaga Nirlaba	5,94	7,94
Jumlah	7,15	9,97

Sumber : BPS

Selain dari pada itu komponen PDRB menurut penggunaan dapat lebih dieksplere terkait indikator ekonomi lainnya, diantaranya adalah Investasi. Investasi merupakan salah satu variabel utama dalam pencapaian laju pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dalam mengoptimalkan kapasitas faktor-faktor produksi, Investasi Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2012 atas dasar harga berlaku tercatat sebesar 13,48 Triliyun, dengan pertumbuhan sebesar 8,08%. Pertumbuhan investasi ini memberikan sinyal positif terhadap perkembangan perekonomian daerah pada masa yang akan datang, mengingat pada tahun sebelumnya investasi yang ditanamkan di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami pertumbuhan negatif yakni sebesar -0,55%. Namun demikian terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian tentang investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dimana kontribusi investasi pada pembentukan PDRB relatif kecil yakni hanya

sebesar 10,21%, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam memanfaatkan potensi ekonomi daerah agar dapat menarik minat investor melalui pengembangan sektor-sektor pendukung seperti peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka membangun kondusivitas iklim investasi.

Dari sisi efisiensi investasi dapat dilihat dari angka *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), investasi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2012 lebih efisien dibanding dengan tahun 2011, sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi yang ditanamkan dapat berjalan dan berdaya guna bagi kinerja perekonomian daerah di tahun 2012.

Tabel 3.3
Nilai Investasi dan ICOR Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2010-2012 (Triliyun Rupiah)

TAHUN	INVESTASI ATAS DASAR HARGA BERLAKU	INVESTASI ATAS DASAR HARGA KONSTAN	ICOR LAG 0
2010	9,91	5,74	4,89
2011	10,79	5,70	22,17
2012	13,48	6,16	6,16

3. Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan data BPS Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 9,79% angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 sebesar 5,15% (YOY). Andil Kelompok Pengeluaran inflasi terbesar terdapat pada kelompok Transportasi dan Komunikasi sebesar 2,80% diikuti kelompok Bahan Makanan sebesar 2,70%, dan Perumahan sebesar 1,66%. Tingginya angka inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara disebabkan karena kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak, sehingga andil inflasi terbesar pada komoditi yang dominan adalah bensin sebesar 2,06%. Berikut Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2013.

Tabel 3.4
Inflasi Kabupaten Kutai Kartanegara 2013 (YOY)

NO	KELOMPOK PENGELUARAN	LAJU INFLASI (%)	ANDIL INFLASI (%)
1	Bahan Makanan	8,37	2,70
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	6,77	1,27
3	Perumahan	8,75	1,66
4	Sandang	3,78	0,24
5	Kesehatan	9,23	0,33
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	8,88	0,38

NO	KELOMPOK PENGELUARAN	LAJU INFLASI (%)	ANDIL INFLASI (%)
7	Transportasi & Komunikasi	24,67	2,80
	UMUM	9,79	

Sumber : BPS

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 dan 2016 adalah hasil analisis dan identifikasi isu-isu strategis pembangunan ekonomi daerah, yang memperhatikan kondisi internal dan eksternal terhadap capaian arah kebijakan ekonomi dan keuangan tahun 2015 dan 2016.

1) Tantangan

Dalam rangka pembangunan daerah yang berkualitas, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu mengidentifikasi tantangan yang harus dihadapi. Adapun identifikasi tantangan yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, sehingga tingkat signifikansi produksi sektor pertambangan dan penggalian terhadap capaian pertumbuhan ekonomi sangat kuat. Dengan demikian tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah pengaruh fluktuasi harga pasar global terhadap komoditi minyak mentah dan batu bara yang memiliki implikasi kuat terhadap kuantitas produksi dalam negeri, yang berimplikasi terhadap kinerja sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain dari pada itu seiring dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014 sebagai tindak lanjut sekaligus aturan turunan dari UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, maka setiap daerah harus dapat memperhatikan *hilirisasi produksi sektor pertambangan dan penggalian* dalam rangka memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah;
2. Konsekwensi kuatnya sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara, maka kegiatan eksploitasi dan eksplorasi Sumber Daya Alam akan berimplikasi terhadap kualitas lingkungan hidup. Dengan berpegang pada prinsip pembangunan yang inklusif, maka aspek pertumbuhan dan pemerataan harus diperkuat melalui aspek lingkungan hidup;
3. Proses Industrialisasi sebagai tahapan proses pembangunan menuju masyarakat yang maju secara ekonomi adalah bentuk dari upaya

transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder, atas dasar tersebut diperlukan peningkatan investasi, penguatan kelembagaan ekonomi dan daya saing komoditi daerah, hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja.

4. *Disparitas pembangunan* wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara hingga saat ini masih menjadi tantangan serius, mengingat ketimpangan wilayah (Indeks Williamson : 0,7 tahun 2011) Kabupaten Kutai Kartanegara sangat tinggi, yang dikarenakan oleh karakteristik wilayah yang beragam (wilayah pesisir, wilayah tengah dan hulu) maka diperlukan simpul arus ekonomi yang terintegrasi, dimana potensi-potensi ekonomi saling terhubung dalam kerangka pengembangan wilayah yang berorientasi pada keterkaitan antara industri hulu dan hilir, agar kegiatan-kegiatan ekonomi dapat berjalan secara efektif.
5. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara rata rata per tahun sebesar $\pm 3\%$. Kondisi ini merupakan suatu keniscayaan yang berimplikasi kuat terhadap capaian pembangunan ekonomi daerah. Oleh karenanya pengendalian dan optimasi peran penduduk dalam proses pembangunan ekonomi menjadi perhatian serius, hal ini terkait dengan isu nasional tentang "*Bonus Demografi*". Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus dapat meningkatkan kualitas penduduk produktif melalui investasi pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan.

2) Prospek Perekonomian Daerah

Prospek Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015 dan 2016, diyakini akan meningkat, seiring dengan adanya keberhasilan kebijakan pemerintah daerah yang ditunjukkan dengan kecenderungan *trend* positif kinerja perekonomian daerah 2010-2013. Tahun 2015 adalah tahun transisi pembangunan RPJPD tahap II ke Tahap III, sehingga pembangunan ekonomi daerah yang telah dilakukan, tentunya akan membawa efek positif terhadap efektivitas dan efisiensi kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang, yang ditunjukkan dengan penyediaan sarana dan prasarana pembangunan daerah yang lebih baik, terbangunnya interkoneksi antar wilayah, kecenderungan meningkatnya investasi di daerah, meningkatnya kualitas pelayanan dasar, terbangunnya kawasan-kawasan strategis perekonomian daerah, adanya kebijakan nasional terhadap hilirisasi sektor primer, berkembangnya sumber-sumber pendapatan baru dan *trend* kondisi ekonomi makro Kabupaten Kutai Kartanegara yang selalu membaik, kondisi

tersebut menjadi modal dasar dalam menjamin perbaikan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2015 dan 2016

Berdasarkan atas uraian tersebut dan mempertimbangkan potensi Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dengan migas ditargetkan sebesar 3,53% dengan migas dan 7,5% tanpa migas, inflasi dikendalikan pada posisi 5-6% dan pendapatan perkapita dengan migas sebesar Rp. 280.789.929,-, sedangkan tanpa migas sebesar Rp. 193.675.943,-. Asumsi tersebut adalah atas pertimbangan rasional dan pemutahiran target makro RPJMD di tahun 2015.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang dioperasionalkan di dalam APBD.

Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri atas: (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara umum komponen APBD terdiri dari:

Komponen Pendapatan:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Komponen Belanja:

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan

- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Komponen Pembiayaan:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2010-2015, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

- a) Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya.

- b) Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, *law enforcement* dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.
- c) Dalam rangka pemungutan pajak daerah, dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- d) Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.
- e) Penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan pendapatan daerah.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta diupayakan untuk memperoleh Dana

Penyesuaian Bidang Infrastruktur yang termasuk dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Secara keseluruhan, terus diupayakan peningkatan Dana Perimbangan terutama melalui DAK dan dana bagi hasil.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- a) Dana darurat yang diterima dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana korban/kerusakan akibat bencana.
- b) Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah.
- c) Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- d) Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima pemerintah kabupaten merupakan lain-lain penerimaan yang sah.
- e)

Tabel 3.5
Proyeksi Pendapatan Daerah 2015 (dalam juta)

NO	URAIAN	JUMLAH			PROYEKSI /TARGET 2015
		REALISASI TAHUN 2012	REALISASI TAHUN 2013	TAHUN BERJALAN 2014	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	273,077.10	379,729.23	363,775.30	400,000.00
1.1.1	Pajak daerah	36,821.70	73,443.03	49,750.00	50,000.00
1.1.2	Retribusi daerah	8,948.30	6,484.60	9,604.90	10,000.00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	21,416.90	37,368.61	35,379.00	35,000.00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	205,890.20	262,432.99	269,041.40	305,000.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	5,172,121.80	4,836,034.41	4,005,900.50	3,448,674.00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	5,097,976.90	4,633,092.52	3,806,528.40	3,448,674.00
1.2.2	Dana alokasi umum	59,091.50	150,245.86	127,011.00	-
1.2.3	Dana alokasi khusus	15,053.40	52,696.03	72,361.10	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	675,107.10	734,903.84	857,000.80	288,663.70
1.3.1	Hibah	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-

NO	URAIAN	JUMLAH			PROYEKSI /TARGET 2015
		REALISASI TAHUN 2012	REALISASI TAHUN 2013	TAHUN BERJALAN 2014	
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	353,261.30	417,762.48	301,333.70	288,663.70
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	136,737.70	174,493.91	248,057.40	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	185,108.10	142,647.45	307,609.70	-
	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)	6,120,306.00	5,950,667.48	5,226,676.60	4,137,337.70

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015, seiring dengan RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara 2010-2015, sebagai berikut:

- Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial
- Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman diperkotaan dan diperdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
 - 2) Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Dana alokasi umum diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat;
 - 4) Dana alokasi khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.
- f. Belanja Pegawai
- 1) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempatbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Penganggaran gaji tunjangan ketiga belas PNS dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas Pegawai Negeri Sipil Daerah, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan. Besarnya Tunjangan Umum dimaksud berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- 4) Dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di Rumah Sakit Daerah;
- 5) Belanja pegawai sambil menunggu penetapan pagu anggaran indikatif dana perimbangan, maka pengalokasian anggaran masih menggunakan pagu anggaran belanja pegawai tahun sebelumnya. Setelah dana perimbangan telah ditetapkan pemerintah, maka belanja pegawai dianggarkan dengan memperhitungkan kebijakan pemerintah menaikkan gaji pokok sebesar 20% dan "accres" gaji sebesar 2,5% untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai terutama akibat adanya penerimaan pegawai baru;
- 6) Berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
- 7) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD, atau unit usaha lainnya, pembayaran gaji dan penghasilan lainnya menjadi beban BUMD, atau unit usaha yang bersangkutan;
- 8) Pemberian honorarium bagi PNS supaya dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

g. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Penyediaan anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan

mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan evaluasi persediaan barang serta barang dalam pemakaian;

- 2) Penganggaran pengadaan software untuk sistem informasi manajemen keuangan daerah dicantumkan dalam belanja barang dan jasa. Jika software tersebut dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya, harus dikapitalisasi menjadi aset daerah;
- 3) Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan perekonomian daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa agar mengutamakan hasil produksi dalam negeri dan melibatkan pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
- 4) Dalam merencanakan kebutuhan barang, pemerintah daerah supaya menggunakan daftar inventarisasi barang milik pemerintah daerah dan standar penggunaan barang sebagai dasar perencanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
- 5) Penganggaran belanja untuk penggunaan energi dan air agar mempedomani Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penghematan Energi dan Air yang diubah menjadi Instruksi Presiden Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penghematan Energi dan Air;
- 6) Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani ketentuan tentang standar satuan harga barang dan jasa yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah;
- 7) Belanja perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan masyarakat dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa;
- 8) Penyediaan belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding agar dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif agar tidak terlalu lama meninggalkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat; dan
- 9) Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, dan lokakarya atasundangan atau tawaran dari

organisasi/lembaga tertentu diluar instansi pemerintah dilakukan secara selektif agar tidak membebani belanja perjalanan dinas.

h. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang memiliki kriteria:

- 1) masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) merupakan objek pemeliharaan;
- 3) jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
- 4) pengadaan software dalam rangka pengembangan sistem Informasi manajemen dianggarkan pada belanja modal.

i. Belanja DPRD

- 1) Penganggaran belanja DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pada tahun 2008 menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perubahan terakhir atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004. Disamping itu mempedomani pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
- 2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian serta tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Belanja DPRD. Sedangkan belanja tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD;
- 3) Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang

Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD dianggarkan pada objek belanja tunjangan khusus PPh Pasal 21; dan

- 4) Untuk penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD dan tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD dapat dianggarkan pada kode rincian objek belanja berkenaan dalam pos DPRD. Belanja dimaksud dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan yang mengaturnya telah ditetapkan oleh pemerintah.
- j. Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 1) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 2) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - 3) Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja langsung Sekretariat Daerah; dan
 - 4) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- k. Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang

dapat ditunda.

l. Belanja Subsidi

- 1) Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

m. Bantuan Sosial

- 1) Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.
- 2) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

n. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

o. Belanja Bantuan Keuangan

- 1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- 2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan;

- 3) Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

p. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang sepertipenanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Tabel 3.6
Proyeksi Belanja Daerah 2015 (*dalam juta*)

NO	URAIAN	JUMLAH			
		REALISASI TAHUN 2012	REALISASI TAHUN 2013	TAHUN BERJALAN 2014	PROYEKSI / TARGET 2015
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,853,596.30	2,156,135.68	2,997,924.70	2,854,133.40
2.1.1	Belanja Pegawai	1,143,837.70	1,359,225.96	2,183,420.74	2,404,266.00
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	7,738.20	10,372.76	46,500.00	-
2.1.4	Belanja Hibah	278,762.80	264,197.54	194,496.88	-
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	110,459.60	40,562.37	73,180.00	-
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa*	280,682.30	470,959.05	485,327.09	434,867.40
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	32,115.70	10,818.00	15,000.00	15,000.00
2.2	BELANJA LANGSUNG	3,086,038.90	5,226,459.38	4,947,254.45	2,140,368.05
2.2.1	Belanja Pegawai	302,518.00	382,832.24	294,909.10	-
2.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	968,072.80	1,427,584.84	1,709,546.78	-
2.2.3	Belanja Modal	1,815,448.10	3,416,042.30	2,942,798.57	-
TOTAL JUMLAH BELANJA		4,939,635.20	7,382,595.06	7,945,179.15	4,994,501.45

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah

berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pinjaman daerah.

- b. Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

Tabel 3.7
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2015 (*dalam juta*)

NO	JENIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	JUMLAH			
		REALISASI TAHUN 2012	REALISASI TAHUN 2013	TAHUN BERJALAN 2014	PROYEKSI/TARGET PADA 2015
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2,442,490.00	3,449,352.19	2,718,502.50	857,163.75
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	2,441,490.00	3,447,898.77	2,718,502.50	857,163.75
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	1,000.00	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	1,000.00	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	453.42	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	172,753.10	100,000.00	200,000.00	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	118,726.50	100,000.00	200,000.00	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	54,026.60	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		2,269,736.90	3,349,352.19	2,518,502.50	857,163.75

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu **“Menuju Terwujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera Dan Berkeadilan”** dengan *Grand Strategy* **“GERBANG RAJA”** (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera), sebagaimana yang tertuang didalam RPJMD Tahun 2010-2015, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang didasarkan pada Misi Gerbang Raja tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
VISI GERBANG RAJA " MENUJU TERWUJUDNYA MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERKEADILAN "		
MISI PERTAMA :		
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dengan menitik beratkan pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan good governance.	1. Mewujudkan daerah yang memiliki tata pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan, jujur dan bertanggung jawab, serta akuntabel.	1. Berkurangnya tindak pidana korupsi.
	2. Mewujudkan daerah dengan sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien.	2. Semakin membaiknya integritas layanan publik. 3. Semakin membaiknya opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah per SKPD.
MISI KE DUA :		
Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia yang unggul, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	Mewujudkan daerah yang memiliki sumberdaya manusia handal dengan produktivitas tinggi yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta bertaqwa kepada Tuhan YME, berdasarkan falsafah Pancasila	1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 2. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan menurunnya pengangguran terbuka. 3. Menurunkan angka kemiskinan.
MISI KE TIGA :		
Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan lapangan kerja.	1. Mendorong usaha mengurangi ketergantungan pada Sumber Daya Alam (SDA) yang tak terbarui (<i>unrenewable resources</i>) ke SDA yang terbarui (<i>renewable resources</i>)	1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat
	2. Mewujudkan kemandirian ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan potensi wilayah secara optimal	2. Meningkatnya PDRB Migas dan tanpa Migas
	3. Meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja.	3. Meningkatnya pendapatan perkapita 4. Meningkatnya investasi
MISI KE EMPAT :		
Meningkatkan sumber-sumber pendapatan dan pengembangan potensi serta daya saing agribisnis, industri dan pariwisata	1. Mengembangkan industri yang berbasis pada sektor kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan kehutanan secara berkelanjutan, serta industri pariwisata yang berbasis pada penguatan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal.	1. Meningkatnya nilai tukar petani (NTP).
	2. Mengembangkan kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran	2. Meningkatnya produksi tanaman pangan. 3. Meningkatnya produksi perkebunan. 4. Pengembangan hutan tanaman industri.

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN
	masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, agribisnis dan agroindustri.	5. Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging. 6. Meningkatnya produksi perikanan tangkap. 7. Meningkatnya destinasi pariwisata dan melestarikan kebudayaan daerah (desa budaya sebagai tujuan wisata). 8. Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik.
MISI KE LIMA :		
Meningkatkan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas	Mewujudkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat	1. Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan yang semakin membaik. 2. Meningkatnya rasio jaringan irigasi. 3. Meningkatnya rasio rumah layak huni 4. Meningkatnya rasio permukiman layak huni 5. Persentase ruang terbuka hijau di perumahan. 6. Meningkatnya rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 7. Menurunnya angka pelanggaran lalu lintas 8. Meningkatnya rasio ketersediaan daya listrik.
MISI KE ENAM :		
Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam	1. Semakin membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengembangkan kearifan lokal 2. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten	1. Meningkatnya persentase rehabilitasi hutan terhadap lahan kritis. 2. Meningkatnya persentase ruang terbuka hijau. 3. Meningkatnya ketaatan terhadap hukum lingkungan
MISI KE TUJUH :		
Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan anak	1. Membaiknya <i>Gender Empowerment Measurement</i> (GEM). 2. Membaiknya <i>Gender-related Development Index</i> (GDI). 3. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk serta meningkatkan pembinaan dan ketahanan keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera.

4.1.2 Prioritas Pembangunan

Sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan.

Memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan kondisi tahun 2015 serta prospek tahun 2015 maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2015 di tetapkan sebagai berikut :

Tabel 4.2
Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD TAHUN 2015)	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN BERKENAAN
1	REFORMASI BIROKRASI	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian;	1 Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan
			2 Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
			3 Menurunnya tingkat pelanggaran hukum
			4 Meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan public
			5 Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan
2	PENDIDIKAN	Urusan Pendidikan	6 Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan serta pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan
		Urusan Perpustakaan	
		Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	7 Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga
3	KESEHATAN	Urusan Kesehatan	8 Meningkatnya kualitas dan pemberdayaan masyarakat dalam perluasan pelayanan kesehatan serta pencegahan terhadap penyakit
			9 Meningkatnya ketersediaan sarana dan tenaga pelayanan kesehatan
			10 Meningkatnya tata kelola pelayanan kesehatan
4	PENANGGULANGAN KEMISKINAN	Urusan Sosial	11 Menurunnya angka kemiskinan
		Urusan Ketenagakerjaan	12 Meningkatnya perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan
		Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	13 Meningkatnya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan
		Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	14 Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan terhadap perempuan dan anak
		Urusan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera	15 Meningkatnya kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
		Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	16 Optimalisasi kualitas dan peran BUMD, koperasi dan UMKM
5	KETAHANAN PANGAN	Urusan Kelautan Dan Perikanan	17 Meningkatnya produksi tangkap nelayan dan perikanan budidaya
		Urusan Pertanian	18 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dalam arti luas
		Urusan Ketahanan Pangan	19 Meningkatnya ketersediaan pangan
6	INFRASTRUKTUR	Urusan Penataan Ruang	20 Meningkatnya kualitas penataan ruang
		Urusan Pekerjaan Umum	21 Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi (jalan jembatan, irigasi, listrik, sarana air bersih dan lain-lain)

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD TAHUN 2015)	U R U S A N	SASARAN RPJMD TAHUN BERKENAAN
			)
		Urusan Perumahan Rakyat	
		Urusan Perhubungan	22
		Urusan Perencanaan Pembangunan	23
7	IKLIM INVESTASI	Urusan Penanaman Modal	24
		Urusan Komunikasi Dan Informatika	25
8	ENERGI DAN INDUSTRI	Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Dan Industri	26
9	LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA	Untuk Urusan Lingkungan Hidup	27
		Kehutanan	28
			29
10	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI	Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	30
11	KEBUDAYAAN, EKONOMI KREATIF, DAN INOVASI TEKNOLOGI	Urusan Kebudayaan Dan Urusan Pariwisata	31
			32

Tabel 4.3
Penjelasan Program Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
1	INFRASTRUKTUR						
		Urusan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas penataan ruang				
				Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah Kecamatan yang memiliki RDTR		DINAS PU
				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang	100%	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
					Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik	26%	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
					Jumlah Kebijakan Tata Ruang yang telah disusun	18	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Kebijakan Tata Ruang yang telah disusun	96%	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Perkotaan.	100%	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk (CK)	40	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Program Perencanaan Tata Ruan	Jumlah Kecamatan yang memiliki RDTR	100%	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
					Jumlah Kebijakan Tata Ruang yang telah disusun	18	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Program Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah	Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang		DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Terhadap Luas Perkotaan.		KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
		Urusan Pekerjaan Umum	Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendukung aktivitas ekonomi (jalan jembatan, irigasi, listrik, sarana air bersih dan lain-lain)				
		Urusan Perumahan Rakyat		Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	cakupan jalan dalam kondisi baik		DINAS PU
		Urusan Perhubungan		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	jalan dapat dilalui kendaraan roda empat >40km/jam		DINAS PU
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	cakupan drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik		DINAS PU
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Cakupan turap/talud/bronjong dalam kondisi baik		DINAS PU
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	cakupan panjang jalan/jembatan dalam kondisi baik		DINAS PU
				Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	cakupan jalan dan jembatan direnovasi		DINAS PU
				Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas irigasi rawa dalam kondisi baik		DINAS PU
				Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	cakupan sumber daya air yang di kelola		DINAS PU
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pesentase penduduk berakses air bersih		DINAS PU
				Program Pengendalian Banjir	Cakupan wilayah banjir		DINAS PU
				Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Cakupan Pembangunan Jalan lingkungan fungsional - panjang km		DINAS PU
				Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Jumlah rumah yg dirhab		DINAS PU

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
				Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	cakupan jalan dalam kondisi baik	58	DBMSDA
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	jalan dapat dilalui kendaraan roda empat >40km/jam	94%	DBMSDA
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	cakupan drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik	94%	DBMSDA
				Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Cakupan turap/talud/bronjong dalam kondisi baik	94%	DBMSDA
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	cakupan panjang jalan/jembatan dalam kondisi baik	94%	DBMSDA
				Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Cakupan Jalan dan Jembatan di inspeksi	94%	DBMSDA
				Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	cakupan jalan dan jembatan direnovasi	94%	DBMSDA
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kebinamargaan	94%	DBMSDA
				Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Luas irigasi rawa dalam kondisi baik	94%	DBMSDA
				Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	ketersediaan air bersih	94%	DBMSDA
				Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	cakupan sumber daya air yang di kelola	94%	DBMSDA
				Program Pengendalian Banjir	cakupan penanganan banjir		DBMSDA
				Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	cakupan jalan dalam kondisi baik	60	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	jalan dapat dilalui kendaraan roda empat >40km/jam	94%	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	cakupan drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik		DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	cakupan panjang jalan/jembatan dalam kondisi baik		DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
				Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Rumah tangga pengguna air bersih	60	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pesentase penduduk berakses air bersih	94%	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Cakupan Pembangunan Jalan lingkungan fungsional - panjang km	94%	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Lingkungan pemukiman kumuh	20%	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Program Pengembangan Perumahan	rumah layak huni		DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/dermaga	33	DISHUB
					- Pelabuhan Laut	2	DISHUB
					- Jumlah Dermaga	12	DISHUB
				Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah Prasarana & Fasilitas LLAJ yang direhab	96%	DISHUB
					- alat uji	0,00%	DISHUB
					- fasilitas lalu lintas	0,00%	DISHUB
					- Dermaga	0,00%	DISHUB
					- terminal	0,00%	DISHUB
					- pelabuhan	0,00%	DISHUB
				Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Jumlah arus penumpang angkutan umum	145	DISHUB
					- arus penumpang Bis / AKDP yang masuk	8	DISHUB
					- arus penumpang Bis / AKDP yang keluar	12	DISHUB
					- arus penumpang Kapal Sungai yang masuk	65	DISHUB
					- arus penumpang Kapal Sungai yang keluar	60	DISHUB
				Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis	100%	DISHUB
				Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Indikator ini diukur dengan membandingkan proporsi antara jumlah rambu-rambu yang dipasang dalam setahun terhadap total jumlah rambu-rambu yang seharusnya terpasang	56	DISHUB
					Jumlah Rambu lalu lintas darat yang seharusnya terpasang	1,6	DISHUB
					- Jumlah Rambu lalu lintas darat yang terpasang	0,00%	DISHUB
					- Jumlah Rambu sungai yang seharusnya terpasang	76	DISHUB

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
					- Jumlah Rambu Laut/ mercusuar yang seharusnya terpasang	6	DISHUB
				Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rasio ijin trayek	0,22%	DISHUB
					Jumlah uji kir angkutan umum	5,1	DISHUB
					Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	+ 25 Menit	DISHUB
				Program Perawatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Cakupan Sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	0,00%	DISHUB
		Urusan Perencanaan Pembangunan					
		Meningkatnya kualitas manajemen pembangunan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan		DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Cakupan perencanaan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh	100	BAPPEDA
				Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah Realisasi Kerjasama Pembangunan	90	BAPPEDA
				Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Jumlah Tata Batas Wilayah yang terfasilitasi	100	BAPPEDA
				Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Cakupan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	100	BAPPEDA
				Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan PNS yang memperoleh kesempatan mengikuti diklat perencanaan	80%	BAPPEDA
				Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perda	ada	BAPPEDA
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Cakupan rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti	100	BAPPEDA
				Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Cakupan rekomendasi hasil koordinasi yang ditindak lanjuti	100	BAPPEDA
				Program Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur.	cakupan perencanaan aparatur		BAPPEDA
				Program Perencanaan Sosial dan Budaya	cakupan perencanaan sosbud		BAPPEDA
				Program Desa Mandiri Perencanaan	desa mandiri perencanaan		BAPPEDA
				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Ketersediaan perencanaan pembangunan ekonomi	94%	DISHUB

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
				Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Cakupan database jalan/jembatan		DINAS PU
				Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik	Cakupan data dan informasi\		DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
2	REFORMASI BIROKRASI						
		Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian;	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan				
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	DINAS PENDIDIKAN
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	100%	DINAS PENDIDIKAN
				Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	94%	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
			Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah				
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	
			Menurunnya tingkat pelanggaran hukum				
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	96%	
				Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Perundangan yang disusun	94%	
			Meningkatnya tertib administrasi pemerintah dan kualitas pelayanan				

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
			publik				
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	
				Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase kelengkapan data dan kepemilikan tanah	96%	
				Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Cakupan kearsipan dalam sistem administrasi	96%	
				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,00%	
					Rasio bayi berakte kelahiran	100%	
					Rasio pasangan berakte nikah	100%	
					Kepemilikan akta kelahiran	100%	
					Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	
					Masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga	100%	
					Cakupan pelayanan adminduk	100%	
					Desa Mandiri Tertib Adm. Kependudukan	150	
			Optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan				
				Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Cakupan pembinaan dan pengawasan sumber daya mineral	100%	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
3	PENDIDIKAN						
		Urusan Pendidikan	Meningkatnya mutu dan daya saing pendidikan serta pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan				
				Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	71%	DINAS PENDIDIKAN
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun):	12,00	DINAS PENDIDIKAN
					1. APK SD	128,80%	DINAS PENDIDIKAN
					2. APK SLTP	87,60%	DINAS PENDIDIKAN
					APM SD/MI	100%	DINAS PENDIDIKAN
					APM SLTP/MTs	99%	DINAS PENDIDIKAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
					APS 7-12	100%	DINAS PENDIDIKAN
					APS 13-15	95%	DINAS PENDIDIKAN
					Angka Putus Sekolah SD/MI	0,05%	DINAS PENDIDIKAN
					Angka Putus Sekolah SLTP/MTs	0,05%	DINAS PENDIDIKAN
					Angka mengulang SD/MI	1%	DINAS PENDIDIKAN
					Angka mengulang SLTP/MTs	0,10%	DINAS PENDIDIKAN
					Angka Melanjutkan SD/MI	100%	DINAS PENDIDIKAN
					Angka Melanjutkan SLTP/MTs	99%	DINAS PENDIDIKAN
					Angka Lulusan SD/MI	100%	DINAS PENDIDIKAN
					Angka Lulusan SLTP/MTs	100%	DINAS PENDIDIKAN
					Rata-Rata Nilai UN SD/MI	5,5	DINAS PENDIDIKAN
					Rata-Rata Nilai UN SLTP/MTs	6,5	DINAS PENDIDIKAN
					Angka Partisipasi Sekolah	97%	DINAS PENDIDIKAN
					Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	52	DINAS PENDIDIKAN
					Rasio guru/murid	20	DINAS PENDIDIKAN
					Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata	27	DINAS PENDIDIKAN
					Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	90%	DINAS PENDIDIKAN
					Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	90%	DINAS PENDIDIKAN
				Program Pendidikan Menengah	APK SLTA	89,15%	DINAS PENDIDIKAN
					APM SLTA/MA/SMK	95%	DINAS PENDIDIKAN
					APS 16-18	90%	DINAS PENDIDIKAN
					Angka Putus Sekolah SLTA/MA/SMK	0,05%	DINAS PENDIDIKAN
					SLTA/MA/SMK	0,03%	DINAS PENDIDIKAN
					Angka Lulusan SLTA/MA/SMK	0,9975	DINAS PENDIDIKAN
					Rata-Rata Nilai UN SLTA/MA/SMK	6,5	DINAS PENDIDIKAN
					Angka Partisipasi Sekolah	95%	DINAS PENDIDIKAN
					Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	15	DINAS PENDIDIKAN
					Rasio guru/murid	26	DINAS PENDIDIKAN
					Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata	26	DINAS PENDIDIKAN
					Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik.	100%	DINAS PENDIDIKAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
				Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf (%)	95,59%	DINAS PENDIDIKAN
				Program Pendidikan Luar Biasa	Rasio kecukupan sarana pendidikan luar biasa	0,00%	DINAS PENDIDIKAN
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Guru yang memenuhi kualifikasi D.IV/S 1	0,00%	DINAS PENDIDIKAN
					1. SD	90%	DINAS PENDIDIKAN
					2. SMP	0,97	DINAS PENDIDIKAN
					3. SLTA	0,99	DINAS PENDIDIKAN
					1. SD	85%	DINAS PENDIDIKAN
					2. SMP	90%	DINAS PENDIDIKAN
					3. SLTA	95%	DINAS PENDIDIKAN
					1. SD	90%	DINAS PENDIDIKAN
					2. SMP	95%	DINAS PENDIDIKAN
					3. SMA/SMK	0,98	DINAS PENDIDIKAN
				Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Satu guru satu laptop	100%	DINAS PENDIDIKAN
					Guru mampu menggunakan Laptop sebagai media pembelajaran	100%	DINAS PENDIDIKAN
				Program Pendidikan Anak Usia Dini	pembangunan sarana prasarana PAUD		DINAS PENDIDIKAN
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	pengembangan sarana dan prasarana pendidikan dasar sembilan tahun		DINAS PENDIDIKAN
				Program Pendidikan Menengah	cakupan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan menengah		DINAS PENDIDIKAN
				Program Pendidikan Luar Biasa	pengembangan sarana dan prasarana pendidikan luar biasa		DINAS PENDIDIKAN
				Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan	84	BARPUS
					Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	19000	BARPUS
					Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	2500	BARPUS
		Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	Meningkatnya prestasi dan kreativitas pemuda dan olahraga				
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga		DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi pemuda	50	DISPORA

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
				Program Peningkatan Upaya Penuhbanan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	15	DISPORA
				Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Cakupan bina olahraga		DISPORA
				Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	0,236686391	DISPORA
					Jumlah prestasi olahraga	250	DISPORA
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga	94%	DISPORA
				Program Pencegahan Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	Jumlah kegiatan kepemudaan	80%	DISPORA

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
4	KESEHATAN	Urusan Kesehatan	Meningkatnya kualitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan kesehatan serta pencegahan terhadap penyakit				
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan layanan obat	100%	DINAS KESEHATAN
				Program Kesehatan Masyarakat	Cakupan layanan perbekalan kesehatan	100	DINAS KESEHATAN
				Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar	94%	DINAS KESEHATAN
					Persentase temuan pelanggaran obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat	100%	DINAS KESEHATAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
					kesehatan		
					3.1. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	99,98	DINAS KESEHATAN
					3.2. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota	100	DINAS KESEHATAN
				Program Promosi dan Kesehatan Masyarakat	Persentase rumah tangga yang melaksanakan PHBS	70%	DINAS KESEHATAN
					Capaian posyandu purnama mandiri	40	DINAS KESEHATAN
				Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.9. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100%	DINAS KESEHATAN
					1.10. Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	DINAS KESEHATAN
					1.11. Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	99,99	DINAS KESEHATAN
				Program Lingkungan Sehat	Persentase TTU/Sarana Pendidikan/Sarana Kesehatan yang memenuhi syarat kesehatan	70%	DINAS KESEHATAN
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Pelayanan (Penemuan dan penanganan) HIV AIDS, TB Paru, dan Malaria	HIV AIDS = 5, TB. Paru=300, Malaria=100	DINAS KESEHATAN
				Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Cakupan	94%	DINAS KESEHATAN
					1.12. Cakupan peserta KB Aktif	99,99	DINAS KESEHATAN
					1.1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	94,43	DINAS KESEHATAN
					1.2. Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	79,97	DINAS KESEHATAN
					1.3. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90	DINAS KESEHATAN
					1.4. Cakupan pelayanan Ibu Nifas	90	DINAS KESEHATAN
					1.5. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	79,89	DINAS KESEHATAN
					1.6. Cakupan kunjungan bayi	90	DINAS KESEHATAN
					1.7. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	99,9	DINAS KESEHATAN
				Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak	1.8. Cakupan pelayanan anak balita	94%	DINAS KESEHATAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
				Program Pengendalian Penyakit dan Surveillance	1.13. Cakupan Penemuan dan penanganan penderita penyakit	94%	DINAS KESEHATAN
					1.13.a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	100	DINAS KESEHATAN
					1.13.b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita	100	DINAS KESEHATAN
					1.13.c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	99,96	DINAS KESEHATAN
					1.13.d. Penderita DBD yang Ditangani	100	DINAS KESEHATAN
					1.13.e. Penemuan Penderita Diare	100	DINAS KESEHATAN
				Program Desa Sehat Mandiri	cakupan desa sehat mandiri		DINAS KESEHATAN
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	cakupan kunjungan dokter spesialis/perawat ke Puskesmas dan ke RSU AM.Parikesit	12	RSU AM PARIKESIT
				Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	0,43%	RSU AM PARIKESIT
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Peningkatan imunisasi	100%	RSU AM PARIKESIT
					pelayanan gawat darurat	100%	RSU AM PARIKESIT
					rawat jalan	100%	RSU AM PARIKESIT
					rawat inap	83%	RSU AM PARIKESIT
					bedah sentral	100%	RSU AM PARIKESIT
					pelayanan persalinan perinatologi	100%	RSU AM PARIKESIT
					pelayanan intensif	100%	RSU AM PARIKESIT
					pelayanan radiologi	100%	RSU AM PARIKESIT
					pelayanan laboratorium patologi klinik	100%	RSU AM PARIKESIT
					pelayanan rehabilitasi medik	100%	RSU AM PARIKESIT
					pelayanan farmasi	100%	RSU AM PARIKESIT
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase pengadaan obat-obatan dan ABHP rumah sakit	100%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan Pelayanan (Penemuan dan penanganan) HIV AIDS, TB Paru, dan Malaria	HIV AIDS = 5, TB. Paru=300, Malaria=100	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
				Program upaya kesehatan masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin	60%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Cakupan Penanganan Pengaduan masyarakat	100%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Jumlah Pelaksanaan sosialisasi dan promosi pelayanan kesehatan masyarakat	24 kali	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
					Jumlah Pelaksanaan edukasi tentang informed consent kepada pasien dan keluarganya tentang pelayanan medik yang akan dilakukan oleh rumah sakit.	100%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
				Program Lingkungan Sehat Perumahan	Persentase Luas pemukiman yang tertata		DINAS PU
				Program Lingkungan Sehat Perumahan	rumah tangga bersanitasi	100	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin	60%	SETDA
					Cakupan Penanganan Pengaduan masyarakat	100%	SETDA
					Jumlah Pelaksanaan sosialisasi dan promosi pelayanan kesehatan masyarakat	24 kali	SETDA
					Jumlah Pelaksanaan edukasi tentang informed consent kepada pasien dan keluarganya tentang pelayanan medik yang akan dilakukan oleh rumah sakit.	100%	SETDA
			Meningkatnya ketersediaan sarana dan tenaga pelayanan kesehatan				
				Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Jumlah sarana dan prasarana:	94%	DINAS KESEHATAN
					posyandu	900	DINAS KESEHATAN
					Puskesmas	40	DINAS KESEHATAN
					Pustu	175	DINAS KESEHATAN
					Rumah Sakit	4	DINAS KESEHATAN
					dokter spesialis	7	DINAS KESEHATAN
					dokter	279,8	DINAS KESEHATAN
					dokter gigi	77	DINAS KESEHATAN
					apoteker	70	DINAS KESEHATAN
					bidan	700	DINAS KESEHATAN
					perawat	826	DINAS KESEHATAN
					tenaga ahli gizi	154	DINAS KESEHATAN
					tenaga ahli sanitasi	280	DINAS KESEHATAN
					tenaga ahli Kesehatan Masyarakat	280	DINAS KESEHATAN
				Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	kecukupan sarana Kesehatan	2	DINAS KESEHATAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
				Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	gedung	60%	RSU AM PARIKESIT
					alkes	100%	RSU AM PARIKESIT
				Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	gedung	0,00%	RSU AM PARIKESIT
						0,00%	RSU AM PARIKESIT
				Program Peningkatan Pelayanan Medis dan Non Medis	Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh pegawai medis dan non medis	0,00%	RSU AM PARIKESIT
				Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana sesuai dengan standar	85%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Jumlah ketersediaan hardware dan software pada setiap unit	90%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Jumlah pengembangan software SIM yang terintegrasi antar unit di RS	90%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Jumlah alat studio dan komunikasi	3	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Persentase Pengadaan peralatan medis dan non medis sesuai standar	70%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
				Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai standar	100%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Persentase Pemeliharaan untuk setiap jenis peralatan medis dan non medis	100%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Persentase peralatan yang terkalibrasi	100%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
				Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rasio kecukupan sarana Kesehatan		DINAS PU
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan Lingkungan	cakupan pembangunan sarpras kesehatan		DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
				Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Rasio kecukupan sarana Kesehatan	94%	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
							1
			Meningkatnya tata kelola pelayanan kesehatan				1
				Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan daerah	100%	DINAS KESEHATAN
				Program Dukungan Manajemen Kesehatan Modern dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Cakupan puskesmas bersertifikasi ISO	4	DINAS KESEHATAN
					Usia Harapan Hidup (UHH)	72	DINAS KESEHATAN
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	gizi	100%	RSU AM PARIKESIT
					transfusi darah	100%	RSU AM PARIKESIT
					pelayanan gakin	100%	RSU AM PARIKESIT
					rekam medik	100%	RSU AM PARIKESIT
					pengelolaan limbah	100%	RSU AM PARIKESIT
					pelayanan administrasi dan manajemen	100%	RSU AM PARIKESIT
					pelayanan ambulance/kereta jenazah	100%	RSU AM PARIKESIT
					pemulasaran jenazah	100%	RSU AM PARIKESIT
					pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	100%	RSU AM PARIKESIT
					pelayanan laundry	100%	RSU AM PARIKESIT
					pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	100%	RSU AM PARIKESIT
				Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase kerjasama dokter spesialis	0,00%	RSU AM PARIKESIT
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		100%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Jumlah Revisi struktur organisasi dan job description organisasi	1 stuktur dan 15 job des	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Jumlah dokumen tata kelola (HBL, MSBL dan SPM RS)	3 Dokumen	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Jumlah dokumen pencapaian kinerja	1 Dokumen	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Jumlah laporan resiko klinis berbasis bukti	24	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Persentase clinical pathway	100%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
					Tingkat Kepatuhan terhadap SOP	100%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Kejadian Mal Praktek	0,00%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Pencapaian Keselamatan Pasien (Patient Safety)	100%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Jumlah Pelaksanaan survey PPI	12 kali/tahun	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
				Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Persentase kerjasama dokter spesialis	75%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
				Program Peningkatan Pelayanan Medis dan Non Medis	Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh pegawai medis dan non medis	100%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Jumlah lama hari rawat / Lengt Of Stay (LOS)	6 hari	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Jumlah pemanfaatan Tempat Tidur (BOR)	70%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Penyusunan dokumen Blue Print	100%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Persentase Pengembangan sistem manajemen pemasaran RS	80%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Pelaksanaan CRM (Customer Relationship Marketing)	70%	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
					Pengembangan Pelayanan Unggulan	2	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI
5	PENANGGULANGAN KEMISKINAN						
		Urusan Sosial	Menurunnya angka kemiskinan				
				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase pemberdayaan sosial bagi keluarga fakir miskin	66%	DINAS SOSIAL
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase korban bencana yang menerima pelayanan kesejahteraan sosial selama masa tanggap darurat	100%	DINAS SOSIAL

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
				Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Jumlah eks penyandang penyakit sosial yang menerima bimbingan mental sosial	700 orang	DINAS SOSIAL
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	350 orang	DINAS SOSIAL
				Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah Taman Makam Pahlawan, Museum Perjuangan dan situs perjuangan yang dipelihara	90%	DINAS SOSIAL
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Usaha Mikro dan Kecil	34	DISPERINDAGKOP
				Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Usaha Mikro dan Kecil		BAPEMAS PEMDES
				Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Kelompok Masyarakat Pesisir	45	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Urusan Ketenagakerjaan	Meningkatnya perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan				
				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan tenaga kerja terdaftar yang diberikan pelatihan	94%	DISNAKERTRANS
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	71%	DISNAKERTRANS
		Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Meningkatnya keberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Cakupan tenaga kerja yang memiliki perlindungan jiwa	80%	DISNAKERTRANS
				Program Pengembangan Lembaga-Lembaga Pemerintahan Desa	Desa Mandiri (Aspek Pemberdayaan Masyarakat)	126	BAPEMAS PEMDES
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Monev dan Evaluasi Kegiatan Desa Mandiri SKPD	126	BAPEMAS PEMDES
					LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi)	25	BAPEMAS PEMDES
					Desa Mandiri (Aspek Pemberdayaan	126 desa	BAPEMAS PEMDES

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
					Masyarakat)		
				Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan Aspek Pemberdayaan Masyarakat	0,00%	BAPEMAS PEMDES
				Program Peningkatan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna	Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Posyantek	18 kec	BAPEMAS PEMDES
				Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Kabupaten Layak Anak	0,00%	BKBPP & PA
				Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.1. APBD Responsif Gender (ARG) alokasi APBD 2 % per Tahun		BKBPP & PA
					Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Musrenbang/Forum Anak)		BKBPP & PA
				Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dlm UPTD	96%	BKBPP & PA
				Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidik sampai dengan putusan Pengadilan atas Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mendapatkan layanan bantuan hukum	0,00%	BKBPP & PA
				Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	PKK Aktif	96%	BAPEMAS PEMDES
				Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	BKBPP & PA
					Rasio Akseptor KB		BKBPP & PA
				Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	cakupan penganggungan narkoba,PMS dan HIV	94%	BKBPP & PA
				Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Cakupan pengembangan KRR	94%	BKBPP & PA
				Program Penyiapan Tenaga Pedamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan tenaga pengamping kelompok bina keluarga	94%	BKBPP & PA
				Program Keluarga Sejahtera	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	0,00%	BKBPP & PA
				Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan pembinaan terhadap remaja	94%	BKBPP & PA

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
				Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	cakupan masyarakat yang diibina	94%	BKBPP & PA
				Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang menerima pelayanan sosial diluar panti	18%	DINAS SOSIAL
				Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang menerima pelayanan rehabilitasi sosial	12%	DINAS SOSIAL
				Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Jumlah Unit Pelaksana Teknis yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial anak melalui panti	1 UPT	DINAS SOSIAL
				Program Bedah Rumah	Presentase rumah tidak layak huni yang direhab	1.000 rumah	DINAS SOSIAL
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pengembangan Sistem Pelayanan	Jumlah sistem aplikasi dan rancangan regulasi pelayanan kesejahteraan sosial yang disusun	6 jenis	DINAS SOSIAL
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	1,536	DISPERINDAGKOP
				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Kemitraan Koperasi dengan Bank	4	DISPERINDAGKOP
					Jumlah koperasi mandiri berprestasi	184	DISPERINDAGKOP
				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	98%	DISPERINDAGKOP
					Cakupan Bina Koperasi/UKM	100%	DISPERINDAGKOP
				Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Ekspor bersih perdagangan	94%	DISPERINDAGKOP
6	KETAHANAN PANGAN						
		Urusan Kelautan Dan Perikanan	Meningkatnya produksi tangkap nelayan dan perikanan budidaya				
				Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya Tambak	29,28	DISKANLUT
					Produksi Perikanan Budidaya Kolam	655	DISKANLUT
					Produksi Perikanan Budidaya Keramba	41,39	DISKANLUT
					Produksi Benih	289.698.539	DISKANLUT

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
				Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap Perairan Laut	34,305	DISKANLUT
					Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum	34,864	DISKANLUT
				Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Cakupan nelayan yang diberi penyuluhan	0,00%	DISKANLUT
				Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Dokumen Sistim Penyuluhan Perikanan	100%	DISKANLUT
				Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Ekspor Produksi Perikanan	5,199	DISKANLUT
				Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Kawasan Budidaya	0,00%	DISKANLUT
				Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	cakupan pengawasan sumberdaya laut dan perikanan	94%	DISKANLUT
				Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	cakupan sarana dan prasarana yang dikembangkan	94%	DISKANLUT
				Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	cakupan sarana dan prasarana yang disiapkan	94%	DISKANLUT
				Program Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir dan Kelautan	cakupan wilayah pesisir dan kelautan yang dikelola	94%	DISKANLUT
		Urusan Pertanian	Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dalam arti luas				
				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Nilai tukar petani	116	BKPP
				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani-nelayan	100	BKPP
					Jumlah Kelompok tani-nelayan dengan kelas Madya dan Utama	90	BKPP
				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi	Meningkatnya pemasaran produk petani-nelayan	100	BKPP

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
				Pertanian/Perkebunan			
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian / perkebunan	100	BKPP
				Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya kapasitas dan kinerja penyuluh	100	BKPP
				Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya kapasitas dan kinerja penyuluh	80%	BKPP
					Meningkatnya kapasitas dan kinerja penyuluh	100	BKPP
					Cakupan Pelayanan Penyuluhan Pertanian Satu Desa Satu Penyuluh	1,33	BKPP
				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	3.a. Padi (Ton)	215,373	DISTAN PANGAN
					3.b. Jagung (Ton)	3,725	DISTAN PANGAN
					3.d. Kedelai(Ton)	549	DISTAN PANGAN
					3.e. Ubi Kayu (Ton)	107,472	DISTAN PANGAN
					3.f. Ubi Jalar	8,926	DISTAN PANGAN
					3.g. Kacang Tanah (Ton)	891	DISTAN PANGAN
					3.h. Kacang Hijau (Ton)	358	DISTAN PANGAN
					3.i. Tanaman Buah (Ton)	62,686	DISTAN PANGAN
					3.j. Sayuran(Ton)	23,265	DISTAN PANGAN
					3.k. NTP	116	DISTAN PANGAN
				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:		DISTAN PANGAN
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	86	DISTAN PANGAN
					Padi Sawah(Ton)	5	DISTAN PANGAN
					Padi Ladang(Ton)	3	DISTAN PANGAN
					Jagung (Ton)	3	DISTAN PANGAN
					Kedelai(Ton)	2	DISTAN PANGAN
					Ubi Kayu (Ton)	65	DISTAN PANGAN
					Ubi Jalar (Ton)	11	DISTAN PANGAN
					Kacang Tanah (Ton)	143%	DISTAN PANGAN
					Kacang Hijau (Ton)	111%	DISTAN PANGAN
				Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Kontribusi pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB	3	DISTAN PANGAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD	
					INDIKATOR	TARGET		
				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	jumlah petani kelas madya/utama	94%	DINAS DAN HEWAN	PETERNAKAN KESEHATAN
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Ketersediaan pangan utama	212,60 Kg	DINAS DAN HEWAN	PETERNAKAN KESEHATAN
				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:	423245	DINAS DAN HEWAN	PETERNAKAN KESEHATAN
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Luas lahan termekanisasi (%)	0,00%	DINAS DAN HEWAN	PETERNAKAN KESEHATAN
				Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Angka Kelahiran Ternak	94%	DINAS DAN HEWAN	PETERNAKAN KESEHATAN
				Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	34%	DINAS DAN HEWAN	PETERNAKAN KESEHATAN
					Produksi daging dan telur	30.680; 40.682	DINAS DAN HEWAN	PETERNAKAN KESEHATAN
					1) Populasi Sapi Potong	30,581	DINAS DAN HEWAN	PETERNAKAN KESEHATAN
					2) Populasi Kerbau	6,271	DINAS DAN HEWAN	PETERNAKAN KESEHATAN
					3) Populasi Kambing	8,615	DINAS DAN HEWAN	PETERNAKAN KESEHATAN
					4) Populasi Babi	6,695	DINAS DAN HEWAN	PETERNAKAN KESEHATAN
					5) Populasi Ayam Buras	8,922.005	DINAS DAN HEWAN	PETERNAKAN KESEHATAN
					6) Populasi Ayam Ras Petelur	3.284.601	DINAS DAN HEWAN	PETERNAKAN KESEHATAN
					7) Populasi Ayam Ras Pedaging	24.164.133	DINAS DAN HEWAN	PETERNAKAN KESEHATAN
					8) Populasi Itik	42,296	DINAS	PETERNAKAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
							DAN KESEHATAN HEWAN
				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Pemasaran Ternak pertahun	94%	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah Bibit Ternak	94%	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan			1
				Program Pengembangan Usaha Kawasan Pembibitan Ternak	Cakupan pengembasan kawasan pembibitan ternak	0,00%	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Program Peningkatan Sarana Produksi Hasil Peternakan	Peningkatan sarana produksi hasil peternakan	0,00%	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
				Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Cakupan perencanaan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh		DISBUNHUT
				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani			DISBUNHUT
				Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB		DISBUNHUT
				Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	cakupan pengelolaan sumberdaya hutan	94%	DISBUNHUT
				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:	423245	DISBUNHUT
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	94%	DISBUNHUT
					Padi Sawah(Ton)	5.202	DISBUNHUT
					Padi Ladang(Ton)	3.296,752.952	DISBUNHUT
					Jagung (Ton)	3.271	DISBUNHUT
					Kedelai(Ton)	1.523	DISBUNHUT
					Ubi Kayu (Ton)	65.265	DISBUNHUT
					Ubi Jalar (Ton)	10.529	DISBUNHUT
					Kacang Tanah (Ton)	1.425	DISBUNHUT
					Kacang Hijau (Ton)	1.107	DISBUNHUT
				Program Peningkatan	Kontribusi sub sektor perkebunan	63%	DISBUNHUT

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
				Produksi Pertanian/Perkebunan	(tanaman keras) terhadap PDRB		
					Produksi Perkebunan	377,779	DISBUNHUT
					5.a. Sawit (Ton)	360,618	DISBUNHUT
					5.b. Karet (Ton)	5,345	DISBUNHUT
					5.c. Lada (Ton)	3,714	DISBUNHUT
					5.d. Kopi (Ton)	1,434	DISBUNHUT
					5.e. Kelapa Dalam (Ton)	6,482	DISBUNHUT
					5.f. Kakao (Ton)	186	DISBUNHUT
				Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	jumlah petani perkebunan tingkat madya/utama		DISBUNHUT
				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Perkebunan		DISBUNHUT
				Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar		DISBUNHUT
					Produksi Perkebunan	377,779	DISBUNHUT
					5.a. Sawit (Ton)	360,618	DISBUNHUT
					5.b. Karet (Ton)	5,345	DISBUNHUT
					5.c. Lada (Ton)	3,714	DISBUNHUT
					5.d. Kopi (Ton)	1,434	DISBUNHUT
					5.e. Kelapa Dalam (Ton)	6,482	DISBUNHUT
					5.f. Kakao (Ton)	186	DISBUNHUT
		Urusan Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketersediaan pangan				
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	100	BKPP
					Regulasi Ketahanan Pangan	2	BKPP
					Ketersediaan pangan utama	172	BKPP
					Persentase desa berstatus swasembada pangan utama (beras)	80%	BKPP
					Jumlah daerah rawan pangan (jumlah desa rawan pangan)	61	BKPP
					Jumlah Desa mandiri pangan	193	BKPP
				Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Regulasi Ketahanan Pangan	0,00%	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN
					Ketersediaan pangan utama	212,60 Kg	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
7	LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA						
		Untuk Urusan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana				
				Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Cakupan Renovasi rumah	80%	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	cakupan penanggulangan kebakaran		KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN
				Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Kabupaten Siaga Bencana	0,00%	BAKESBANGPEMAS
					Masyarakat Siaga Bencana	3 Kec	BAKESBANGPEMAS
					Papan Informasi Kebencanaan	100%	BAKESBANGPEMAS
					Balakarcana Tangguh	17%	BAKESBANGPEMAS
				Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran:		BPBD
					- Lama Waktu Tiba Dilokasi (15 Menit)	38 Menit	BPBD
					- Persentase Aparatur PMK Yang Memenuhi Kualifikasi	95%	BPBD
					- Tingkat Penanganan Kejadian Kebakaran	30%	BPBD
				Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Kabupaten Siaga Bencana:		BPBD
					- Masyarakat Siaga Bencana	3 Kec	BPBD
					- Papan Informasi Kebencanaan	100%	BPBD
					- Balakarcana Tangguh	72%	BPBD
					- Hunian Sementara Korban Bencana	100%	BPBD
				Program Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	- Deteksi Dini Bencana	1 Pusdalop	BPBD
					Cakupan Tanggap Darurat	96%	BPBD
					Tingkat waktu tanggap	12 Jam	BPBD
					Pos Siaga Penanggulangan Bencana	13 Pos	BPBD
				Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana.	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	96%	BPBD
		Kehutanan	Meningkatnya pencegahan pencemaran lingkungan/ kerusakan lingkungan serta				

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
			pertumbuhan sektor kehutanan				
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	100%	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
					Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk (CK)	1,446	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
				Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penegakan hukum lingkungan	90%	BLHD
				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	100%	BLHD
				Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	status mutu air	100%	BLHD
				Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	100%	BLHD
					Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	90%	BLHD
				Program Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara	90%	BLHD
					Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	90%	BLHD
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah		KANTOR KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
				Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan	cakupan kawasan hutan yang ditertibkan		DISBUNHUT
				Program Pembinaan dan Penerbitan Industri Hasil Hutan	cakupan penertiban hasil hutan	94%	DISBUNHUT
				Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	cakupan pengembangan kawasan hutan		DISBUNHUT

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
				Program Pengawasan dan Penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Berkurangnya Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan	3,5 Ha	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
				Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Masyarakat Sadar Hukum	1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Program Pengembangan Kawasan Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	cakupan pengembangan kawasan konservasi rehabilitasi laut	94%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
				Meningkatnya potensi dan konservasi sumber daya hutan			
				Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis		DINAS KEHUTANAN
				Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	7,04% (5928 Ha)	DISBUNHUT
					Kerusakan Kawasan Hutan	(949.080 Ha atau 57.95 %)	DISBUNHUT
					Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	2%	DISBUNHUT
				Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis		DISBUNHUT
8	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI						
		Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri					
		Meningkatnya kerjasama pemerintah dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	100	BAKESBANGPEMAS
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	4.7 (300 orang)	BAKESBANGPEMAS
					Cakupan rasio petugas linmas di	2 (6000 org.	BAKESBANGPEMAS

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
			kehidupan berbangsa dan bernegara	Keamanan	Kabupaten/ Kota	3011 RT	BAKESBANGPEMAS
					Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan	13.4 (3180 pos, 237 des/kel)	
				Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Jumlah kasus penyakit masyarakat	140	BAKESBANGPEMAS
				Program Pendidikan Politik Masyarakat	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	70	BAKESBANGPEMAS
					Prosentase ormas yang tertib administrasi	50	BAKESBANGPEMAS
					Prosentase parpol yang tertib administrasi	100	BAKESBANGPEMAS
				Program Desa Mandiri Kebangsaan	Jumlah Desa Mandiri Kebangsaan	129	BAKESBANGPEMAS
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat	100	BAKESBANGPEMAS
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten/ Kota	100%	KANTOR SATPOL PP
					Cakupan penanganan kamtibmas	100%	KANTOR SATPOL PP
					Cakupan patroli siaga kertertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 (18 kelompok patroli)	KANTOR SATPOL PP
				Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	cakupan penngamanan lingkungna	80%	KANTOR SATPOL PP
				Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	4.7 (300 orang)	KANTOR SATPOL PP
					Cakupan rasio petugas linmas di Kabupaten/ Kota	2 (6000 org, 3011 RT	KANTOR SATPOL PP
					Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan	13.4 (3180 pos, 237 des/kel)	KANTOR SATPOL PP
				Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	cakupan pengamanan	80%	KANTOR SATPOL PP
9	IKLIM INVESTASI						
		Urusan Penanaman Modal	Meningkatnya nilai investasi pembangunan daerah				

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	12	BPM & PD
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	131,745	BPM & PD
					Pertumbuhan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)	541.851.282	BPM & PD
		Urusan Komunikasi Dan Informatika	Peningkatan ketersediaan informasi data kabupaten	Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Persentase kerjasama investasi yang terwujud	100%	BPBD, BALITBANGDA, DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
				Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik	Jumlah Dokumen yang tersusun		BAPPEDA
				Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik	Jumlah Dokumen yang tersusun	94%	DISNAKERTRANS
				Program Penelitian dan Pengembangan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat	cakupan kelitbangan dibidang pemberdayaan masyarakat	0,00%	BALITBANGDA
				Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik	Jumlah Dokumen yang tersusun	0,00%	BALITBANGDA
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Ketersediaan publikasi mandiri dan berkala sebagai bahan pendukung riset ataupun referensi perumusan kebijakan	800	BALITBANGDA
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	3	BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
10	KEBUDAYAAN, EKONOMI KREATIF, DAN INOVASI TEKNOLOGI						
		Urusan Kebudayaan Dan Urusan Pariwisata	Meningkatnya wawasan seni dan budaya masyarakat serta peran serta masyarakat dalam melestarikan kebudayaan				
				Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Kajian Seni	94%	DISBUDPAR

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
				Program Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah grup kesenian	35	DISBUDPAR
					Jumlah gedung	24	DISBUDPAR
				Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan Organisasi	94%	DISBUDPAR
				Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Fasilitas Seni	94%	DISBUDPAR
				Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Cakupan kajian seni	0,00%	DISBUDPAR
			Meningkatnya daya jual potensi pariwisata				
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisata	94%	DISBUDPAR
				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah obyek wisata baru yg akan di kembangkan	94%	DISBUDPAR
				Program Pengembangan Kemitraan	Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian	94%	DISBUDPAR
11	ENERGI DAN INDUSTRI						
		Urusan Energi Dan Sumber Daya Mineral Dan Industri	Berkembangnya dan meningkatnya daya saing potensi perdagangan dan perindustrian				
				Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Cakupan sarana dan prasarana pasar	94%	DISPERINDAGKOP
				Program Pengembangan Ekspor Nasional	Cakupan Ekspor Lokal	94%	DISPERINDAGKOP
				Program Perlindungan dan Pengamanan Perdagangan	1 minggu sekali	1 minggu sekali	DISPERINDAGKOP
				Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	jumlah investor berskala internasional	0,00%	DISPERINDAGKOP
				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	7%	DISPERINDAGKOP
				Program Penataan Struktur Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	0,00%	DISPERINDAGKOP
					Jumlah pasar yang dibangun	96%	DISPERINDAGKOP

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	URUSAN	SASARAN RPJMD TAHUN 2015	PROGRAM PEMBANGUNAN	KINERJA		SKPD
					INDIKATOR	TARGET	
				Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	94%	DISPERINDAGKOP
				Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase Industri berbasis Teknologi	94%	DISPERINDAGKOP
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)	96%	DISPERINDAGKOP
					Jumlah jenis usaha industri kecil dan menengah (IKM)	96%	DISPERINDAGKOP
				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan Bina Industri/Perusahaan	0,00%	DISPERINDAGKOP
				Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Pertumbuhan industri	48%	DISPERINDAGKOP
				Program Peningkatan Promosi Hasil Produksi	cakupan promosi produk lokal	0,00%	DISPERINDAGKOP

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah maka pelaksanaan pembangunan tahun kelima RPJMD 2011-2015 melalui RKPD tahun 2015 ditetapkan dengan tema :

“MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, EKONOMI DAN SUMBERDAYA MANUSIA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN”

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015.

Berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pembangunan pada pembangunan **sumber daya manusia, ekonomi masyarakat, infrastruktur, kesetaraan gender dan sumber daya alam berkelanjutan** serta penunjang lainnya, maka dijabarkan pada 34 Urusan yang terdiri atas :

a) 26 (Dua Puluh Enam) Urusan Wajib, yaitu :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum;
- 4) Perumahan;
- 5) Penataan Ruang.
- 6) Perencanaan Pembangunan;
- 7) Perhubungan;
- 8) Lingkungan Hidup;
- 9) Pertanahan;
- 10) Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12) KB dan Keluarga Sejahtera;
- 13) Sosial;
- 14) Tenaga Kerja;
- 15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 16) Penanaman Modal Daerah;
- 17) Kebudayaan;
- 18) Pemuda dan Olahraga;
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- 21) Ketahanan Pangan;
- 22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 23) Statistik;
- 24) Kearsipan;
- 25) Komunikasi dan Informatika;

26) Perpustakaan.

b) 8 (delapan) Urusan Pilihan, yaitu :

- 1) Pertanian;
- 2) Kehutanan;
- 3) Energi dan Sumberdaya Mineral;
- 4) Pariwisata;
- 5) Kelautan dan Perikanan;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian
- 8) Ketransmigrasian.

Selanjutnya urusan wajib dan pilihan dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan, sasaran program, instansi penanggung jawab serta pagu indikatif, seperti Rencana Kerja dan Pendanaan menurut Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2015.

Setelah dilakukan proses verifikasi terhadap program dan kegiatan strategis yang diusulkan dalam Musrenbang dan Forum SKPD maka pada tahun anggaran 2015 direncanakan melalui dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara akan dialokasikan dana khusus Belanja Langsung untuk program dan kegiatan prioritas secara indikatif sebesar **Rp. 2.006.218.921.732,65** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1
REKAPITULASI ANALISIS PAGU INDIKATIF SKPD TAHUN 2015

KODE SKPD	URUSAN / SKPD	PAGU ANGGARAN INDIKATIF (Rp.)		JUMLAH (Rp.) (3) + (4)
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2	3	4	5
1	URUSAN WAJIB			
1. 01. 01	PENDIDIKAN			
1. 01. 01. 01.	DINAS PENDIDIKAN	27.151.962.550,31	86.384.112.058,97	113.536.074.609,28
1. 02	KESEHATAN			
1. 02. 01. 01.	DINAS KESEHATAN	10.228.018.681,22	71.353.529.216,06	81.581.547.897,28
1. 02. 02. 01.	RSU AM PARIKESIT	6.934.993.503,17	13.274.731.049,57	20.209.724.552,74
	RSU AM PARIKESIT (BLUD)			-
1. 02. 03. 01.	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI	4.344.684.282,21	3.602.526.077,82	7.947.210.360,03
	RSU AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI (BLUD)			
1. 03	PEKERJAAN UMUM			
1. 03. 02	DINAS BINA MARGA	1.193.731.688,84	286.108.427.343,02	287.302.159.031,86
1.03.03	DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	69.067.802.221,91	100.478.670.215,98	169.546.472.437,89
1. 06	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
1. 06. 01. 01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.285.793.964,97	9.253.959.012,01	11.539.752.976,98
1. 07	PERHUBUNGAN			
1. 07. 01. 01.	DINAS PERHUBUNGAN	2.902.627.424,11	15.136.968.583,04	18.039.596.007,15
1. 08	LINGKUNGAN HIDUP			
1. 08. 01. 01.	BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	1.284.690.340,79	2.913.494.165,72	4.198.184.506,50
1. 10.	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL			

KODE SKPD	URUSAN / SKPD	PAGU ANGGARAN INDIKATIF (Rp.)		JUMLAH (Rp.) (3) + (4)
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2	3	4	5
1. 10. 01. 01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1.057.293.710,92	2.573.405.400,69	3.630.699.111,61
1. 11.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
1. 11. 01. 01.	BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	861.692.362,04	3.411.351.919,96	4.273.044.282,00
1. 13	SOSIAL			
1. 13. 01. 01	DINAS SOSIAL	2.717.892.816,84	26.072.935.356,19	28.790.828.173,02
1. 14.	KETENAGAKERJAAN			
1. 14. 01. 01.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.020.811.466,51	5.210.401.363,36	7.231.212.829,87
1. 15	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
1. 15. 01. 01.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	3.773.979.112,02	3.773.226.489,55	7.547.205.601,57
1. 16.	PENANAMAN MODAL			
1. 16. 01. 01.	BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH	1.112.029.890,85	972.372.137,64	2.084.402.028,49
1. 18.	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
1. 18. 01. 01.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.526.978.431,38	15.110.807.908,80	16.637.786.340,18
1. 19.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI			
1. 19. 01. 01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	833.519.328,25	3.231.849.447,53	4.065.368.775,78
1. 19. 02. 01.	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.480.836.861,10	3.459.246.077,40	5.940.082.938,50
1. 19. 03. 01.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.888.281.134,82	1.835.674.387,32	5.723.955.522,15

KODE SKPD	URUSAN / SKPD	PAGU ANGGARAN INDIKATIF (Rp.)		JUMLAH (Rp.) (3) + (4)
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2	3	4	5
1. 20.	PEMERINTAHAN UMUM			
1. 20. 03.	SEKRETARIAT DAERAH	16.429.737.276,95	9.099.508.010,88	25.529.245.287,83
1. 20. 04. 01.	SEKRETARIAT DPRD	11.744.130.370,99	12.261.709.248,89	24.005.839.619,88
1. 20. 05. 01.	BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU	776.770.788,76	1.983.784.050,67	2.760.554.839,43
1. 20. 06. 01.	DINAS PENDAPATAN DAERAH	5.448.664.734,83	2.474.799.782,43	7.923.464.517,26
1. 20. 07. 01.	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	-	20.000.000.000
1. 20. 08. 01.	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.233.487.592,81	1.758.041.517,47	2.991.529.110,28
1. 20. 09. 01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	2.307.773.939,25	3.454.416.414,47	5.762.190.353,72
1. 20. 11. 01.	KECAMATAN TENGGARONG	1.850.000.000	1.900.000.000	3.750.000.000
1. 20. 12. 01.	KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	750.000.000	1.750.000.000	2.500.000.000
1. 20. 13. 01.	KECAMATAN LOA KULU	765.000.000	1.785.000.000	2.550.000.000
1. 20. 14. 01.	KECAMATAN LOA JANAN	795.000.000	1.855.000.000	2.650.000.000
1. 20. 15. 01.	KECAMATAN MUARA BADAK	1.069.500.000	2.495.500.000	3.565.000.000
1. 20. 16. 01.	KECAMATAN MARANG KAYU	1.160.000.000	2.505.000.000	3.665.000.000
1. 20. 17. 01.	KECAMATAN MUARA JAWA	1.154.187.500	2.705.812.500	3.860.000.000
1. 20. 18. 01.	KECAMATAN SAMBOJA	1.925.873.450	2.459.126.550	4.385.000.000
1. 20. 19. 01.	KECAMATAN SEBULU	1.113.482.300	1.386.517.700	2.500.000.000
1. 20. 20. 01.	KECAMATAN MUARA KAMAN	1.363.258.000	916.742.000	2.280.000.000
1. 20. 21. 01.	KECAMATAN KOTA BANGUN	1.896.430.610	303.569.390	2.200.000.000
1. 20. 22. 01.	KECAMATAN MUARA MUNTAI	1.475.000.000	625.000.000	2.100.000.000
1. 20. 23. 01.	KECAMATAN KENOHAN	981.290.400	1.118.709.600	2.100.000.000
1. 20. 24. 01.	KECAMATAN KEMBANG JANGGUT	634.500.000	1.480.500.000	2.115.000.000
1. 20. 25. 01.	KECAMATAN TABANG	885.000.000	2.065.000.000	2.950.000.000
1. 20. 26. 01.	KECAMATAN MUARA WIS	1.210.553.150	804.446.850	2.015.000.000

KODE SKPD	URUSAN / SKPD	PAGU ANGGARAN INDIKATIF (Rp.)		JUMLAH (Rp.) (3) + (4)
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2	3	4	5
1. 20. 27. 01.	KECAMATAN SANGA-SANGA	1.208.106.500	1.541.893.500	2.750.000.000
1. 20. 28. 01.	KECAMATAN ANGGANA	1.122.437.590	942.562.410	2.065.000.000
1. 20. 29. 01.	KELURAHAN JAHAB	-	-	1.000.000.000
1. 20. 30. 01.	KELURAHAN BUKIT BIRU	-	-	1.000.000.000
1. 20. 31. 01.	KELURAHAN TIMBAU	-	-	1.000.000.000
1. 20. 32. 01.	KELURAHAN PANJI	-	-	1.000.000.000
1. 20. 33. 01.	KELURAHAN SUKARAME	-	-	1.000.000.000
1. 20. 34. 01.	KELURAHAN BARU	-	-	1.000.000.000
1. 20. 35. 01.	KELURAHAN LOA TEBU	-	-	1.000.000.000
1. 20. 36. 01.	KELURAHAN MANGKURAWANG	-	-	1.000.000.000
1. 20. 37. 01.	KELURAHAN MALUHU	-	-	1.000.000.000
1. 20. 38. 01.	KELURAHAN LOA IPUH	-	-	1.000.000.000
1. 20. 39. 01.	KELURAHAN LOA IPUH DARAT	-	-	1.000.000.000
1. 20. 40. 01.	KELURAHAN SALOK API DARAT	-	-	1.000.000.000
1. 20. 41. 01.	KELURAHAN SALOK API LAUT	-	-	1.000.000.000
1. 20. 42. 01.	KELURAHAN AMBORAWANG LAUT	-	-	1.000.000.000
1. 20. 43. 01.	KELURAHAN AMBORAWANG DARAT	-	-	1.000.000.000

KODE SKPD	URUSAN / SKPD	PAGU ANGGARAN INDIKATIF (Rp.)		JUMLAH (Rp.) (3) + (4)
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2	3	4	5
1. 20. 44. 01.	KELURAHAN MARGO MULYO	-	-	1.000.000.000
1. 20. 45. 01.	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA	-	-	1.000.000.000
1. 20. 46. 01.	KELURAHAN SUNGAI SELUANG	-	-	1.000.000.000
1. 20. 47. 01.	KELURAHAN WONOTIRTO	-	-	1.000.000.000
1. 20. 48. 01.	KELURAHAN TANJUNG HARAPAN	-	-	1.000.000.000
1. 20. 49. 01.	KELURAHAN SAMBOJA KUALA	-	-	1.000.000.000
1. 20. 50. 01.	KELURAHAN SANIPAH	-	-	1.000.000.000
1. 20. 51. 01.	KELURAHAN HANDIL BARU	-	-	1.000.000.000
1. 20. 52. 01.	KELURAHAN MUARA SEMBILANG	-	-	1.000.000.000
1. 20. 53. 01.	KELURAHAN ARGOSARI	-	-	1.000.000.000
1. 20. 54. 01.	KELURAHAN TELUK PEMEDAS	-	-	1.000.000.000
1. 20. 55. 01.	KELURAHAN BUKIT MERDEKA	-	-	1.000.000.000
1. 20. 56. 01.	KELURAHAN KARYA MERDEKA	-	-	1.000.000.000
1. 20. 57. 01.	KELURAHAN MUARA JAWA ILIR	-	-	1.000.000.000
1. 20. 58. 01.	KELURAHAN MUARA JAWA TENGAH	-	-	1.000.000.000
1. 20. 59. 01.	KELURAHAN MUARA JAWA ULU	-	-	1.000.000.000

KODE SKPD	URUSAN / SKPD	PAGU ANGGARAN INDIKATIF (Rp.)		JUMLAH (Rp.) (3) + (4)
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2	3	4	5
1. 20. 60. 01.	KELURAHAN TELUK DALAM	-	-	1.000.000.000
1. 20. 61. 01	KELURAHAN DONDANG	-	-	1.000.000.000
1. 20. 62. 01.	KELURAHAN TAMAPOLE	-	-	1.000.000.000
1. 20. 63. 01.	KELURAHAN MUARA KEMBANG	-	-	1.000.000.000
1. 20. 64. 01.	KELURAHAN MUARA JAWA PESISIR	-	-	1.000.000.000
1. 20. 65. 01.	KELURAHAN JAWA	-	-	1.000.000.000
1. 20. 66. 01.	KELURAHAN PENDINGIN	-	-	1.000.000.000
1. 20. 67. 01.	KELURAHAN SANGA-SANGA DALAM	-	-	1.000.000.000
1. 20. 68. 01	KELURAHAN SARI JAYA	-	-	1.000.000.000
1. 20. 69. 01.	KELURAHAN SANGA-SANGA MUARA	-	-	1.000.000.000
1. 20. 70. 01.	KELURAHAN MELAYU	-	-	1.000.000.000
1. 20. 71. 01.	KELURAHAN KAMPUNG LAMA	-	-	1.000.000.000
1. 20. 72. 01.	KELURAHAN HANDIL BARU DARAT	-	-	1.000.000.000
1. 20. 99. 01.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.723.955.522,15	10.963.737.335,03	16.687.692.857,18
	SEKRETARIAT KORPRI	376.281.059,11	-	376.281.059,11
1. 21	KETAHANAN PANGAN			
1. 21. 01. 01.	BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	1.617.132.139,50	3.943.017.314,76	5.560.149.454,26

KODE SKPD	URUSAN / SKPD	PAGU ANGGARAN INDIKATIF (Rp.)		JUMLAH (Rp.) (3) + (4)
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2	3	4	5
1. 22.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			-
1. 22. 01. 01.	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	1.072.990.115,46	2.798.387.199,09	3.871.377.314,55
1. 24.	KEARSIPAN			
1. 24. 01. 01.	BADAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	929.710.115,04	1.828.760.493,81	2.758.470.608,86
				-
1. 25.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			-
1. 25. 01. 01.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.686.500.007,76	1.460.973.037,93	4.147.473.045,68
				-
2.	URUSAN PILIHAN			-
2. 01.	PERTANIAN			-
2. 01. 01. 01.	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN	2.575.820.232,16	4.022.648.376,25	6.598.468.608,41
2. 01. 01. 02.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2.238.548.770,51	4.223.540.236,91	6.462.089.007,42
2. 02.	KEHUTANAN			
2. 02. 03. 01.	DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN	2.170.531.017,50	10.746.000.031,03	12.916.531.048,53
2. 03.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
2. 03. 01. 01.	DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	1.233.576.408,06	9.339.763.173,04	10.573.339.581,09
2. 04.	PARIWISATA			

KODE SKPD	URUSAN / SKPD	PAGU ANGGARAN INDIKATIF (Rp.)		JUMLAH (Rp.) (3) + (4)
		BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	
1	2	3	4	5
2. 04. 01. 01.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.228.746.745,12	3.584.817.313,72	4.813.564.058,84
2. 05.	KELAUTAN DAN PERIKANAN			
2. 05. 01. 01.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.689.979.555,44	6.282.586.535,00	7.972.566.090,44

BAB VI PENUTUP

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 merupakan penjabaran dari tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010– 2015 dengan mengacu kepada RKP dan RKPD Propinsi Tahun 2015. Tingkat keberhasilan dari pelaksanaan rencana ini sangat ditentukan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara dan dukungan dari seluruh *stakeholder*.

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2015 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis bagi pelaksanaannya. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut :

1. RKPD Tahun 2015 sebagai pedoman penyusunan RAPBD, perlu dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015 dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
3. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
5. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap Kepala SKPD wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2015.
6. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk periode tahun 2015.

7. Staf Ahli dan Staf Khusus Bupati ditugaskan untuk turut serta mengawal, mengamati dan memantau pelaksanaan RKPD 2015 dan selanjutnya memberikan saran dan pendapat yang konstruktif secara lengkap kepada Bupati/Wakil Bupati.

Optimalisasi upaya dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, tersedianya dan terencanaanya anggaran secara efektif dan efisien, juga sangat ditentukan oleh komitmen membangun daerah yang disertai sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana pembangunan. Diharapkan pelaksanaan pembangunan mampu mengatasi dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Kepala Bagian Administrasi Hukum



Rokman Torang, SH, MH
NIP.196711021996031001